



KEEP GROWING HEALTHY



HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN

Keep Growing Healthy



BAB 1

Makna Tema

Kesinambungan Tema

Kilas Kinerja 2020

Peristiwa Penting

Daftar Isi





Keep Growing Healthy



Makna Tema

“Keep Growing Healthy”

Setelah memperkuat pondasi berkomitmen untuk Terus Maju Menjadi Lebih Kuat dan Lebih Baik yang merupakan sumber inspirasi bagi seluruh insan Bank Victoria Syariah dalam rangka terus menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan dari luar dan penguatan sinergi dengan perusahaan induk, PT Bank Victoria International Tbk. maka Laporan Tahunan 2020 ini, Bank Victoria Syariah menetapkan tema “Terus Tumbuh Sehat (**“Keep Growing Healthy”**)”.

“**Keep Growing Healthy**” yang menekankan komitmen dari semua komponen di dalam menuju Bank Victoria Syariah yang terus tumbuh, bergerak maju, berinovasi, mampu menghadapi tantangan ke depan, tetap berkualitas, dan sehat.

Tema ini merupakan akumulasi spirit seluruh insan Bank Victoria Syariah dari segala lini untuk terus memberikan yang terbaik dalam mengawal perusahaan melewati setiap tantangan. Semangat untuk terus memberikan yang terbaik dari seluruh potensi dan kemampuan para insan Bank Victoria Syariah ini, memiliki akar yang kuat pada prinsip kasih sayang pada seluruh alam.

Kesinambungan Tema

Kesinambungan Tema Laporan Tahunan menjadi penting untuk menunjukkan konsistensi Laporan Tahunan. Berikut ini kami sajikan kesinambungan tema selama 3 (tiga) tahun terakhir:



2019 Keep Moving Forward

To be Stronger and Better

Setelah memperkuat pondasi untuk berkomitmen meningkatkan kualitas pada segala aspek baik bisnis, operasional, sumber daya insani maupun tata kelola perusahaan yang baik dalam mencapai pertumbuhan usaha yang berkualitas dan berkelanjutan maka Laporan Tahunan 2019, Bank Victoria Syariah menetapkan tema “Terus Maju Menjadi Lebih Kuat dan Lebih Baik (**Keep Moving Forward to be Stronger and Better**)”.

Tema ini merupakan spirit dan semangat seluruh insan Bank Victoria Syariah untuk terus memberikan yang terbaik bagi Bank Victoria Syariah, dengan memperhatikan prinsip kasih sayang pada seluruh alam



2018 Komitmen untuk Berkualitas

Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya

Melanjutkan tema sebelumnya, tema tahun ini merupakan komitmen setiap insan Bank Victoria Syariah untuk memberikan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Komitmen untuk berkualitas diterapkan di setiap aspek bisnis, operasional, sumber daya insani maupun tata kelola perusahaan yang baik, sehingga harapan untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkualitas dan berkelanjutan dalam rangka menjadikan Bank Victoria Syariah terdepan dan terpercaya dapat terlaksana.



2017 Ayo Sinergi

Menuju Bank yang sehat, kuat, dan profitable

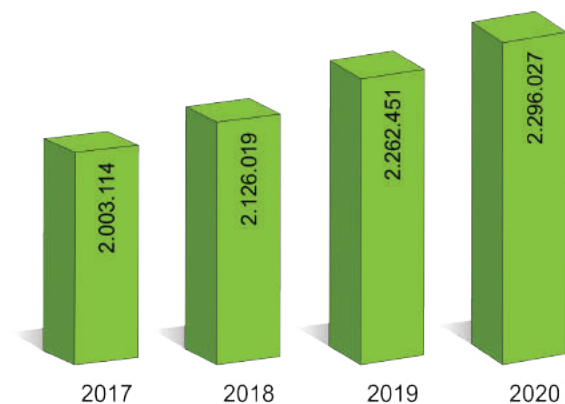
Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas. Dalam Sinergi diharapkan para pemangku kepentingan saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk pencapaian hasil yang lebih baik ke depan. Ayo Sinergi diambil sebagai tema *annual report* mengandung makna sebagai berikut :

- Tahun sinergi untuk mencapai kinerja dan hasil yang positif.
- Tahun sinergi untuk saling bekerjasama untuk maju dan tumbuh berkembang.
- Tahun sinergi untuk meningkatkan keefektifan organisasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan (*trust*) pada seluruh *Stakeholders*.

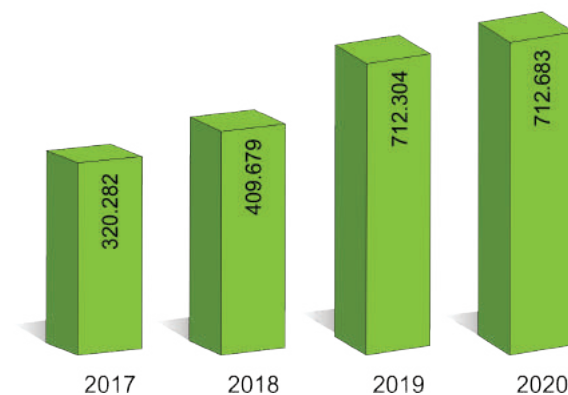
Dengan Tema “**AYO SINERGI**” maka semua stakeholder dirangkul untuk sama-sama membangun *trust* untuk mewujudkan cita-cita menjadi Bank Victoria Syariah yang sehat, tumbuh berkembang dan *profitable*.

Kilas Kinerja 2020

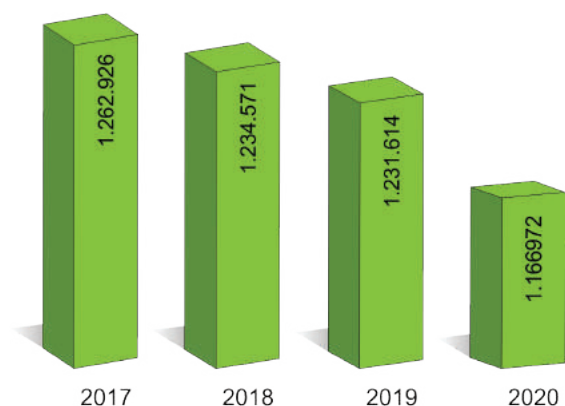
Total Aset



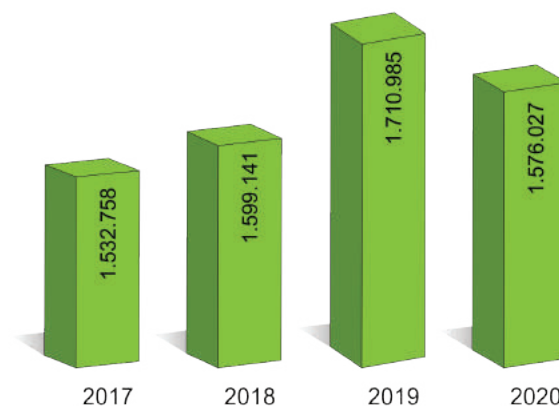
Efek-efek



Pembiayaan



Dana Wadiah & Syirkah Temporer



Ekuitas



Laba Sebelum Pajak



Peristiwa Penting

Rapat Kerja Tahun 2020



Bank Victoria Syariah mengadakan Rapat Kerja Tahunan di Graha BIP Jakarta yang dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi, Komisaris, Kepala Divisi, Kepala Bagian serta Pimpinan Cabang untuk membahas dan mendiskusikan rencana, strategi dan target untuk tahun 2020 dengan Tema “*Keep Moving Forward to be Stronger and Better*”.

Rapat Umum Pemegang Saham 2020



Bank Victoria Syariah mengadakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan RUPS Luar Biasa di Kantor Pusat PT. Bank Victoria Syariah yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Pemegang Saham Pengendali Bank Victoria Syariah, Kepala Divisi, serta Komite Audit dan Pemantau Risiko.

Daftar Isi

BAB 1

Makna Tema	5
Kesinambungan Tema	6
Kilas Kinerja 2020	7
Peristiwa Penting	8
Daftar Isi	9

BAB 2

Profil Perusahaan

Sejarah Singkat Perusahaan	13
Visi, Misi, dan Nilai Budaya Perusahaan	14
Struktur Grup Perusahaan	15
Struktur Organisasi	17
Jejak Langkah	19
Jaringan Kantor	20
Ikhtisar Keuangan	21

BAB 3

Laporan Manajemen

Laporan Dewan Komisaris	25
Profil Dewan Komisaris	29
Laporan Direksi	33
Profil Direksi	37
Laporan Dewan Pengawas Syariah	41
Profil Dewan Pengawas Syariah	45

BAB 4

Analisis dan Pembahasan

Tinjauan Industri	49
Tinjauan Bisnis	51
Tresuri	55
Sumber Daya Insani	57
Teknologi Informasi	59
Operasional	61
Tinjauan Keuangan	63
Profil Pejabat Eksekutif	69
Profil Komite-Komite	74

BAB 5

Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan	77
Komitmen Dalam Tata Kelola Perusahaan	77
Kerangka Kerja Dalam Tata Kelola Perusahaan	78
APU-PPT dan Prinsip Pengenalan Nasabah	78
Rapat Umum Pemegang Saham	79
Dewan Komisaris	80
Komite-komite Dibawah Dewan Komisaris	82
Direksi	86
Komite Eksekutif Direksi	88
Dewan Pengawas Syariah	90
Penerapan Fungsi Kepatuhan	92
Fungsi Audit Internal atau SKAI	93
Penyimpangan dan Fraud Internal	95
Audit Eksternal	95
Kerangka Manajemen Risiko	95
Penerapan Manajemen Risiko	96
Pengendalian Internal	97
Permasalahan Hukum	97
Nilai-Nilai Budaya Perusahaan	98
Transaksi dengan Benturan Kepentingan	98
Kode Etik	98
Perlindungan Nasabah	98
Keterbukaan Informasi	99
Penilaian GCG Secara Self Assessment	100
Laporan Self-Assessment ManRisk Tahun 2020	101

BAB 6

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	115
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif	117
Laporan Perubahan Ekuitas	118
Laporan Arus Kas	119
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	121
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	122
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	123
Catatan Atas Laporan Keuangan	124

BAB 2 - Profil Perusahaan

Sejarah Singkat Perusahaan

Visi, Misi, dan Nilai Budaya Perusahaan

Struktur Grup Perusahaan

Struktur Organisasi

Jejak Langkah

Jaringan Kantor

Ikhtisar Keuangan





Sejarah Singkat Perusahaan

PT Bank Victoria Syariah yang sebelumnya adalah PT. Bank Swaguna sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohaini SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010, Tambahan Nomor 31425.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut pada pasal 10 ayat 3 dan telah diterima serta dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU- AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah telah mendapatkan izin dari oleh Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham PT Bank Victoria International Tbk pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99,99%.

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International, Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah. Bank Victoria Syariah terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Pada akhir tahun 2020, Bank Victoria Syariah mengelola aset sebesar Rp.2,30 Triliun dengan mengoperasikan 5 (lima) kantor Cabang yaitu KCU-Tomang, Bekasi, Bandung, Cirebon, dan Solo dan 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu yaitu Tangerang. Pengurangan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu di tahun 2020 mengikuti perkembangan usaha pelayanan perbankan yang mengedepankan pelayanan perbankan berbasis teknologi.

Dalam memberikan pelayanan keuangan Bank Victoria Syariah menetapkan visi dan misi sebagai bentuk jaminan konsistensinya agar menjadi lembaga keuangan yang terpercaya dan dipilih untuk memberikan solusi keuangan di masyarakat

Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan

Visi dan Misi Bank Victoria Syariah telah ditetapkan sebagai landasan bagi seluruh insani Bank Victoria Syariah untuk mencapai tujuan bersama. Visi menjadi pegangan untuk mentransformasikan diri menjadi salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia.

VISI Bank Victoria Syariah adalah:

“Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Adil dan Peduli Lingkungan”

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi Bank Victoria Syariah dijabarkan sebagai berikut :

Nasabah

Memenuhi kebutuhan dan layanan terbaik kepada nasabah dan menjadi partner bisnis yang amanah dan memberikan solusi yang bernilai tambah.

Karyawan

Mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional dan memiliki nilai-nilai akhlak yang baik yang memahami bahwa tanah dan kekayaan adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai umat manusia bertanggung jawab untuk mengelolanya seperti yang ditasbihkannya.

Pemegang Saham

Menjalankan operasional perbankan syariah yang efisien, amanah dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga menghasilkan nilai tambah.

Komunitas

Peduli dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, sebagai bukti bahwa Bank Victoria Syariah mendukung keuangan yang berkelanjutan.

Regulator

Melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara *prudent* dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan efektif.

Untuk lebih mendukung pencapaian Visi dan penerapan Misi dalam aktivitas operasional Perusahaan, maka Bank Victoria Syariah akan melakukan redefinisi terhadap nilai-nilai perusahaan yang lebih komprehensif, saat ini Bank Victoria Syariah memiliki nilai-nilai budaya perusahaan sebagai dasar budaya perusahaan yang dapat menjadi acuan utama bagi seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah.

Adapun Nilai-nilai Budaya Perusahaan yang disepakati dan dianut oleh seluruh Karyawan Bank Victoria Syariah dapat disingkat **H-E-B-A-T**. Penjabaran dari **HEBAT** tersebut adalah sebagai berikut :

Honest

Kejujuran menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terlebih perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan seperti Bank. Seluruh Sumber Daya Insani (SDI) Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi sehingga dapat dipercaya dalam mengemban amanah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Energic

Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dinamis saat ini, semangat dan jiwa muda dalam setiap kepribadian karyawan Bank Victoria Syariah menjadi keharusan agar bank dapat terus berkembang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Brilliant

Dalam mengembangkan bisnis secara berkesinambungan, setiap individu maupun team harus memiliki kemampuan yang *brilliant* untuk melihat setiap peluang maupun tantangan yang ada sehingga dapat menjaga pertumbuhan bisnis Bank Victoria Syariah secara berkesinambungan (*sustainable growth*).

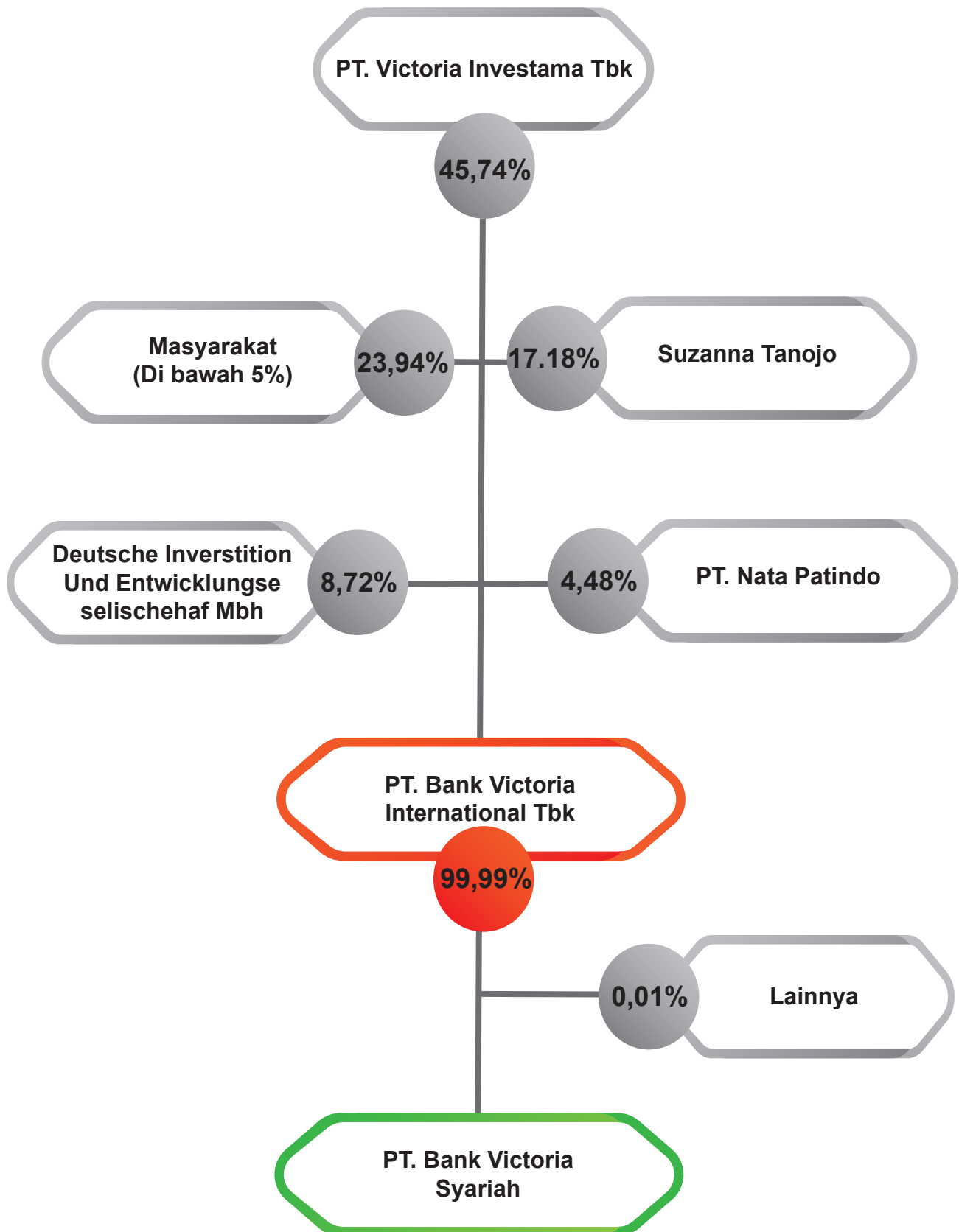
Accurate

Sebagai lembaga keuangan yang merupakan kepercayaan masyarakat, keakurasian data terkait dengan penyebaran informasi baik formal maupun informal sudah menjadi suatu keharusan dari bank untuk dipenuhi.

Trust

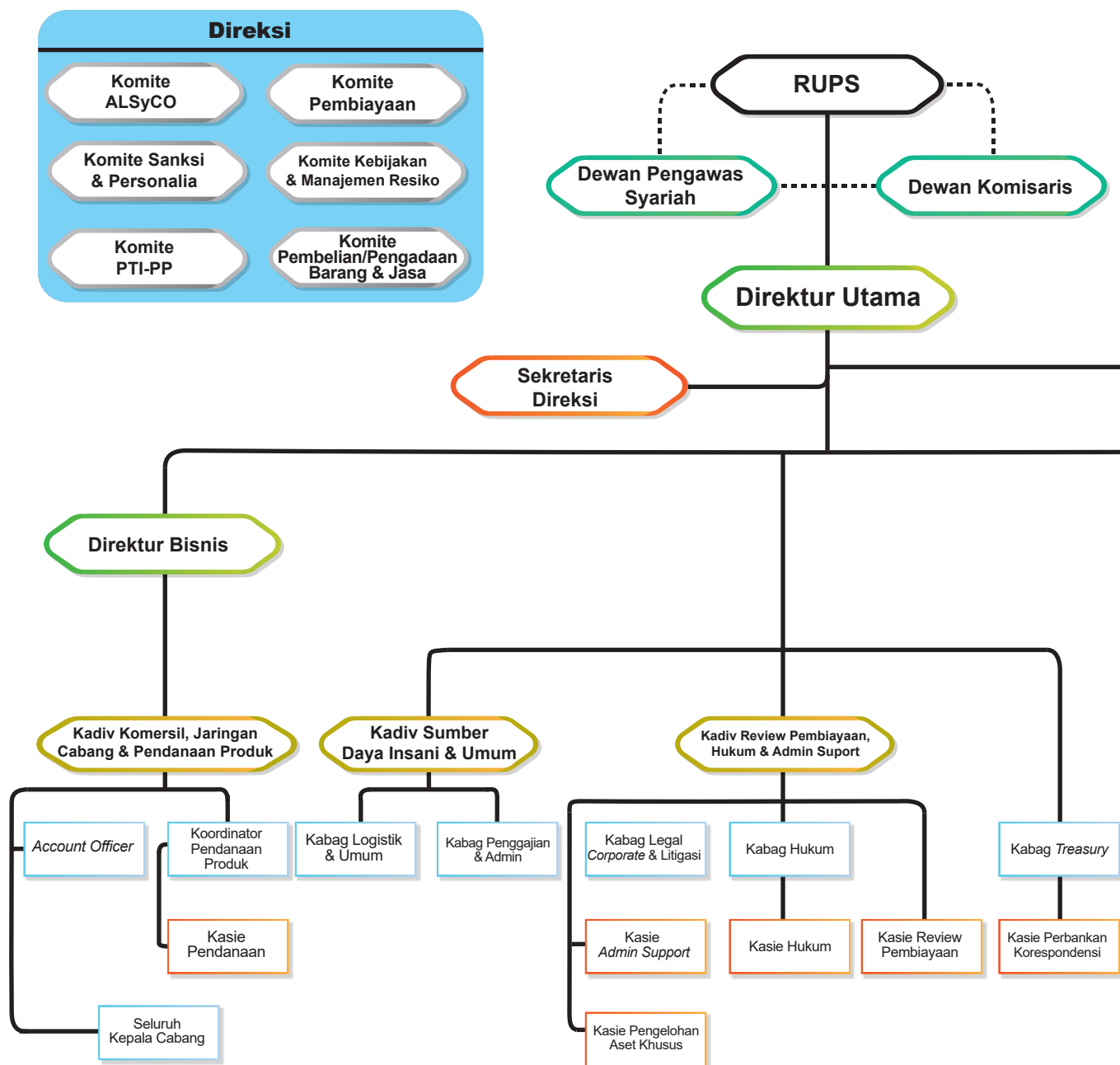
Bank merupakan lembaga kepercayaan bagi para nasabah untuk menyimpan dana, untuk itu unsur *trust* (kepercayaan) wajib menjadi nilai budaya yang harus melekat pada seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah.

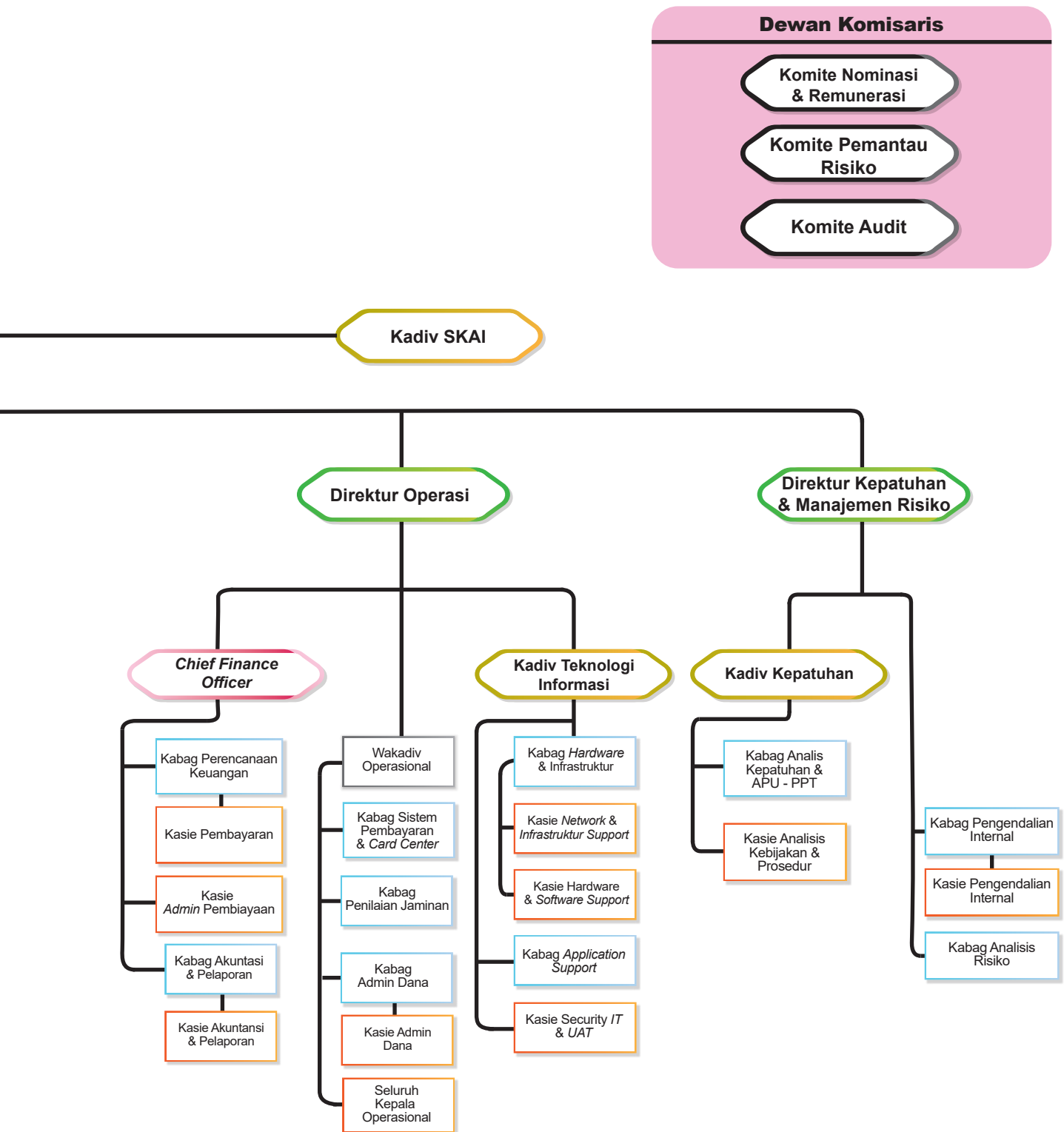
Struktur Grup Perusahaan



HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN

Struktur Organisasi





Jejak Langkah

PT. Bank Swaguna didirikan di Cirebon pada tahun 1966, Bank ini memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 7 Januari 1967.

1966-1977

2007

PT. Bank Victoria mengakuisisi 99.99% saham Bank Swaguna dan mendapat persetujuan BI tanggal 3 Agustus 2007. Modal disetor Bank menjadi Rp. 90 Miliar pada bulan September 2007.

Pada bulan Maret 2008, Pemegang Saham PT. Bank Victoria International Tbk kembali memperkuat modal Rp. 110 Miliar.

2008

2010

Bank Swaguna dikonversi menjadi PT. Bank Victoria Syariah dan Mendapatkan izin operasional sebagai Bank Syariah berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP-GBI/DpG/2010, Bank beroperasi penuh dengan sistem Syariah pada tanggal 1 April 2010.

Entry Point to Sharia Retail Bank Menambah jaringan kantor dan memperluas pangsa pasar.

2011-2012

2013

Memperkokoh pondasi melalui pengembangan produk dan segmen bisnis baru.

Penambahan setoran modal Rp. 50 Miliar sehingga modal menjadi Rp. 160 Miliar.

2014

2015

Penataan strategi dan penguatan GCG.

Tahun transformasi Penambahan setoran modal Rp. 50 Miliar sehingga Modal menjadi Rp. 210 Miliar

2016

2017

Penambahan setoran modal Rp. 100 Miliar sehingga Modal menjadi Rp.310 Miliar

Perbaikan Kualitas Aset Produktif dan Profitabilitas

2018

2019

Penambahan Setoran Modal Rp. 50 Miliar sehingga Modal menjadi Rp. 360 Miliar

Jaringan Kantor

Kantor Pusat & Pusat Operasional

Gedung Graha BIP Lantai 5

Jl. Gatot Subroto Kav. 23

Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

Telp. 021 - 5600467, 021 - 5225285 (Hunting)

Fax. 021 - 5664247

Website: <https://bankvictoriasyariah.co.id/>



Kantor Cabang

Kantor Cabang Utama Tomang

Gedung The Victoria Lt. 1

Jl. Tomang Raya Kav.35-37

Jakarta Barat 11440

Telp. (021) 5600468

Fax (021) 29200630

Kantor Cabang Bekasi

Bekasi Square No. 63,

Jl. A. Yani, Pekayon, Bekasi

Telp. 021-82434874-75

Fax. 021-82434876

Kantor Cabang Cirebon

Cirebon Super Block, Blok GS/5,

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 26, Cirebon, Jawa Barat

Telp. 0231-8291051-52

Fax. 0231-8291053

Kantor Cabang Pembantu

KCP Tangerang

Modern Land Blok AR/23,

Jl. Jend. Sudirman, Cikokol, Tangerang, Banten

Telp. 021-55747698

Fax. 021-55747699

Kantor Cabang Bandung

Jl. Gatot Soebroto No. 3, Bandung, Jawa Barat

Telp. 022-87340303

Fax. 022-87340311

Kantor Cabang Solo

Honggowongso Square Blok A/7,

Jl. Honggowongso, Solo, Jawa Tengah

Telp. 0271-660832

Fax. 0271-660932

Ikhtisar Keuangan

NERACA

(Dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Total Aset	1.625.183	2.003.114	2.126.019	2.262.451	2.296.027
Efek-efek Yang Dimiliki	237.032	320.282	409.679	712.304	712.683
Pembiayaan Yang Diberikan	1.212.690	1.262.926	1.234.571	1.231.614	1.166.972
Dana Wadiah dan Syirkah Temporer	1.235.931	1.532.758	1.599.141	1.710.985	1.576.027
a. Giro Wadiah	37.132	37.471	41.422	23.295	251.345
b. Giro Mudharabah	119	0	4.866	335	14
c. Tabungan Mudharabah	40.157	43.766	54.066	49.927	41.214
d. Deposito Mudharabah Bank & Non Bank	1.158.523	1.451.522	1.498.788	1.637.428	1.283.454
Ekuitas	194.330	299.393	291.249	354.244	379.557

LABA (RUGI)

(Dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Pengelolaan Dana	122.263	153.695	169.987	168.019	148.750
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(84.096)	(101.060)	(109.262)	(118.916)	(112.244)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	38.167	52.635	60.725	49.103	36.506
Pendapatan Operasional Lainnya	969	3.332	1.688	4.477	15.970
Beban Operasional	(77.754)	(49.712)	(56.195)	(53.232)	(48.860)
Laba Operasional	(38.618)	6.255	6.218	348	3.616
Laba (Rugi) Non Operasional	10.735	(156)	118	721	(204)
Laba Sebelum Pajak	(27.883)	6.099	6.336	1.069	3.412
Pajak Tangguhan	9.410	(1.505)	(1.362)	(156)	(3.627)
Laba Setelah Pajak Tangguhan	(18.473)	4.594	4.974	913	(215)

RASIO KEUANGAN

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	15,98%	19,29%	22,07%	19,44%	24,60%
Rasio Tingkat Pengembalian Aset (ROA)	-2,19%	0,36%	0,32%	0,05%	0,16%
Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)	-17,45%	2,01%	2,02%	0,29%	1,51%
Rasio Biaya terhadap Pendapatan (BOPO)	131,34%	96,02%	96,38%	99,80%	97,80%
Rasio Pembiayaan Bermasalah Kotor (NPF Gross)	7,21%	4,59%	4,00%	3,94%	4,73%
Rasio Pembiayaan Bermasalah Bersih (NPF Netto)	4,35%	4,08%	3,46%	2,64%	2,96%
Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR)	100,67%	83,59%	82,78%	80,52%	74,05%

HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB 3 - Laporan Manajemen

Laporan Dewan Komisaris

Profil Dewan Komisaris

Laporan Direksi

Profil Direksi

Laporan Dewan Pengawas Syariah

Profil Dewan Pengawas Syariah





Laporan Dewan Komisaris



Achmad Friscantono
Komisaris Utama

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbi 'alamin*, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah – Nya, sehingga dapat menjalankan segala aktivitas dalam rangka mencari ridha-Nya dan dapat melalui tahun 2020 dengan baik.

Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati, Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya atas kebijakan di dalam pengelolaan aktivitas usaha Bank.

Dewan Komisaris menghargai dan percaya bahwa dengan kerjasama dari segenap Sumber Daya Insani (SDI) serta dengan senantiasa memohon izin dan ridho Allah SWT, Bank dapat melewati tantangan yang ada dengan mengutamakan pertumbuhan yang berkualitas, menjaga posisi likuiditas dan permodalan yang memadai, sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang cukup baik.

Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi dan melalui mekanisme pelaksanaan tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Landasan dasar pengawasan yang digunakan Dewan Komisaris adalah Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan tersebut fokus pada tanggung jawab Direksi dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menjalankan fungsinya dengan baik dan menurut hemat kami, Direksi telah menerapkan inisiatif-inisiatif yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas dan kualitas aset. Kami menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan Direksi selaras dengan pandangan Dewan Komisaris.

Perkembangan Usaha dan Kinerja Keuangan

Secara umum kinerja Bank tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun 2019. Pencapaian tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Total aset sebesar Rp. 2.296 Miliar, meningkat 1,5%.
2. Realisasi pembiayaan sebesar Rp.1.167 Miliar, turun 5,4%.
3. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.576 Miliar, meningkat 3,1%.
4. Perolehan Laba tahun berjalan sebelum pajak sebesar Rp. 3,4 Miliar, naik 191,8%.

Peningkatan laba diperoleh dari penyaluran Dana, tingkat imbal hasil, pendapatan Tresuri dan penerimaan *recovery write off* serta efisiensi biaya-biaya operasional. Dalam hal pembiayaan, Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik, pencairan pembiayaan baru selama tahun 2020 nilainya relatif masih lebih kecil dibandingkan dengan pelunasan pembiayaan yang terjadi selama periode yang sama. Untuk menghadapi kondisi pandemi seperti yang terjadi saat ini, Bank melakukan relaksasi pembiayaan sesuai dengan POJK No.48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas POJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020, yakni dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan disamping *me-replace* pembiayaan yang lunas, serta maintain existing nasabah.

Namun dari kesemuanya dan yang patut dibanggakan, Bank dapat mempertahankan kecukupan modalnya pada rasio KPMM sebesar 24,60%, jauh diatas ketentuan minimal dan membukukan laba yang cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penerapan *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris senantiasa memantau terselenggaranya prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* - GCG) pada seluruh jenjang organisasi dengan mengevaluasi hasil *self assessment* GCG dan mendorong penyempurnaan pelaksanaan GCG yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional dan kewajaran menjadi pedoman utama dalam pengelolaan bisnis bank.

Kami percaya bahwa penerapan praktek-praktek GCG yang baik merupakan aset penting dalam menciptakan budaya organisasi yang kokoh dan unggul guna meraih pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta mampu memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Ditahun 2020 terdapat perubahan anggota Dewan Komisaris dimana Bapak Djoko Nugroho mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen per 26 Juni 2020 dan kami mengucapkan terima kasih atas kontribusinya. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Retno Dwiyantri W selaku pengganti Komisaris Independen.

Untuk mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran organisasi terus berupaya membangun dan menyempurnakan berbagai kebijakan, sistem dan perangkat yang ada. Secara berkala Bank melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap pelaksanaan GCG yang menyangkut 11 aspek penilaian yang mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi perbankan syariah dan sesuai dengan hasil *self assessment* Bank terhadap pelaksanaan GCG sepanjang tahun 2020 tercatat berpredikat "Baik".

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu dengan 3 (tiga) komite, yakni Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Audit membantu melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), serta efektivitas pemeriksaan oleh internal dan auditor eksternal. Selama tahun 2020 Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 16 kali dan menerbitkan 17 Memo Internal pengawasan.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan penyampaian arahan kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2020 Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 9 kali rapat dan menerbitkan 8 Memo Internal pengawasan.

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi, dimana selama tahun 2020 Komite ini mengadakan 8 kali rapat dan mengeluarkan rekomendasi terkait dengan remunerasi dan nominasi.

Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ke 3 Komite tersebut telah berjalan dengan baik.

Komitmen Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melihat bahwa tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia masih akan berlanjut ditahun 2021 dengan masih belum adanya tanda-tanda pemulihan perekonomian global. Pelemahan kondisi ekonomi global tahun 2020 diprediksi masih akan berlanjut pada tahun 2021 dengan adanya pandemi penyakit akibat virus COVID-19 yang mulai merebak di awal tahun 2020 yang mempengaruhi perekonomian secara global, akan berdampak juga pada ekonomi Indonesia di tahun 2021 yang diperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 4,8% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu di kisaran minus 2%.

Dalam usaha menyelaraskan perkembangan tersebut, Dewan Komisaris akan terus menjaga dan berusaha untuk meningkatkan aktivitasnya sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sebagai berikut :

1. Konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

2. Konsisten untuk tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengelola manajemen risiko sesuai *risk appetite*, serta pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.

3. Meningkatkan peran dalam rangka mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dan memastikan bahwa bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Memastikan bahwa telah dilakukan tindak lanjut atas hasil temuan dan rekomendasi audit internal, audit eksternal dan *regulator*.

Akhir kata, marilah kita tingkatkan kerja sama dan sinergi yang telah terjalin baik selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita semua agar Bank semakin maju dan berkembang di tahun-tahun mendatang. *Aamiin Yaa Robbal Alamiin.*

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dewan Komisaris

Achmad Friscantono

Komisaris Utama/Independen

HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN

Profil Dewan Komisaris





Achmad Friscantono
Komisaris Utama

WNI, lahir di San Francisco 7 November 1961.

Bachelor of Science Degree in Agricultural Economics (Business & Industry) University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA, Desember 1987.

Sejak 10 April 2019 :

Sebagai Komisaris Utama PT. Bank Victoria Syariah

Januari 2017 – Sekarang :

PERBANAS (Perhimpunan Bank Nasional) sebagai *Executive Director*.

Januari 2014 – Desember 2016 :

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. sebagai *Treasury & Financial Institution Head (Executive Vice President)*

Oktober 2008 – Januari 2014 :

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. sebagai *Treasury, Financial Institution & Consumer Finance Head (Senior Vice President)*

September 2006 – Oktober 2008 :

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. sebagai *Treasury Head (Vice President)*

April 2006 – Agustus 2006 :

PT. Thompson Reuters Indonesia sebagai *Customer Account Relationship (Manager)*

Agustus 2004 – Maret 2006 :

Market & Liquidity Risks Division, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. sebagai *Liquidity Risk Head (Senior Assistant Vice President)*

Agustus 2000 – Agustus 2004 :

Credit & Market Risk Management Division, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. sebagai *Deputy Division Head of Credit & Market Risk Management (Assistant Vice President)*

Oktober 1999 – Agustus 2000 :

Seconded at Merger Project, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. sebagai *Team Leader of Treasury/ALM/International*

April 1996 – Agustus 2000 :

Treasury & International Division, PT. Bank Rama Tbk. sebagai *Treasury Head (Senior Manager)*

Februari 1994 – April 1996 :

Treasury Division, PT. Bank Namura Internusa sebagai *Chief Dealer (Manager)*.

Mei 1993 – Februari 1994 :

Treasury Division, Bank Internasional Indonesia sebagai *Senior Dealer (Senior Assistant Manager)*.

Oktober 1990 – Mei 1993 :

Treasury Division, PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. sebagai *Interbank FX Dealer (Assistant Manager)*.

Februari 1990 – Oktober 1990 :

PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. mengikuti *Management Development Program XII*.



Sari Idayanti
Komisaris

WNI, lahir di Jakarta 21 Desember 1966
Sarjana Ekonomi Universitas Jayabaya Jakarta, tahun 1990

- Sejak September 2016** : Sebagai Komisaris PT. Bank Victoria Syariah
- April 2013 - September 201** : PT. Bank Victoria Syariah sebagai Direktur Operasional
- April 2010 - Maret 2013** : PT. Bank Victoria Syariah sebagai Direktur Utama
- Mei 2009 - Maret 2010** : PT. Bank Swaguna sebagai Direktur Utama
- November 2007 - April 2009** : PT. Bank Swaguna sebagai Direktur Operasional
- Agustus 1995 - Oktober 2007** : PT. Bank Victoria International Tbk. sebagai Kepala Divisi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan
- 1989 - 1995** : PT. Bank Bira dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Akunting & Administrasi Keuangan



Retno Dwijanti Widaningsih
Komisaris

WNI, lahir di Jakarta tahun 1959
SLTA Tarikanita 1979

- 1980 - 1982** : Bank Dagang Negara Hotel Borobudur Branch Jakarta
- 1982 - 2006** : Deutsche Bank AG, sebagai *Head of Group Audit* dari tahun 2001 sampai 2006
- Sejak 2013** : PT. Bank Victoria Syariah sebagai anggota Komite Audit di Bank Victoria Syariah

HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN

Laporan Direksi



Sugiharto
Direktur Utama

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas ridhonya Bank Victoria Syariah mampu melewati berbagai tantangan ke depan dan menunjukkan hasil yang cukup baik di tengah tekanan ekonomi yang masih terdampak Pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan ini, Direksi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai. Meskipun pada saat ini pencapaian kita cukup baik, namun kita tidak boleh lengah dan terus berinovasi.

Krisis yang kita alami saat ini adalah krisis yang terberat apabila dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya, namun demikian Bank Victoria Syariah telah melewati tahun terberat dengan pertumbuhan positif berkat strategi yang fokus pada penyelamatan pembiayaan dengan tetap meningkatkan rentabilitas bank.

Perkenankanlah saya mewakili Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Bank dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2020 melalui laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*Member of Moore Stephens International Limited*) dengan opini Wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Selanjutnya ijin saya untuk menyampaikan Laporan Tahunan Bank Victoria Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Kondisi Makro Ekonomi dan Perbankan Syariah

Krisis akibat pandemi Covid-19 yang kita hadapi saat ini berbeda dengan krisis keuangan yang telah terjadi sebelumnya. Krisis kali ini tidak hanya berdampak secara langsung pada kondisi perekonomian, namun juga pada aspek kesehatan dan sosial seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan di hampir seluruh negara di dunia untuk menahan penyebaran Covid-19 telah merubah tatanan sosial masyarakat dan memberikan tekanan yang luar biasa bagi perekonomian Dunia dan Indonesia.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perlambatan perekonomian global. *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 akan berkontraksi sebesar 3,5% seiring dengan tertekannya aktivitas ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan China.

Sejalan dengan kondisi global, perekonomian Indonesia tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Tekanan pandemi Covid-19 mulai ditunjukkan pada Triwulan II-2020 dimana pertumbuhan ekonomi berkontraksi 5,32%. Kekhawatiran dan ketidakpastian akibat pandemi juga menyebabkan tren larinya modal dari pasar saham dan obligasi, yang kemudian menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Pada akhir 2020, tercatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berkontraksi 5,09%.

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan serangkaian kebijakan makroprudensial di sepanjang tahun 2020 untuk menjaga stabilitas perekonomian makro.

Surplus perdagangan Indonesia dan tingkat inflasi yang rendah telah mendukung kestabilan dari nilai tukar Rupiah. Seiring hal itu, guna menstimulasi ekonomi dalam negeri, BI memangkas suku bunga acuan 7-Days *Reverse Repo* sebesar 125 bps menjadi 3,75%. Pada saat yang sama, BI mengambil peran aktif dalam menjaga fluktuasi pasar, melalui intervensi strategis di pasar valas spot dan *forward*. Dalam rangka menjaga tingkat likuiditas, BI menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 250 bps menjadi 3,0% dan GWM Valas sebesar 400 bps menjadi 4,0%, serta menjalankan *Quantitative Easing* melalui pembelian obligasi pemerintah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sementara waktu memberikan kelonggaran atas peraturan restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi. Di saat yang sama, stimulus fiskal yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun, melalui bantuan sosial, subsidi dan insentif pajak, telah mendorong pemulihan ekonomi baik di sisi permintaan maupun penawaran. Distribusi dana PEN yang dilakukan melalui sektor perbankan juga telah mendukung Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) yang terkena dampak pandemi. Penyaluran dana PEN ini telah berdampak positif bagi perekonomian nasional, namun di sisi lain berpengaruh pada tingkat pinjaman yang lebih rendah di sektor perbankan akibat adanya pelunasan fasilitas oleh debitur.

Selain itu, OJK juga melakukan relaksasi kebijakan terkait aturan Basel III, kewajiban dana pendidikan, dan kewajiban *mark-to-market* atas surat berharga yang dimiliki oleh perbankan. Berbagai respon proaktif dari para pembuat kebijakan telah mendukung ketahanan perekonomian Indonesia di tengah tantangan akibat pandemi, yang menjadi awal dari proses pemulihan ekonomi sebelum akhir tahun 2020.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, industri perbankan baik lokal maupun global semakin mengarahkan strateginya pada pengembangan digitalisasi, dan tahun 2020 menjadi tahun pembuktian atas keberhasilan strategi ini. Akibat pandemi yang terjadi di seluruh dunia, semakin banyak orang dipaksa untuk tinggal di rumah dan secara drastis telah mengubah perilaku sosial, bisnis maupun perilaku dalam melakukan transaksi perbankan. Bank-bank yang telah memiliki ekosistem digital yang kuat berada dalam posisi yang lebih siap untuk melayani kebutuhan nasabahnya atas solusi perbankan digital.

Strategi dan Kinerja Tahun 2020

Para pelaku ekonomi, termasuk Bank Victoria Syariah, tidak dapat sepenuhnya memprediksi tantangan dan tekanan yang terjadi selama tahun 2020. Penyebaran pandemi COVID-19 yang diikuti oleh pembatasan aktivitas masyarakat berskala besar telah memberi tekanan yang begitu berat bagi lingkungan bisnis, termasuk industri perbankan.

Direksi secara cermat mengupayakan pengambilan berbagai keputusan, menjalankan ragam inisiatif dan langkah-langkah strategis dengan selalu memperhatikan penerapan manajemen risiko yang prudent dan tata kelola perusahaan yang baik. Sejalan hal tersebut, Bank mampu menjaga tingkat kepercayaan yang tinggi dari para pemangku kepentingan, sebagaimana tercermin dari berbagai apresiasi yang diterima dari regulator, investor dan berbagai lembaga independen lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Bank Victoria Syariah membukukan Total Aset sebesar Rp2,29 triliun atau meningkat 1,40% dibandingkan posisi 31 Desember 2019. Pertumbuhan total aset disumbang oleh peningkatan penempatan pada bank lain sebesar Rp215 miliar sedangkan posisi surat berharga cenderung stabil dikisaran Rp714,88 miliar.

Untuk posisi pembiayaan, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 64,64 miliar atau sekitar 5,25% dibanding tahun 2019. Dana pihak ketiga pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3,04% atau Rp 46,54 miliar, hal ini tentunya merupakan salah satu wujud kepercayaan masyarakat terhadap Bank Victoria Syariah sehingga posisi dana pihak ketiga menjadi Rp 1,57 triliun.

Posisi rentabilitas bank juga mengalami peningkatan sebesar 18,7% dari Rp 1,07 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 3,4 miliar di tahun 2020. Hal ini tentunya menjadi modal kepercayaan diri dalam meningkatkan pendapatan untuk masa yang akan datang.

Sejalan kebijakan perusahaan, manajemen memiliki sejumlah strategi utama sebagai berikut:

1. Memaksimalkan rentabilitas dengan menjaga pertumbuhan aset berkualitas yang ramah dan peduli lingkungan dengan menjaga kualitas asset secara berkesinambungan, meningkatkan pertumbuhan bisnis dengan mendukung kegiatan peduli lingkungan, penanganan *management account* yang konsisten serta peningkatan proses kerja dan kompetensi karyawan.
2. Mengembangkan Dana Pihak Ketiga secara hati-hati dan sesuai prinsip-prinsip syariah dengan mempertimbangkan keseimbangan likuiditas.
3. Melakukan transformasi budaya kerja perusahaan yang berkelanjutan melalui pengembangan budaya kerja dalam rangka membangun etos kerja yang berorientasi kepada hasil, jujur, amanah, bertanggung jawab serta berintegritas yang baik dengan tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan.
4. Meningkatkan produktifitas, efisiensi dan sinergi dengan grup, yaitu dengan cara meningkatkan bisnis dan pelayanan baik dalam pengembangan internal maupun melalui sinergi dengan beberapa perusahaan yang tergabung dalam Victoria Grup.
5. Mendayagunakan teknologi sistem informasi secara optimal melalui *re-engineering process* baik dalam aspek bisnis maupun aspek kegiatan operasional Bank dengan memanfaatkan pengembangan teknologi yang dilakukan.

Sumber Daya Insani

Sumber Daya Insani (SDI) yang berkualitas dan andal akan mampu memberikan kontribusi penting terhadap upaya pencapaian visi dan misi Bank Victoria Syariah. Karena itulah, Bank Victoria Syariah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDI.

Tahun 2020, pengelolaan SDI masih tetap menjadi fokus utama Perseroan. Program pelatihan dan pendidikan pegawai terus ditingkatkan kualitasnya. Tahun 2020, strategi pengembangan SDI diarahkan pada *capability development* di seluruh lini organisasi. Fokus utamanya adalah pengembangan desain karier dan *employee development* berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai, salah satunya adalah melakukan penyusunan program pengembangan bagi masing-masing pegawai (*Individual Development Plan/IDP*).

Selain itu, pada tahun 2020, Bank Victoria Syariah juga berupaya untuk menyesuaikan agar standar remunerasi

memiliki posisi yang lebih baik pada market. Pemberian tunjangan dan fasilitas khusus pada level pimpinan atau pun jabatan yang bersifat specialist akan dilakukan dengan mempertimbangkan pada kondisi internal Perseroan dan menyesuaikan dengan kondisi pasar/industri. Sementara itu, remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dibahas melalui Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya diputus oleh RUPS.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Pemangku Kepentingan yang telah memberikan dukungan penuh kepada Bank Victoria Syariah dapat melewati seluruh tantangan dan menutup tahun 2020 dengan kinerja yang baik dan berkelanjutan. Kepada seluruh Nasabah, Direksi menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya untuk tetap tumbuh berkembang bersama Bank Victoria Syariah disegala situasi, dan merupakan kebanggaan bagi kami untuk dapat melayani dengan sepenuh hati.

Kepada pemegang saham kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Perusahaan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan nasihat yang telah diberikan kepada Direksi, sehingga pengelolaan bisnis Bank Victoria Syariah dapat berjalan dengan efektif sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Direksi juga mengucapkan rasa bangga serta terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dan pekerja atas dedikasi yang tinggi untuk tetap maju bersama sehingga dapat mencapai kinerja tahun 2020 yang baik. Semoga kinerja tahun 2021 ini dapat terus dipertahankan dan semakin kuat di tahun berikutnya. Kedepannya, Bank Victoria Syariah terus berkomitmen untuk tumbuh berkelanjutan untuk memberikan nilai bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 30 April 2021
PT Bank Victoria Syariah

SUGIHARTO
Direktur Utama

Profil Direksi





Sugiharto
Direktur Utama

WNI, lahir di Solo 13 Januari 1955

Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1979

Master Of Business Administration (MBA), The University Of Texas - Austin, USA tahun 1996

Sejak 10 April 2019

: Sebagai Direktur Utama PT Bank Victoria Syariah

Juni 2015 - 2019

: PT. Bank Victoria Syariah sebagai Komisaris Utama

2007 - 2011

: President of Indonesia Foreign Exchange Dealer Association (ACII/Forexindo) dua periode tahun 2007-2011

2010 - 2014

: Bank Mega dengan berbagai jabatan yaitu *Managing Director Treasury and International Banking, Treasury and International Banking Advisor.*

2009 - 2010

: *President Director* Dana Pensiun Bank Mandiri

1999 - 2009

: Bank Mandiri, dengan berbagai jabatan yaitu *Vice President Treasury and Capital Market, Vice President Of Financial Institution and Overseas Network, Executive Vice President/Head Of Treasury Group*

1981 - 1999

: Bank Exim, dengan berbagai jabatan yaitu *Credit Analyst, Treasury Manager (New York), Head of Money Market and Foreign Exchange Trading, Head of Assets and Liabilities Management Group, Head of Trade and Financial Services Division (Singapore), Head of Treasury & Capital Market,*



Andy Sundoro
Direktur Bisnis

WNI, lahir di Yogyakarta 11 Maret 1968

Sarjana Teknik Elektro, Universitas Trisakti Jakarta, tahun 1990

Master of Business Administration, Colorado State University - USA, tahun 1994

Sejak Juni 2015

: Sebagai Direktur PT Bank Victoria Syariah

Juli 2006 - 2015

: PT Bank Victoria International, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu Kepala Divisi *Commercial Banking*, Kepala Divisi *Corporate Banking*, dan Kepala *Divisi Credit Analyst*

2005 - 2006

: PT Bank DBS Indonesia sebagai *Relationship Manager Enterprise Banking*

1997 - 2005

: PT Bank Panin Tbk dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Manager Corporate Banking*

1994 - 1997

: PT Bank LTCB Central Asia sebagai *Account Officer*

1989

: PT Suwantara Indonesia sebagai *Engineering Sales*



Deddy Effendi Ridwan
Direktur Operasional

WNI, lahir di Pekanbaru 19 November 1958.

Sarjana Ekonomi - Akuntansi, Universitas Indonesia, tahun 1986

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Trisakti, tahun 2015

- 8 September 2016** : Sebagai Direktur Bank Victoria Syariah
- 2015 - 2016** : PT. Bank BTN, Tbk sebagai Anggota Komite Audit
- 2010 - 2013** : PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai *Senior Vice President – Finance Head*
- 2008 - 2010** : Niaga Management Citra - Komisaris
- 1986 - 2015** : PT. Bank Niaga, Tbk dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu *Internal Audit Head, Operation Head, System & Operation Group Head, Information Security Group Head, Finance & Accounting Group Head*



Nurani Raswindriati
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

WNI, lahir di Malang 1 Juni 1962

Sarjana Ekonomi - Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bandung, tahun 1986

Magister Manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tahun 2005

- 8 September 2016** : Direktur Kepatuhan Bank Victoria Syariah
- 2015 - 2016** : PT. Bank BTN, Tbk dan PT. Bank Resona Perdania sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko
- 2012 - 2015** : Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan berbagai jabatan yaitu *Senior Bank Examiner, Director Banking Risk Analysis Group* dan *Senior Advisor* untuk *Policy and Standard Operating Procedure Development*.
- 2007 - 2012** : PT. Bank Permata sebagai *Credit Risk Control Head, Risk Management Group*.
- 2002 - 2005** : PT Niaga International *Factors* (anak perusahaan dari Bank Niaga) *Director Finance and Operation*
- 1986 - 2007** : PT. Bank Niaga, Tbk dengan berbagai jabatan yaitu *Credit Auditor, Credit Audit policy, Credit and Support Head* untuk Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, *Agency Unit Head di Corporate Banking Group, Credit Compliance and Support Head, Commercial Banking Audit Head* dan *Special Asset and Recovery Head* untuk Wilayah Timur.

HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN

Laporan Dewan Pengawas Syariah



Prof DR. H. Hasanuddin AF. MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

*Bismillaahirrahmaanirrahiim Alhamdulillah Rabbil Aalamin,
Wa Shalatu Wa Salam Ala Nabiyyina Muhammad
Sallallahu Alaihi Wa Sallam, Wa Ala Aalihi Wa Shahbihi Wa
Sallam, Amma Ba'du.*

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan serta salam semoga tercurah untuk Baginda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga dan kerabatnya.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, perkenankan Kami selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Bank Victoria Syariah selama tahun 2020.

Pelaksanaan Tugas DPS

Melemahnya kondisi ekonomi dan bisnis akibat Pandemi Covid-19 di sepanjang tahun 2020 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap industri perbankan secara umum, termasuk Bank Victoria Syariah. Bank harus melakukan berbagai penyesuaian baik yang terkait operasional maupun terkait bisnis karena adanya pandemi ini.

Bank Victoria Syariah berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2020 memperlihatkan adanya fluktuasi baik pada sisi jumlah Aset, Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga serta hasil laba usaha di tahun berjalan dan DPS memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh jajaran Manajemen yang secara aktif dan responsif melakukan langkah penguatan Bank Victoria Syariah melalui perbaikan dan peningkatan *governance* yang baik. DPS juga telah melakukan *review* terhadap Kebijakan dan pengembangan layanan produk di Bank Victoria Syariah, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi atau pun opini syariah. Secara singkat, kegiatan yang dilakukan DPS sepanjang tahun 2020 dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank, dalam hal ini, DPS melakukan pemeriksaan kepatuhan syariah dan melakukan *review* rencana perubahan/pengembangan fitur produk/rencana usulan pengembangan produk/fitur.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru dan fitur produk Bank Victoria Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dalam mengawasi proses pengembangan produk baru dan fitur produk, DPS meminta terlebih dahulu data-data terkait dan mendiskusikannya dengan pejabat yang berwenang mengenai tujuan, konsep, akad, dan ketentuan internal atas rencana pengembangan produk baru;
3. Memastikan seluruh produk telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
4. Membuat laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.
5. Melakukan kajian pelayanan guna memastikan pelayanan kepada nasabah serta penjelasan produk melalui brosur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;

Saran dan Opini

DPS mengamanatkan kepada Manajemen Bank Victoria Syariah agar selalu istiqomah dalam menjalankan operasional bank dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu DPS juga berpesan agar Manajemen terus melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Insaninya atas pemahaman tentang perbankan syariah sehingga operasional bank dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2020, DPS menyampaikan bahwa secara umum kegiatan operasional Bank Victoria Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah; Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS.

Penutup

Pada kesempatan ini Dewan Pengawas Syariah juga senantiasa mengingatkan manajemen Bank agar tetap berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga segala hal yang telah kita lakukan untuk memajukan Bank Victoria Syariah diberikan keberkahan, serta kita semua selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta curahan keberkahan-Nya. Semoga kita selalu berada dalam taufik, hidayah, dan rahmat Allah untuk dapat mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak serta kepada Allah kita selalu berserah diri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dewan Pengawas Syariah

Prof DR. H. Hasanuddin AF. MA

HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN

Profil Dewan Pengawas Syariah





Prof. DR. H. Hasanuddin A.F. MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah

WNI, lahir di Majalengka, tahun 1945
Sarjana Syariah, IAIN Syarif Hidayatullah-Jakarta, tahun 1974
S2 (MA), IAIN Syarif Hidayatullah-Jakarta, tahun 1989
S3 (Doktor), IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1994

Sejak 26 Maret 2010 Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Victoria Syariah



Prof. DR. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah

WNI, lahir di Donggala-Sulawesi Tenggara, tahun 1945.
Sarjana Syariah (S1), Universitas Al-Khiraat Palu, tahun 1975.
S2 (MA), Universitas Al-Azhar (Cairo-Mesir), tahun 1981
S3 (Doktor), Universitas Al-Azhar (Cairo-Mesir), tahun 1984

Sejak 10 November 2011 Sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Victoria Syariah

BAB 4 - Analisis dan Pembahasan

Tinjauan Industri

Tinjauan Bisnis

Tresuri

Sumber Daya Insani

Teknologi Informasi

Operasional

Tinjauan Keuangan

Profil Pejabat Eksekutif

Profil Komite-Komite





Tinjauan Industri



Perekonomian Indonesia.

Perekonomian global semakin tertekan seiring dengan jumlah kasus COVID-19 yang masih terus bertambah. Hal ini berdampak pada terkontraksinya perekonomian baik secara global maupun di domestik akibat melemahnya permintaan dan kegiatan usaha. Pelemahan tersebut terefleksi pada lambatnya penyaluran pembiayaan di tengah DPK yang tumbuh lebih tinggi. Meski demikian, ketahanan permodalan perbankan masih solid disertai kondisi likuiditas yang memadai meskipun terdapat penurunan rentabilitas.

Sebagai dampak dari peningkatan jumlah kasus COVID-19 tersebut, banyak negara memberlakukan kebijakan *lockdown* dan *social distancing* yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi secara global. Akibatnya, pertumbuhan sebagian besar negara terkontraksi dikarenakan lemahnya aktivitas perekonomian baik dari sisi produksi maupun konsumsi.

Sejalan dengan penurunan perekonomian secara global, ekonomi domestik juga tidak lepas dari dampak COVID-19. Pada triwulan IV-2020 ekonomi domestik terkontraksi

sebesar 2,07%, triwulan III-2020 sebesar -3,49% (yoy), sedangkan triwulan II-2020 terkontraksi sebesar -5.32% (yoy), jauh menurun dibandingkan triwulan I-2020 yang masih tumbuh 2,97% (yoy). Penurunan turut dipengaruhi oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mitigasi penyebaran COVID-19 yang membatasi mobilitas serta kegiatan usaha masyarakat sehingga berdampak pada penurunan permintaan, konsumsi, aktivitas produksi, serta investasi di Indonesia (Sumber : Laporan Profil Industri Perbankan 2020).

Pengurangan jumlah tenaga kerja yang mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan hingga Risiko gagal bayar dan rasio pembiayaan macet atau *Non Performing Financing* (NPF) akan mengalami peningkatan. Sebab, banyak perusahaan tidak bisa melanjutkan kegiatan produksinya dan menyebabkan pembayaran utang menjadi terhambat, sehingga kondisi ini akan penurunan kegiatan ekonomi, maka berpotensi menekan lembaga keuangan kemudian pembiayaan-pembiayaan tidak bisa dibayarkan.

Industri Perbankan Nasional

Aset perbankan nasional pada akhir tahun 2020 tercatat Rp 9.177 triliun atau tumbuh 7,18% (yoy) dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp8.562.

Sampai akhir tahun 2020, perbankan nasional telah menghimpun DPK sebesar Rp 6.665 triliun yang sebelumnya pada akhir tahun 2019 sebesar Rp 5.998 triliun atau tumbuh 11,11% (yoy). Secara *market share*, DPK perbankan Bank Umum menguasai 95,16% terhadap DPK perbankan nasional.

Sedangkan untuk periode yang sama, total kredit perbankan nasional tercatat Rp 5.547 triliun, atau tumbuh -2,40% (yoy) dari sebelumnya pada akhir tahun 2019 sebesar Rp 5.683. Secara *market share*, kredit perbankan konvensional menguasai 93,08% terhadap total kredit perbankan nasional.

Secara umum, rasio kinerja perbankan nasional pada akhir tahun 2020 terhadap 2019 terlihat dari Rasio LDR/FDR menjadi 82,54% dari 94,43%. Dengan Rasio NPL mencapai 3,06% di tahun 2020 dari 2,53% di tahun 2019.

Industri Perbankan Syariah

Perbankan syariah Indonesia sampai saat ini masih terus menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun masih terdapat beberapa isu strategis serta tantangan yang masih perlu diselesaikan. Di samping itu, saat ini kita sedang dihadapkan oleh kondisi global yang telah memaksa kita untuk masuk ke dalam era *New Normal* sebagai dampak dari pandemi global COVID-19. *Era normal* baru ini telah membuat pola kehidupan sosial, masyarakat, dan ekonomi mengalami perubahan dengan semakin meningkatnya kewaspadaan yang mengharuskan menjaga jarak fisik dalam berinteraksi. Namun di sisi lain, kepedulian dalam membantu sesama semakin meningkat terutama dalam permasalahan ekonomi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan syariah untuk dapat memberikan pelayanan berbasis digital serta memenuhi kebutuhan sosial masyarakat sehingga dapat berperan dalam membangun perekonomian umat pasca pandemi

Hingga akhir 2020, bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mencapai 197 bank yang terdiri dari 14 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah serta 163 BPR syariah. Sampai Desember 2020, *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 6,51% atau dengan total aset Rp608,9 triliun. Secara aset, perbankan syariah mengalami *growth* sebesar 13,12% (yoy).

Pada periode yang sama, DPK perbankan syariah sudah mencapai Rp 475 triliun atau tumbuh 11,87% (yoy) dari tahun 2019 yang sebesar Rp 425 triliun. Secara *market*

share, DPK perbankan syariah menguasai 6,94% terhadap total DPK perbankan nasional dari tahun 2019 sebesar 6,09%.

Dari sisi penyaluran dana, pembiayaan perbankan syariah per Desember 2020 mencapai Rp 394 triliun atau tumbuh sebesar 8,08% dari tahun 2019 yang sebesar Rp 365 triliun. Secara *market share*, posisi pembiayaan perbankan syariah menguasai 5,90% terhadap total pembiayaan perbankan nasional.

Tinjauan Bisnis



Perekonomian Indonesia di tahun 2020 dirasakan kurang menggembirakan bagi pelaku industri perbankan dan industri-industri lainnya dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia per Desember 2020 minus 2,07%. Hal ini disebabkan adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019* ("COVID-19") yang menyerang dunia, tidak terkecuali juga Indonesia sejak Maret 2020 sehingga mengganggu stabilitas kinerja perekonomian dalam negeri dan juga global.

Dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hampir di seluruh wilayah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 sehingga mempengaruhi roda perekonomian, mobilitas masyarakat dan barang terbatas, permintaan domestik turun, aktivitas produksi dan investasi diberbagai daerah terhambat, banyak usaha tutup, serta meningkatnya jumlah pengangguran maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pandemi COVID-19 berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap banyak sektor khususnya sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, pertambangan termasuk sektor

UMKM, yang sebelumnya kebal terhadap krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008.

Untuk mencegah semakin menurunnya kinerja perekonomian Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, seluruh pemangku kepentingan yaitu Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) bahu membahu mengeluarkan berbagai kebijakan dan stimulus yang mendukung dunia usaha termasuk industri keuangan agar dapat kembali bergerak. Diantaranya OJK mengeluarkan peraturan relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan untuk debitur terkena dampak pandemi Covid-19 sedangkan BI melonggarkan ketentuan *Financing to Value* (FTV) sebesar 100% untuk pembiayaan properti serta ketentuan Giro Wajib Minum (GWM) bank, melakukan operasi pasar, dan diperkenankan untuk membeli surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Sementara itu, Pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimana realisasinya hingga akhir bulan Desember 2020 mencapai Rp 579,78 Triliun atau 83,4% dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 695,2 Triliun.

Adapun distribusi anggaran program PEN tersebut telah disalurkan pada sektor kesehatan dengan realisasi sebesar Rp 63,51 Triliun atau 63,8% dari anggaran yang diberikan sebesar Rp 99,5 Triliun, perlindungan sosial dengan realisasi sebesar Rp 220,39 Triliun atau 95,73% dari anggaran Rp 230,31 Triliun, Insentif Usaha dengan realisasi sebesar Rp 56,12 Triliun atau 46,53% dari anggaran Rp 120,61 Triliun, UMKM dengan realisasi sebesar Rp 112,44 Triliun atau 96,6% dari anggaran Rp 116,31 Triliun, sektoral K/L dan Pemda dengan realisasi sebesar Rp 66,59 Triliun atau 98,1% dari anggaran Rp 67,86 Triliun, Pembiayaan BUMN dan Korporasi dengan realisasi sebesar Rp 60,73 Triliun atau 100% dari anggaran Rp 60,73 Triliun. Kedepannya Pemerintah terus berusaha mempercepat penyerapan anggaran program PEN tersebut untuk menggerakkan laju perekonomian (sumber: Antara News.com tanggal 7 Januari 2021).

Dengan adanya pandemi COVID-19 penyaluran pembiayaan dilakukan lebih selektif dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, serta memperhatikan sektor industri mana yang baik dan memperhitungkan tingkat risiko sesuai *risk appetite* Bank.

Selama tahun 2020 Bank Victoria Syariah terus berusaha mengembangkan bisnisnya terutama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor Komersial dan UKM, mengelola portofolio pembiayaan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank, serta mengantisipasi menurunnya kualitas portofolio pembiayaan.

Selain itu, Bank Victoria Syariah senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitas SDI termasuk SDI bidang pembiayaan, mempercepat proses pelayanan, serta secara konsisten meningkatkan *account management* dan *risk management* bidang pembiayaan.

Pembiayaan Komersial

Jenis Pembiayaan Komersial

Bank Victoria Syariah tetap fokus pada penyaluran pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi untuk bisnis umum maupun untuk segmentasi khusus. Segmentasi dilakukan terhadap nominal plafond yang diusulkan minimal sebesar Rp 5 Milyar dan maksimal sesuai Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD).

Strategi Pengembangan Pembiayaan Komersial

Guna merespon tantangan dalam menghadapi kondisi perekonomian yang masih belum kondusif karena adanya pandemi COVID-19, Bank Victoria Syariah melakukan beberapa strategi pembiayaan komersial sebagai berikut:

1. Melakukan ekspansi pembiayaan lebih selektif kepada sektor ekonomi yang masih memiliki prospek bagus. Selektif diutamakan untuk *debitur existing* yang mempunyai *track record bonafide* dan masih mempunyai ruang untuk penambahan fasilitas.

2. Menerapkan pola pembiayaan dengan model *value chain* terhadap debitur komersial guna mendapat prospek bisnis yang dapat dikembangkan.
3. Mengoptimalkan peran kantor cabang dan Divisi Pembiayaan Kantor Pusat untuk melakukan penetrasi pasar komersial pada sektor unggulan, sesuai dengan potensi daerah dan segmen debitur.
4. Memperkuat kerjasama dengan perusahaan induk Bank Victoria Syariah yaitu PT. Bank Victoria International Tbk di bidang pembiayaan terutama untuk pembiayaan komersial.
5. Melakukan *cross selling* ke nasabah pendanaan yang memiliki usaha dan membutuhkan pembiayaan dalam rangka ekspansi usahanya.

Langkah Strategis ke Depan

1. Memperbaiki proses pembiayaan yaitu melakukan proses pembiayaan yang cepat, tepat dengan tidak mengurangi prinsip kehati-hatian.
2. Me-review ulang segmentasi, target market dan positioning pembiayaan komersial.
3. Konsolidasi, yaitu melakukan *monitoring existing account* dan penataan terhadap kantor cabang yang telah ada dan melakukan inisiasi *account* komersial dengan tujuan untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan.
4. Mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan dari strategi sebelumnya yang mendukung kebijakan Bank Victoria Syariah seperti melakukan *cross selling* dalam *me-reprofile* pembiayaan.

Pembiayaan Multifinance

Tahun 2020 merupakan tahun evaluasi bagi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan multifinance karena pada tahun tersebut terdapat beberapa perusahaan *multifinance* yang kegiatan usahanya dibekukan bahkan dicabut ijin usahanya.

Untuk itu, Bank Victoria Syariah terus mengevaluasi dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan baik baru maupun tambahan kepada perusahaan *multifinance*. Porsi pembiayaan *multifinance* dari keseluruhan portofolio pembiayaan Bank Victoria Syariah di tahun 2020 adalah sebesar Rp 74,4 Milyar turun sebesar Rp 59,4 Milyar atau 44% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 133,8 Milyar dimana penurunan tersebut disebabkan adanya pelunasan.

Langkah Strategis ke Depan

Ditengah perekonomian yang belum membaik karena adanya pandemi COVID-19 Bank Victoria Syariah akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan *mutifinance* dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, analisis dan *review* terhadap perusahaan *multifinance existing* maupun perusahaan multifinance yang akan menjadi target *market* akan lebih diperdalam.

Pembiayaan Usaha Kecil

Selama tahun 2020 Bank Victoria Syariah telah berkomitmen untuk pemenuhan penyaluran pembiayaan UMKM sesuai dengan ketentuan *regulator*. Melihat kondisi perekonomian saat ini, Bank Victoria Syariah akan lebih selektif dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan pada segmen ini dikarenakan Bank pernah mengalami kendala terkait dengan kualitas pembiayaan UMKM.

Pembiayaan Ritel / Konsumer

Sejalan dengan strategi Bank Victoria Syariah dalam melakukan reprofiling pembiayaan ke segmen bisnis retail, Divisi Pembiayaan bertanggungjawab dalam melakukan *set up* produk, bisnis model, bisnis proses, dan *sales force* untuk mencapai target bisnis yang ditetapkan. Selain itu, Divisi Pembiayaan juga bertanggung jawab melakukan supervisi cabang-cabang Bank Victoria Syariah dalam melakukan proses penjualan produk-produk pembiayaan ritel/konsumer.

Jenis Pembiayaan Konsumer yang dimiliki Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR Vis iB)
KPR Vis iB merupakan Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) untuk perorangan dengan akad murabahah dimana Bank Victoria Syariah membiayai pembelian rumah yang diperlukan oleh debitur sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan Bank yang disepakati.
2. Pembiayaan Pemilikan Mobil (PPM Vis iB)
Realisasikan impian anda memiliki mobil idaman melalui PPM Vis iB, Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Mobil.
3. Pembiayaan Multiguna (PMG Vis iB)
Realisasikan impian anda memiliki barang multiguna atau melaksanakan umroh sesuai impian melalui PMG Vis iB, Pembiayaan Multi Guna.

Target Market Pembiayaan Ritel/Konsumer

Target market Pembiayaan Konsumer adalah debitur perorangan yang berprofesi sebagai karyawan, pengusaha, dan profesional. Pembiayaan untuk kepemilikan rumah difokuskan untuk membiayai debitur di segmen perumahan menengah dengan harga sampai dengan Rp 5 Milyar. Namun untuk *case* tertentu, plafond pembiayaan untuk kepemilikan rumah dapat lebih dari Rp 5 Milyar dengan mempertimbangkan kemampuan debitur dan harga rumah yang dibeli.

Sedangkan pembiayaan pemilikan mobil difokuskan untuk membiayai karyawan perusahaan/institusi secara kolektif. Sementara itu, pembiayaan umrah difokuskan untuk membiayai debitur yang berniat pergi umroh dalam suatu komunitas tertentu dan dilakukan secara kolektif.

Strategi Bisnis Pembiayaan Ritel/ Konsumer ke Depan

Strategi bisnis dilakukan untuk mendorong pertumbuhan bisnis Pembiayaan Ritel / konsumer adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan produk PPR yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan selaras dengan produk yang dikembangkan oleh *property developer*.
2. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan *developer*, *agent property*, *travel agent* dan *dealer*.
3. Mengembangkan program khusus *company collective* untuk pembiayaan kepada karyawan perusahaan / institusi.
4. Menyempurnakan *Business Process* dengan mengembangkan sistem untuk meningkatkan *service level approval* kepada debitur.
5. Mengembangkan kemitraan atau aliansi dengan para rekanan strategis untuk penyaluran pembiayaan ritel/konsumer kepada masyarakat yang wilayahnya tidak terjangkau oleh cabang.

Pendanaan / Dana Pihak Ketiga

Bank Victoria Syariah terus berupaya mengedepankan pertumbuhan yang berimbang antara pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga pada rasio yang menguntungkan bagi Bank. Disamping itu, Bank Victoria Syariah secara berkesinambungan berusaha menekan Dana Pihak Ketiga berbagi hasil tinggi untuk mengoptimalkan net imbalan.

Pencapaian di Tahun 2020

Dengan melanjutkan target seperti di tahun sebelumnya dimana salah satu target pencapaian Dana Pihak Ketiga adalah memperbanyak *Current Account Saving Account* (CASA). Adanya pandemi COVID-19 hingga saat ini menyebabkan pendapatan dari banyak orang menurun atau bahkan kehilangan pekerjaan yang berdampak pada kurangnya kemampuan seseorang untuk menabung. Namun kondisi tersebut tidak mempengaruhi Bank Victoria Syariah dalam memperoleh CASA bahkan melebihi dari target yaitu sebesar Rp 292,5 Milyar atau meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 74 Milyar.

Dalam upaya meningkatkan target CASA, Bank Victoria Syariah telah menambah dan bekerjasama dengan satu lembaga *switching* lagi (ALTO) untuk memperluas jaringan *switching* dalam rangka meningkatkan layanan transaksi kartu ATM Bank Victoria Syariah. Sebelumnya hanya ada satu lembaga *switching* yaitu Prima.

Penambahan jaringan tidak hanya berupa jaringan *switching* melainkan juga jaringan kantor dimana Bank Victoria Syariah telah bersinergi dengan perusahaan induk yaitu PT. Bank Victoria International Tbk dengan membuka Layanan Syariah Bank di PT. Bank Victoria International Tbk Kantor Cabang Fatmawati.

Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Bank Victoria Syariah fokus untuk meningkatkan jumlah dana retail dibawah Rp 2 Miliar dan meningkatkan dana CASA secara proaktif dengan penekanan pada pendanaan dari institusi berlabel islami dan perorangan, dengan strategi sebagai berikut:

1. Mengaktifkan kegiatan *marketing communication* bersama pelaku jasa keuangan lainnya seperti gerakan ekonomi syariah dan iB Vaganza.
2. Meningkatkan pertumbuhan dana retail melalui kegiatan open table, pameran, atau kunjungan langsung ke nasabah yang berada di pusat-pusat perdagangan, perbelanjaan, atau perkantoran.
3. Melakukan kegiatan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dll untuk menginformasikan produk-produk dan kegiatan Bank Victoria Syariah sehingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas.
4. Meningkatkan kerjasama atau aliansi strategis dalam penjualan produk-produk pendanaan dengan cara melakukan pemetaan terhadap komunitas, perusahaan-perusahaan, lembaga pendidikan, atau instansi Pemerintah dan Yayasan yang berpotensi, serta secara aktif melakukan pendekatan agar komunitas, perusahaan, lembaga pendidikan atau instansi Pemerintah dan Yayasan mau menggunakan produk Bank Victoria Syariah.
5. Mengembangkan layanan digital seiring dengan era digitalisasi yang semakin berkembang sebagai upaya *Brand Loyalty* terhadap nasabah dengan harapan dapat menambah dana retail.
6. Memfokuskan pada pendanaan dari Lembaga Institusi Islam dengan cara:
 - a. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Zakat, Lembaga Sosial Islami, dan Mesjid berskala menengah
 - b. Melakukan *Strategic Partnership* dengan Ormas dan Lembaga Islam.

Strategi Pencapaian Target Penghimpunan CASA

Strategi penghimpunan CASA disesuaikan dengan tipe nasabah dan juga keterkaitannya nasabah tersebut dengan Bank Victoria Syariah. Adapun strategi dan program yang dijalankan oleh Bank Victoria Syariah untuk meningkatkan CASA adalah:

1. Untuk nasabah *existing*, Bank akan memberikan *Loyalty Program* berupa pemberian *gimmick* yang menarik.
2. Program Akuisisi nasabah baru untuk menambah CIF retail di Kantor Cabang Bank akan terus berjalan sehingga dapat memperluas basis *customer*-nya. Program dan strategi untuk peningkatan jumlah customer yang dilakukan adalah :
 - a. Bank terus meningkatkan penetrasi terhadap pasar-pasar emosional, yang berbasis organisasi keagamaan dan sosial, terutama pendidikan. Untuk

itu, Bank akan membentuk satu lini bisnis, yang khusus menangani nasabah-nasabah yang berafiliasi dengan organisasi-organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Pondok Pesantren, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, dll.

- b. Bank juga akan meningkatkan akuisisi nasabah CASA baru dari *value chain* debitur-debitur pembiayaan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari *Integrated Account Management*, dimana *Relationship Manager Funding* dapat mensosialisasi *potential customer* yang direferensikan oleh debitur pembiayaan, terutama yang ada keterkaitan hubungan bisnis dengan debitur pembiayaan.

Selain itu, inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan untuk menambah DPK adalah:

1. Produk dan Layanan

- a. Melakukan *review product lifecycle* dan *review* produktifitas produk dana (*closed or expand*).
- b. Melakukan pendalaman terhadap nasabah yang ada (*customer deepening*) melalui pola marketing dan komunikasi yang efektif.

2. Peningkatan Sales dan Service

- a. Pemenuhan tenaga sales secara memadai di seluruh jaringan kantor guna menutup gap antara kebutuhan dan ketersediaan.
- b. Mendorong peningkatan produktivitas seluruh tenaga *marketing* dan *sales*. Peningkatan produktivitas tersebut dilakukan melalui penetapan fokus tugas antara *marketing* dan *sales funding* dan *financing*. Selain itu, sistem evaluasi kinerja akan diberikan secara lebih ketat dengan mengembangkan *Sales Tracking System* dengan dibarengi oleh sistem *reward* dan *punishment* yang berbasis pada kinerja. *Training* dan pengembangan *skill* akan dilakukan secara reguler terhadap seluruh tenaga *sales* yang ada.

Tresuri



Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi dunia usaha dan perbankan syariah dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sepanjang tahun 2020 bahkan hingga saat ini. Fungsi intermediasi di perbankan banyak yang tidak berjalan dengan maksimal bahkan mengalami penurunan. Disini fungsi tresuri mengambil peran yang cukup penting sebagai pengganti sementara fungsi pembiayaan tersebut.

Fungsi utama unit kerja tresuri adalah menjaga dan mengelola likuiditas harian dengan memanfaatkan kelebihan dana yang diperoleh untuk ditempatkan pada berbagai instrumen keuangan yang dapat memberikan imbal hasil yang optimal dengan memperhatikan pemenuhan terhadap ketentuan otoritas yang berwenang (OJK dan BI) seperti menjaga rasio Giro Wajib Minimum (GWM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Disamping itu Bank Victoria Syariah saat ini sudah terdaftar sebagai Perantara Pedagang Efek dan Efek Bersifat Utang (PPE-EBUS) agar bank bisa melakukan transaksi jual beli surat berharga atau sebagai agen penjual surat berharga.

Dari segi operasional, kegiatan unit kerja tresuri adalah melakukan penempatan pada instrumen keuangan diantaranya seperti:

1. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) yaitu penempatan dana antar bank dalam jangka pendek seperti *overnight placement*, penempatan pada BI (Fasbis, SBIS) dan reksadana pasar uang syariah ataupun pada surat berharga yang berdurasi kurang dari 1 tahun.
2. Pasar Modal Syariah yaitu penempatan dana kepada surat berharga negara maupun korporasi dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun.

Hingga akhir 2020, bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mencapai 197 bank yang terdiri dari 14 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah serta 163 BPR syariah. Sampai Desember 2020, *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 6,51% atau dengan total aset Rp608,9 triliun. Secara aset, perbankan syariah mengalami *growth* sebesar 13,12% (yoy).

Bank Victoria Syariah pada tahun 2020 berhasil mencapai pertumbuhan asset sebesar +/- 1.46%, sementara unit kerja tresuri membukukan kenaikan portofolio sebesar 0.4% dari tahun 2019.

Salah satu faktor yang mendorong peningkatan asset adalah portofolio tresuri dalam bentuk penempatan pada surat berharga, penempatan bank lain dan Bank Indonesia. Peningkatan portofolio tresuri ini adalah untuk memanfaatkan peluang yang ada sementara peluang di sisi pembiayaan belum banyak tercipta terlebih lagi dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi selama tahun 2020, sehingga Bank lebih konservatif dalam melakukan ekspansi bisnis disisi pembiayaan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh OJK maupun Bank Indonesia dalam rangka restrukturisasi pembiayaan sangat membantu kondisi perbankan di Indonesia.

Peningkatan portofolio tresuri dilakukan secara selektif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal. Penurunan suku bunga yang cukup signifikan di tahun 2020 membuat portofolio *fixed income* menjadi semakin baik dan menghasilkan *comprehensif income* yang positif.

Disamping itu unit kerja tresuri dan tim juga berkewajiban mempersiapkan rapat **AlsyoCo** yang diselenggarakan rutin minimum 1 (satu) bulan sekali dengan Direksi dan divisi terkait yang bertujuan membahas perkembangan posisi keuangan Bank dari waktu ke waktu selama pandemi COVID-19 dan menetapkan strategi apa yang akan dilakukan Bank.

Unit kerja tresuri juga dituntut untuk selalu aktif dalam mengelola likuiditas Bank dan untuk menjaga agar meminimalisir kerugian sehingga memperkecil negatif *spread* atas dana pihak ketiga bank yang belum tersalurkan ke pembiayaan.

Seiring dengan hal tersebut diatas maka rencana kedepan yang akan dicapai unit kerja tresuri adalah:

1. Mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan RBB dengan bekerjasama dengan bagian Pendanaan dan Pembiayaan.
2. Meningkatkan *income* tresuri dengan tetap melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang memiliki imbal hasil tinggi namun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Mengembangkan infrastruktur sistem di bagian unit kerja tresuri sejalan dengan mulai bertambahnya portofolio dan transaksi tresuri.

4. Meningkatkan kualitas SDM melalui *training-training* atau sertifikasi profesi yang berkaitan dengan bidang tresuri.
5. Meningkatkan dan memperbanyak kerjasama dengan bank-bank syariah maupun konvensional khususnya dalam bidang Pasar Uang Antarbank.

Sumber Daya Insani



Pada Tahun 2020 Bank Victoria Syariah tetap terus berupaya mengembangkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Insani untuk dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Pengelolaan SDI difokuskan pada evaluasi kebijakan dan peningkatan kompetensi dalam pelayanan yang berprinsip syariah, yang dimulai proses seleksi dan rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja yang diikuti dengan program pengembangan karir hingga program-program retensi.

1. Seleksi dan Rekrutmen

Untuk memperkuat organisasi, setiap tahun Bank Victoria Syariah melakukan seleksi karyawan yang ada dan / atau proses rekrutmen melalui *website*, kerjasama dengan grup usaha, atau *experience hire*. Para karyawan baru tersebut akan diberikan pelatihan berupa induksi agar dapat memahami visi dan misi serta nilai perusahaan dengan lebih baik.

Selama tahun 2020, jumlah karyawan yang telah direkrut sebanyak 6 orang, dimana perekrutan tetap difokuskan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan operasional maupun administrasi dengan memperhatikan komposisi

yang seimbang antara *supporting* dan bisnis, dan jumlah karyawan Bank Victoria Syariah saat ini adalah 131 orang.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2020 program pelatihan karyawan diutamakan pada pengetahuan tentang bisnis, teknis operasional perbankan syariah, penanganan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT), fungsi kepatuhan serta *sharing session* unit kerja, juga mengikutsertakan pada sertifikasi kepatuhan *level officer* dan *manager* serta sertifikasi *treasury level basic, intermediate* dan *advance*.

Pelatihan dilakukan secara *in-house* atau *public* dengan pembicara/narasumber dari pihak internal bank dan / atau eksternal sehingga setiap karyawan memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selama tahun 2020, Bank Victoria Syariah telah melaksanakan berbagai pelatihan seperti, Pendidikan Dasar Perbankan Syariah, Sertifikasi dan *Refreshment Treasury*, *Refreshment* Manajemen Risiko, Sertifikasi

Kepatuhan, Audit, Teknologi Informasi dan Sosialisasi Ketentuan Perbankan.

Di samping pelatihan tersebut di atas Bank Victoria Syariah secara konsisten melaksanakan doa bersama, *morning briefing* dan memberikan semangat atau motivasi, agar SDI memiliki kesamaan visi dan misi serta memahami rencana bisnis bank.

3. Program Retensi

Bank Victoria Syariah melaksanakan program employee engagement untuk mempertahankan SDI yang berprestasi dan berpotensi dan dikembangkan melalui berbagai kegiatan antara lain:

- Pemberian penghargaan “**BVIS H.E.B.A.T**” kepada karyawan yang berprestasi memperbaiki dan atau mengembangkan suatu proses, yang bermanfaat bagi Bank.
- Program pengembangan karyawan melalui perencanaan karir.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan.
- Penyelenggaraan kegiatan lain, seperti kegiatan kerohanian, olah raga dan musik

4. Pengelolaan Kinerja

Untuk mendorong karyawan agar senantiasa berupaya mencapai kinerja yang optimal, Bank Victoria Syariah mendorong penerapan dan perbaikan seluruh tahapan dalam proses pengelolaan kinerja yang mencakup penyusunan Indikator Kinerja Utama dan pembinaan periodik dari atasan kepada bawahan dalam memantau pencapaian target kerja.

Untuk pelaksanaan penilaian kinerja karyawan menggunakan parameter yang terukur berupa *key performance indicator* (KPI) yang menjadi dasar obyektif pemberian *rewards*.

Rencana Ke Depan Pengembangan Sumber Daya Insani

Rencana pengembangan sumber daya insani untuk tahun mendatang adalah menyiapkan performance oriented personnel sebagai key driver pertumbuhan bisnis yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, melalui strategi utama adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Performance Oriented Culture

Menerapkan *Performance Management Process* di seluruh organisasi yang didukung oleh *key performance indicator* yang jelas dan transparan, serta mekanisme *reward* yang kuat dan adil.

2. Melengkapi Cabang dengan tim yang cukup dan kompeten

Menempatkan *Branch Manager* yang memiliki

kompetensi tinggi untuk memimpin Kantor Cabang dan didukung oleh *sales team* yang cukup, disiplin dan agresif dalam melakukan penetrasi pasar.

3. Memperkuat Talent Pool

Memiliki data terkait *talent pool* di Kantor Pusat dan Cabang dengan profil dan kompetensi yang sesuai (*right number, right people on the right place*) yang didukung oleh organisasi yang baku (sebagai *baseline* untuk *recruitment* dan menciptakan *alignment equality*).

4. Upaya Penerapan Code of Conduct

Code of Conduct berlaku bagi setiap insani yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan.

Setiap insan Bank Victoria Syariah memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan *Code of Conduct* dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawab insan Bank Victoria Syariah adalah melaporkan setiap tindakan pegawai lain atau rekan kerja yang diyakini merupakan suatu pelanggaran *Code of Conduct* dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya melalui mekanisme *Whistleblowing* kepada Unit Kerja *Anti Fraud*.

Teknologi Informasi



Era modern dengan perkembangan teknologi yang begitu masif menjadi tantangan bagi industri perbankan untuk bergerak dinamis dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Karena itu, peran teknologi informasi (TI) menjadi semakin penting untuk memenuhi semua aspirasi, mendukung proses operasional guna menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan transaksi perbankan.

Pengembangan teknologi informasi oleh Bank Victoria Syariah dilaksanakan dalam rangka menghadapi tantangan perubahan yang cepat dalam industri perbankan. Operasional layanan perbankan saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi *digital* yang menyediakan layanan perbankan secara *real-time*, *on-demand*, *on-line*, memanfaatkan media sosial dan layanan digital perbankan yang dilakukan sendiri oleh nasabah. Bank Victoria Syariah berupaya terus untuk senantiasa mengembangkan produk-produk yang berlandaskan syariah untuk memberikan solusi baik pelayanan perbankan maupun investasi yang amanah.

Teknologi Informasi berperan sebagai entitas yang dapat menyumbangkan keuntungan finansial terhadap

Perusahaan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan melalui pengembangan inovatif layanan kepada nasabah dan meningkatkan produk dan layanan operasional perbankan yang lebih kompetitif, lebih baik dan lebih cepat.

Program Kerja Divisi Teknologi Informasi (TI)

Fokus program kerja Divisi Teknologi Informasi yaitu pada peningkatan kapabilitas Teknologi Informasi yaitu peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan. Pada tahun 2020 Divisi Teknologi Informasi menjalankan program yaitu:

1. Proyek Pemenuhan Kepatuhan pada *Regulator* Perbankan
 - a. Pengembangan dengan mendukung Bank Indonesia dan OJK sebagai regulator dalam mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi seperti BI-ANTASENA.
 - b. Pengembangan Kartu Debit telah melaksanakan implementasi kartu *debit chip* menggunakan *National Standard Indonesian Chip Card Specification (NSICCS)* secara terbatas atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.

- c. Pengembangan Kartu Debit GPNBNI Syariah telah melaksanakan kerja sama dengan dua lembaga penyelenggara *switching* dalam rangka pemenuhan kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).

2. Proyek Operasional Support

- a. Divisi Teknologi Informasi memberikan dukungan dalam hal pembukaan dan penutupan kantor cabang, relokasi kantor cabang dan *maintenance* pada Kantor Cabang yang meliputi *update antivirus*, pemeliharaan infrastruktur, jaringan dan perangkat *hardware*, *PC* dan *server*.
- b. Pengembangan aplikasi APU-PPT yaitu aplikasi yang diwajibkan oleh Regulator sebagai tools untuk anti pencucian uang dan pencegahan tindak pidana terorisme.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi

Peran strategis sistem informasi dalam organisasi adalah memperbaiki efisiensi operasional, meningkatkan inovasi organisasi dan membangun sumber daya informasi yang strategis. Ketiga peran strategis ini dapat mendukung Bank Victoria Syariah dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dalam bersaing. Sistem informasi yang diaplikasikan oleh perusahaan untuk menunjang strateginya dapat pula digunakan untuk melihat kecenderungan tren bisnis di masa depan. Dengan adanya sistem informasi, maka dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang karena adanya perubahan orientasi bisnis.

Perencanaan strategis sistem informasi diperlukan agar dapat mengenali target terbaik untuk melakukan pembelian dan penerapan sistem informasi manajemen, serta memaksimalkan hasil investasi dari teknologi informasi. Proses Sistem informasi yang baik akan membantu dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada kebutuhan nasabah (*Customer Centric*) dalam merealisasikan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerapan teknologi informasi untuk menentukan strategi perusahaan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan performa bisnis. Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan unit Bisnis dan Operasional dalam rangka pengembangan *Big Data* sebagai sarana dalam pengolahan dan analisa data untuk internal maupun pihak ketiga.

Strategi TI Tahun 2021

Tahun 2021, pengembangan teknologi informasi ditujukan untuk mendukung *corporate plan* bisnis dengan misi bak yakni “*Keep Moving Forward*” akan menjadi fokus TI pada seluruh aspek, baik dari sisi infrastruktur, organisasi, kompetensi maupun etos kerja, meningkatkan produktivitas dan memitigasi risiko serta meningkatkan kemampuan pengelolaan data dan pengamanan informasi agar peningkatan kualitas dan kehandalan layanan TI dapat terlaksana dengan konsisten.

TI Bank Victoria Syariah selalu berupaya dalam melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi-aplikasi yang berkaitan terhadap pelayanan nasabah diantaranya dengan mendukung Bank Indonesia dan OJK sebagai *regulator* dalam mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi seperti BI-ANTASENA, dengan menggunakan teknologi yang lebih handal, efektif dari sistem sebelumnya dan berupaya melakukan inovasi teknologi dan pengembangan sistem agar menjadi lebih baik dan tepat guna, salah satunya dengan merencanakan pengembangan Data Warehouse, Pengembangan Integrasi dengan DUKCAPIL serta pengadaan aplikasi *Mobile Banking*, guna menunjang komitmen kami dalam melayani kebutuhan operasional dan bisnis bank.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi dilaksanakan untuk menyelaraskan (*alignment*) antara pengembangan teknologi informasi dengan bisnis, mengelola risiko-risiko dengan lebih baik, mempersingkat waktu penyerahan, menyediakan layanan yang lebih baik, menekan biaya dan meningkatkan nilai (*value*) bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Dalam *era digital economy*, penerapan strategi bisnis erat sekali kaitannya dengan arah pengembangan teknologi informasi. Industri perbankan harus mengikuti perkembangan arah teknologi digital. Pengembangan teknologi digital yang cepat menjadikan industri bank membangun digital banking untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan memberikan solusi yang memiliki value terbaik. Tata Kelola Teknologi Informasi sangat berperan dalam mengarahkan penggunaan teknologi digital agar selaras dengan bisnis. Di sisi lain Tata Kelola Teknologi Informasi juga penting dalam mengelola risiko keamanan yang sangat penting untuk dikelola. Bank perlu untuk melaksanakan semua mekanisme yang dilakukan untuk melindungi dan meminimalkan gangguan kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) informasi dari asset digital. Pengelolaan keamanan yang baik merupakan bagian dari Tata Kelola TI yang baik.

Operasional



Operasional merupakan suatu bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam bisnis perbankan, sehingga operasional dalam sebuah bank harus selalu ditingkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkesinambungan. Operasional sebuah bank ditentukan oleh 4 (empat) faktor utama yaitu Sumber Daya Insani (SDI), proses internal operasional, sistem & teknologi informasi dan eksternal.

Dalam memberikan *support* kepada bisnis sangat ditentukan oleh Sumber Daya Insani yang dimiliki, dimana SDI tersebut harus berkualitas dan handal dalam segala aspek dan harus selalu berusaha meningkatkan standar kualitas layanannya.

Guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Bank Victoria Syariah, Team Operasional meletakkan 4 fungsi dan peranan yang mendasar yaitu:

1. *Service Delivery*, memberikan layanan kepada seluruh *stakeholders* secara tepat waktu, akurat, handal.
2. *Business Partner*, menjadi *lets business do business*, mendukung pertumbuhan bisnis secara optimal dengan tidak mengganggu unit bisnis dalam urusan operasional.

3. *Compliance Agent*, seluruh kegiatan operasional harus berlandaskan ketentuan eksternal dan internal dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehati-hatian.
4. *People Management*, mengelola semua Sumber Daya Insani secara optimal dengan memberikan *Key Performance Indicator* guna meningkatkan produktivitas setiap karyawan serta berdasarkan nilai-nilai dan budaya perusahaan.

Tahun 2020, Team Operasional akan berupaya terus melanjutkan pengembangan operasional guna mendukung rencana bisnis Bank Victoria Syariah dengan tetap memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di industri perbankan syariah.

Strategi Operasional tahun 2020 sebagai berikut:

1. Menyempurnakan berbagai proses dan infrastruktur serta melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur sesuai *regulator* guna mendukung efisiensi dan efektifitas layanan kepada seluruh *Stakeholders*.
2. Meningkatkan produktivitas melalui tinjauan komprehensif terhadap *Service Level Agreement*.

3. Menyiapkan infrastruktur operasional bekerja sama dengan induk dalam mempersiapkan Layanan Syariah Bank.
4. Meningkatkan kompetensi karyawan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta melakukan sertifikasi Manajemen Risiko guna membangun kesadaran atas pentingnya pengelolaan Risiko.

Menetapkan *Zerro Defect* dan *Zerro Fraud* untuk setiap karyawan agar tercapainya produktivitas dan kualitas kerja yang optimal.

Tinjauan Keuangan



Pada tahun 2020, total aset Bank tumbuh sebesar 1,5% atau Rp 33 miliar dari Rp 2.262 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 2.296 miliar di tahun 2020. Kenaikan total aset Bank ditahun 2020 lebih disebabkan adanya peningkatan pada bank lain & pada Bank Indonesia sebesar Rp 146,91 miliar, kenaikan efek-efek Rp 0,38 miliar.

Tinjauan keuangan ini disusun berdasarkan laporan keuangan Bank Victoria Syariah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, oleh karenanya untuk kelengkapan pembahasan dapat dilihat pada Laporan Keuangan terlampir termasuk catatan atas laporan keuangan.

Berikut disajikan ikhtisar keuangan perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, Mirawati, Sensi & Idris dengan mendapatkan opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.

Laporan Keuangan

(Dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Total Aset	2.296.027	2.262.451	33.576	1,48%
Kas & Giro pada Bank Indonesia	43.933	79.012	(35.079)	-44,40%
Aset produktif	2.107.870	2.042.918	64.952	3,18%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(26.204)	(24.011)	(2.193)	9,13%
Aset tetap bersih	10.135	3.094	7.041	227,58%
Aset lainnya	122.650	161.438	(38.788)	-24,03%
Total Liabilitas	1.916.770	1.908.207	8.563	0,45%
Utang Pajak	1.858	2.000	(142)	-7,11%
Dana wadiah dan syirkah temporer	1.630.527	1.710.985	(80.458)	-4,70%
Simpanan dari bank lain	260.000	183.000	77.000	42,08%
Liabilitas lainnya	24.385	12.222	12.163	99,51%
Total Ekuitas	379.758	354.243	25.515	7,20%
Modal disetor	360.000	360.000	-	0,00%
Pendapatan komprehensif lainnya	23.209	8.411	14.798	175,94%
Laba ditahan	(15.855)	(14.168)	(1.687)	11,91%
Pendapatan operasional	164.720	172.496	(7.776)	-4,51%
Beban operasional	(161.210)	(172.148)	10.938	-6,35%
Pendapatan (Beban) operasional	(204)	721	(925)	-128,32%
Laba sebelum pajak tangguhan	3.412	1.069	2.237	209,24%

Aset

Beberapa komponen utama aset Bank Victoria Syariah yaitu penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek, Peningkatan signifikan atas komponen-komponen aset tersebut menjadi faktor utama atas pertumbuhan aset Bank Victoria Syariah yang tumbuh sebesar Rp 33 miliar atau 1,5% pada tahun 2020.

Aset

(Dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Kas & Giro pada Bank Indonesia	43.933	79.012	(35.079)	-79,84%
Penempatan pada bank lain & Bank Indonesia	251.050	104.134	146.916	58,52%
Efek-Efek yang dimiliki	712.683	712.304	379	0,05%
Pembiayaan yang diberikan	1.166.972	1.231.614	(64.642)	-5,54%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(26.204)	(24.011)	(2.193)	8,37%
Aset tetap - bersih	10.135	3.094	7.041	89,47%
Agunan yang diambil alih	114.303	119.374	(5.071)	-4,44%
Cadangan kerugian penurunan nilai ayda	(15.368)	(10.512)	(4.856)	31,60%
Rupa-rupa aset	38.522	47.442	(8.920)	-23,15%
Jumlah Aset	2.296.027	2.262.451	33.576	1,46%

Penempatan Pada Bank Lain Dan Bank Indonesia

Bank membukukan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia sebesar Rp 251 miliar per Desember 2020. Posisi akun ini mengalami kenaikan sebesar Rp 146 miliar atau 58,52% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 104 miliar.

Efek-efek

Bank Victoria Syariah berupaya meminimumkan *"idle money"* dengan menempatkannya ke dalam instrumen keuangan yang menghasilkan pengembalian (*return*) yang menguntungkan dan aman, seperti penempatan pada efek-efek berupa Surat Berharga Syariah Negara, Sukuk Korporasi maupun Reksadana Syariah.

Untuk mengefektifkan peningkatan sumber dana dari pihak ketiga yang belum sepenuhnya dapat disalurkan di pembiayaan, Bank meningkatkan inventasi penyaluran dana dengan pembelian Sukuk Korporasi maupun Surat Berharga Syariah Negara. Total Efek-efek yang dimiliki Bank pada akhir tahun 2020 adalah Rp 714,8 miliar atau meningkat sebesar Rp 2,57 miliar atau 0,36% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 712,3 miliar.

Efek-efek yang dimiliki Bank 95,28% atau Rp 681,1 miliar adalah dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara, Sukuk Korporasi sebesar 2,61% atau Rp 18,6 miliar dan Reksadana sebesar 2,10% atau Rp 15,0 miliar.

Efek-efek

(Dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Surat Berharga Syariah Negara	681.165	596.596	84.569	13,79%
Sukuk Korporasi	18.693	146.916	(128.223)	-81,03%
Reksadana Syariah	15.019	379	14.640	3,86%
Jumlah Efek-Efek	714.877	743.891	(28.914)	-3,89%

Tingkat pengembalian rata-rata atas Surat Berharga Syariah Negara sebesar 6,00% sampai dengan 8,87%, Sukuk Korporasi sebesar 8,50% sampai dengan 8,75%.

Pembiayaan

Pada tahun 2020 total pembiayaan yang diberikan Bank sebesar Rp 1.167 miliar atau turun sebesar Rp 64 miliar dibandingkan dengan posisi 2019 yang sebesar Rp 1.232 miliar.

Pembiayaan tahun 2020 terdiri dari pembiayaan murabahah sebesar Rp 220 miliar (18,89%), pembiayaan musyarakah sebesar Rp 938 miliar (80,39%), pembiayaan mudharabah sebesar Rp 7 miliar (0,58%) dan pembiayaan ijarah sebesar Rp 2 miliar (0,14%).

Penyaluran pembiayaan dilakukan lebih selektif terutama pada sektor-sektor yang dinilai potensial dan mempunyai prospek yang baik. Dari sisi kualitas pembiayaan, Bank sangat serius menjaga dan melakukan perbaikan kualitas pembiayaan, upaya-upaya tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Bank sebagaimana target yang ditetapkan. Rasio pembiayaan bermasalah sebesar 4,73% di tahun 2020 dari sebelumnya 3,94% di tahun 2019, sedangkan untuk rasio pembiayaan bermasalah setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 3,46% di tahun 2020 dari sebelumnya 2,64% di tahun 2019.

Pembiayaan berdasarkan Akad

Kontributor utama penurunan pembiayaan ini dikarenakan penurunan pembiayaan berakad Musyarakah sebesar Rp 50,2 miliar atau turun 5,35% dimana pada tahun sebelumnya sebesar Rp 988,4 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 938,1 miliar di tahun 2020. Penurunan juga terjadi pada pembiayaan berakad *Mudharabah* sebesar Rp 14,4 miliar atau turun 211,44% dimana pada tahun sebelumnya sebesar Rp 21,2 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 6,8 miliar di tahun 2020, pembiayaan berakad ijarah turun sebesar Rp 0,9 miliar atau turun 53,90% dimana pada tahun sebelumnya sebesar Rp 2,5 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 1,6 miliar di tahun 2020.

Pembiayaan Berdasarkan Akad

(Dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pembiayaan Murabahah	220.404	219.540	864	0,39%
Pembiayaan Musyarakah	938.149	988.378	(50.229)	-5,35%
Pembiayaan Mudharabah	6.817	21.230	(14.413)	-211,44%
Pembiayaan Ijarah	1.602	2.466	(864)	-35,03%
Jumlah Pembiayaan	1.166.972	1.231.614	(64.642)	-5,54%

Pembiayaan berdasarkan Penggunaan

Struktur komposisi pembiayaan yang disalurkan Bank di tahun 2020 berdasarkan jenis penggunaannya meliputi 88,74% untuk pembiayaan Modal Kerja, 7,21% untuk pembiayaan investasi dan sisanya 4,05% merupakan pembiayaan untuk konsumsi.

Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan

(Dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Modal kerja	1.035.537	1.098.353	(62.816)	-6,07%
Konsumsi	84.146	40.610	43.536	51,74%
Investasi	47.289	92.651	(45.362)	-49,93%
Jumlah Pembiayaan	1.166.972	1.231.614	(64.642)	-5,54%

Pembiayaan Bermasalah

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* tahun 2020 sebesar 4,73% atau turun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 3,94%. Sedangkan untuk Rasio *Non Performing Financing* (NPF) *Nett* tahun 2020 adalah 1,77% atau turun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 1,30%.

Berbagai upaya telah ditempuh bank untuk menekan pertumbuhan pembiayaan bermasalah tersebut, antara dengan meningkatkan *account management*, pola restrukturisasi, pembentukan team Divisi Aset Manajemen, tindakan *persuasive* dan melalui update litigasi khususnya melalui lelang maupun *aset sales*.

Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk Bank

Mengantisipasi penurunan kualitas pembiayaan di tahun 2020, Bank membentuk tambahan Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) yang mencukupi, sehingga rasio NPF nett dapat dijaga pada kisaran dibawah 3,00%.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai untuk pembiayaan yang telah dibentuk Bank adalah memadai untuk menutup kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya piutang.

CKPN Pembiayaan Murabahah

(Dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2020	2019
Saldo awal tahun	1.163	2.073
Mutasi selama tahun berjalan	(3.418)	(2.569)
Penerimaan kembali pembiayaan	4.186	1.659
Penerimaan kembali pembiayaan yang dihapusbukukan		
Saldo akhir tahun	1.931	1.163

CKPN Pembiayaan Musyarakah

(Dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2020	2019
Saldo awal tahun	20.647	12.423
Mutasi selama tahun berjalan	2.642	3.124
Penerimaan kembali pembiayaan yang dihapusbukukan	936	5.100
Saldo akhir tahun	24.225	20.647

CKPN Pembiayaan Mudharabah

(Dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2020	2019
Saldo awal tahun	200	659
Mutasi selama tahun berjalan	41	(459)
Penerimaan kembali pembiayaan yang dihapusbukukan	-	-
Saldo akhir tahun	242	200

Secara sektoral, penurunan pembiayaan disebabkan adanya penurunan secara signifikan pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp 34,6 miliar, perdagangan lainnya sebesar Rp 27,8 miliar serta sektor konstruksi sebesar Rp 8,4 miliar. Penurunan ini hanya dapat diimbangi dengan peningkatan pada sektor jasa-jasa dunia usaha lainnya sebesar Rp 9,8 miliar.

Berdasarkan Sektor Ekonomi

(Dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2020		2019		Pertumbuhan	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Jasa-jasa dunia usaha	819.671	70,24%	820.822	86,85%	(1.151)	-0,14%
Konstruksi	56.277	4,82%	64.756	5,26%	(8.479)	-15,07%
Perdagangan besar dan eceran	81.765	7,01%	116.233	9,44%	(34.468)	-42,16%
Perdagangan lainnya	50.774	4,35%	78.649	6,39%	(27.875)	-54,90%
Industri pengolahan	111.196	9,53%	113.734	9,23%	(2.538)	-2,28%
Lain-lain	47.289	4,05%	37.420	3,04%	9.869	20,87%
Jumlah Pembiayaan	1.166.972	100,00%	1.231.614	100,00%	(64.642)	-5,54%

Liabilitas

Pencapaian liabilitas Bank pada tahun 2019 sebesar Rp 1.916 miliar atau naik sebesar 0,45% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp 1.908 miliar. Ada 2 (dua) komponen besar dalam kenaikan liabilitas Bank yaitu simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain.

Liabilitas

(Dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Dana Wadiah dan Syirkah Temporer	1.630.527	1.710.985	(80.458)	-4,93%
a. Giro Wadiah	251.345	23.295	228.050	90,73%
b. Giro Mudharabah	14	335	(321)	-2264,85%
c. Tabungan Mudharabah	41.214	49.927	(8.713)	-21,14%
d. Deposito Mudharabah	1.337.954	1.637.428	(299.474)	-22,36%
Simpanan dari bank lain	260.000	183.000	77.000	29,62%
Utang pajak	1.858	2.000	(142)	-7,65%
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	5.377	5.360	17	0,32%
Liabilitas lain-lain	19.007	6.863	12.144	63,89%
Jumlah Liabilitas	1.916.770	1.908.208	8.562	0,45%

Dana Syirkah Temporer

Dana *syirkah temporer* merupakan investasi dari pihak ketiga dengan akad *mudharabah mutlaqah* dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasi dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan.

Pada tahun 2020, Dana syirkah temporer Bank sebesar Rp 1.630 miliar atau turun sebesar 4,93% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.711 miliar.

Untuk Giro Wadiah tahun 2020 naik sebesar 90,73% atau Rp 228 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menjadi Rp 251 miliar. Giro Wadiah tahun 2020 turun sebesar 2264,85% atau Rp 0.32 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menjadi Rp 14 miliar.

Tabungan mudharabah tahun 2020 sebesar Rp 41,2 miliar, turun sebesar 21,14% atau Rp 8,7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 49,9 miliar.

Deposito *mudharabah* sebesar Rp 1.337,9 miliar, turun 22,38% atau Rp 299,4 juta dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.637,4 miliar Untuk deposito mudharabah, pada tahun 2020 jangka waktu kurang dari 1 bulan dan 1 bulan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 523,53% dan 21,21%. Sedangkan untuk jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan masing-masing mengalami penurunan 73,40%, 76,57% dan 100%.

Deposito Mudharabah Berdasarkan Jangka Waktu

(Dalam jutaan Rupiah)

Jangka Waktu	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Kurang dari 1 bulan	545.089	87.420	457.669	523,53%
1 Bulan	500.025	412.522	87.503	21,21%
3 Bulan	79.304	298.183	(218.879)	-73,40%
6 Bulan	131.735	562.313	(430.578)	-76,57%
12 Bulan	-	276.990	(276.990)	-100,00%
Jumlah Deposito	1.256.153	1.637.428	(381.275)	-23,28%

Tingkat bagi hasil per tahun untuk giro, tabungan dan deposito mudharabah selama tahun 2020 kecenderungan lebih stabil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tingkat Bagi Hasil

(Dalam jutaan Rupiah)

	2019	2020	2019
Giro Mudharabah	1,00% - 5,00%	1,00% - 5,00%	
Tabungan Mudharabah	0,50% - 5,00%	0,50% - 5,00%	
Deposito Mudharabah	4,00% - 6,00%	4,00% - 6,25%	

Simpanan Dari Bank Lain

Bank membukukan simpanan dari bank lain sebesar Rp 260 miliar pada tahun 2020 atau naik sebesar 29,62% dari posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 183 miliar. Simpanan dari bank lain yang ditempatkan pada Bank merupakan simpanan investasi *mudharabah* antarbank.

Ekuitas

Ekuitas Bank akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp 379,5 Miliar atau naik sebesar Rp 65,3 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp 354,2 miliar. Kenaikan ekuitas tahun 2020 terutama disebabkan karena kenaikan keuntungan yang belum direalisasikan atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia dijual. Di sisi lain bank nilai keuntungan aktual program manfaat pasti sebesar Rp 3,1 miliar yang mengalami penurunan Rp 0,89 miliar atau 28,51% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 4,03 miliar.

Ekuitas

(Dalam jutaan Rupiah)

Komponen	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Modal disetor	360.000	360.000	-	0,00%
Untung (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual	23.325	(3.096)	26.424	113,27%
Pendapatan besar dan eceran	9.156	9.156	-	0,00%
Cadangan umum	3.142	4.036	(894)	-22,15%
Keuntungan aktual program manfaat pasti	(15.555)	(16.769)	913	-5,56%
Laba tahun berjalan	(215)	913	(1.128)	-123,55%
Jumlah Ekuitas	379.557	354.243	25.314	7,15%

Laba sebelum pajak

Ditengah pertumbuhan ekonomi yang masih kurang stabil, selama tahun 2020 Bank membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 3,4 miliar, naik sebesar Rp 2,2 miliar atau 209,24% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.1 miliar. Hal ini lebih disebabkan penurunan beban operasional serta kenaikan dari sumber pendapatan operasional lainnya.

Bank berhasil melakukan efisiensi atas biaya pendukung usaha (*overhead cost*) sebesar Rp4,1 miliar atau 8,33% dari Rp49,3 miliar selama tahun 2019 menjadi Rp 45,3 miliar selama tahun 2020.

PENDAPATAN DAN BEBAN

Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank sebagai Mudharib.

Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib untuk tahun 2020 sebesar Rp 148,8 miliar atau menurun 11,47% dibandingkan pada tahun 2019 yang

mencapai Rp168.0 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan dari pendapatan bagi hasil yaitu sebesar Rp 15,8 miliar atau sebesar 16,96% dari Rp 92,9 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 77,1 miliar di tahun 2020. Penurunan juga terjadi pada pendapatan dari penjualan murabahah yaitu sebesar Rp 1,7 miliar atau sebesar 37,43% dari Rp29,5 miliar di tahun 2019 sehingga menjadi Rp 18,4 miliar di tahun 2020. Disamping itu, pendapatan usaha utama lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp7,7 miliar atau 17,08% yaitu dari sebesar Rp 45,2 miliar di tahun 2019 sehingga menjadi Rp 52,9 miliar di tahun 2020.

(Dalam jutaan Rupiah)

Pendapatan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan dari penjualan murabahah	18.471	29.518	(11.048)	-37,43%
Pendapatan dari Bagi Hasil	77.113	92.866	(15.753)	-16,96%
Pendapatan dari Ijarah bersih	232	420	(189)	-44,90%
Pendapatan usaha utama lainnya	52.935	45.214	7.721	17,08%
Jumlah Pendapatan	148.750	168.019	(19.269)	-11,47%

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak Pihak Ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer di tahun 2020 mengalami penurunan Rp 6,7 miliar atau 5,61% dari sebesar Rp 118,9 miliar di tahun 2019 turun menjadi Rp 112,2 Miliar pada tahun 2020. Faktor utama penurunan ini disebabkan karena penurunan beban bagi hasil pada Deposito yang disebabkan menurunnya saldo deposito, hal ini juga sejalan dengan semakin menurunnya tingkat persaingan pemberian nisbah bagi hasil dana khususnya deposito di pasar, dan manajemen sudah berusaha untuk melakukan penurunan nisbah bagi hasil agar beban bisa diefisiensikan, disamping itu kebijakan manajemen juga menjaga rasio FDR sehingga masih berada pada kisaran 74,05% sehingga likuiditas masih bisa terjaga.

(Dalam jutaan Rupiah)

Beban Bagi Hasil	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
SIMA	6.148	5.965	183	3,06%
Giro	2.820	790	2.030	257,04%
Tabungan Mudharabah	1.897	1.593	304	19,07%
Deposito Mudharabah	101.379	110.568	(9.189)	-8,31%
Jumlah Beban Bagi Hasil	112.244	118.916	(6.672)	-5,61%

Beban Operasional Lainnya

Jumlah Beban Operasional Lainnya tahun 2020 adalah sebesar Rp 48,9 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 4,4 miliar atau 8,21% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp 53,2 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Beban Personalia sebesar Rp 4,7 miliar atau 16,23%, hal ini seiring kebijakan dan strategi manajemen untuk mengevaluasi agar biaya bisa efektif dan efisien, penurunan biaya umum dan administrasi sebesar Rp 1,1 miliar atau 5,42%, di lain sisi terdapat kenaikan beban lainnya sebesar Rp 1,7 miliar atau 221,29%.

Manajemen berpendapat bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pembiayaan yang telah dibentuk telah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan.

(Dalam jutaan Rupiah)

Beban Operasional Lainnya	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.804	3.862	(259)	-6,70%
Beban Personalia	24.427	29.161	(4.734)	-16,23%
Beban Umum dan Administrasi	18.399	19.452	(1.054)	-5,42%
beban Lainnya	2.430	756	1.674	221,29%
Jumlah Beban Operasional Lainnya	48.860	53.232	(4.372)	-8,21%

Rencana Strategis ke Depan

Didasari atas beratnya tantangan ke depan, maka kebijakan Bank adalah menitikberatkan pada proses relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan, pengurangan margin pembiayaan, penundaan pembayaran sebagian pembiayaan dan penambahan pembiayaan modal kerja secara selektif, hal ini bertujuan agar kualitas dan pertumbuhan bisnis Bank tetap sehat dan kuat.

Untuk itu, kebijakan dan strategi bank dalam Rencana Bisnis Bank baik jangka menengah maupun jangka panjang akan didasarkan pada road map yang meliputi antara lain percepatan pertumbuhan pembiayaan dengan tetap memperhatikan kualitasnya, percepatan dan perbaikan proses bisnis, penyempurnaan organisasi, strategi pengembangan jaringan, diversifikasi produk serta program-program efisiensi dan produktivitas.

Beberapa kebijakan menjadi titik sentral seperti penguatan infrastruktur dan SDI, antara lain peningkatan dan kapabilitas SDI, pengembangan *talent*, *technical skill* dan kompetensi serta pengembangan TI yang mendukung bisnis dan layanan.

Sasaran, Strategi dan Kebijakan Manajemen

Pada periode selanjutnya Bank akan menjaga pertumbuhan bisnis dan kinerja usaha yang lebih berkualitas. Upaya-upaya perbaikan proses dilakukan pada berbagai aspek baik sisi bisnis, operasional, dan pendukung lainnya serta SDI akan terus didorong untuk mencapai kinerja usaha yang lebih baik dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020

Dalam 3 tahun kedepan Bank Victoria Syariah diarahkan telah mempunyai landasan yang kokoh untuk menjadi Bank syariah berskala menengah serta mempunyai *brand image* yang baik ditengah masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan Bank di atas, Bank telah menetapkan langkah-langkah strategis yang sekurangnya menyangkut 7 (Lima) aspek besar sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja dan pertumbuhan aset berkualitas yang ramah dan peduli lingkungan untuk memaksimalkan rentabilitas.
- 2) Mengoptimalkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan mempertimbangkan keseimbangan likuiditas.

- 3) Mendorong dan meningkatkan efisiensi beban dana dan biaya operasional.
- 4) Melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan.
- 5) Melaksanakan transformasi budaya kerja perusahaan yang berkelanjutan.
- 6) Meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan sinergi dengan Group
- 7) Mengoptimalkan peranan semua unit pendukung dan mendayagunakan teknologi sistem informas.

HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN

Profil Pejabat Eksekutif





M. Fajar Hermawan
Kepala SKAI

Lahir di Jakarta 22 Januari 1970
D3 Marketing Manajemen, Akademi Pimpinan Perusahaan, Tahun 1993

- 1993-1995** : PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai Staf Operasional Cabang Cipulir
- 1995-1996** : PT. Bank Sinergy dan PT. Bank Ratu sebagai Staff Operasional
- 1998-2005** : PT. Bank Mega dengan posisi terakhir sebagai Auditor SKAI
- 2011-2013** : PT. Bank Capital sebagai Staf Sistem dan Prosedur
- 2013-2015** : PT. Bank Victoria International, Tbk. sebagai Kepala Bagian Sistem dan Prosedur
- Sejak 2015 s/d sekarang** di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala SKAI



Tumbur Parulian Limbong
Chief Finance Officer

Lahir di Jakarta 19 Juli 1974
Sarjana Ekonomi, Universitas Borobudur Jakarta, Tahun 1996

- 1997-1999** : PT Bank Victoria International, Tbk sebagai staf Akunting
- 1999-2000** : PT Bank Victoria International, Tbk sebagai Staf Biro Direksi
- 2000-2003** : PT Bank Victoria International, Tbk sebagai Staf Akunting
- 2003-2005** : PT Bank Victoria International, Tbk sebagai Kepala Seksi Akunting
- 2005-2007** : PT Bank Victoria International, Tbk sebagai Kepala Bagian Akunting & Pengawasan Keuangan
- 2007-2018** : PT Bank Victoria International, Tbk sebagai Kepala Divisi Akunting & Pengawasan Keuangan
- 2018-2019** : PT Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Keuangan & Umum
- September 2019 s/d sekarang** PT Bank Victoria Syariah sebagai Chief Finance Officer



Agung Prasetiawan
Kepala Divisi Rivu Pembiayaan,
Hukum dan Admin Support

Lahir di Banjarnegara 15 Juli 1980
Sarjana Teknik, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta
Sarjana MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta

- 2006-2008** : PT. Duta Citra *Design Consultant*, sebagai staff ahli Teknik Lingkungan
- 2008-2009** : PT. Bank Danamon, sebagai *Sales Officer*
- 2009-2010** : PT. Bank Mega Syariah, sebagai Unit *Manager* KCP Pasar Kemis Tangerang
- 2010-2011** : PT. BRI Syariah, sebagai Kepala Unit Kedoya
- 2011-2019** : PT. Bank Victoria Syariah, sebagai Kepala Bagian Rivu Pembiayaan
- Sejak 31 Mei 2019 s/d sekarang** di PT. Bank Victoria Syariah, sebagai Kepala Divisi Rivu Pembiayaan, Hukum dan admin Support



Endro Purwoko
Kepala Divisi TSI

Lahir di Jakarta 23 Juni 1969
Sarjana Management Informatika, STMIK Gunadarma Depok, Tahun 1994

- 1995-1999** : PT. Bank Dagang dan Industri, Tbk sebagai IT and *Operation Staff*
- 2000-2011** : PT. Bank ICB Bumiputera Tbk dengan berbagai jabatan antara lain IT & *Support Unit, ATM, E-Banking, Core Banking System*
- 2011-2017** : PT. Bank Victoria International, Tbk sebagai Kepala Bagian Teknologi Sistem Informasi
- Sejak 1 Oktober 2017 s/d sekarang** di PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi



Medi Sejati
Kepala Divisi Kepatuhan

Lahir di Jakarta 29 September 1965
D3 Manajemen Perbankan, AKPI, Tahun 1989

1984-1986 : PT Jasa Marga sebagai Kolektor/ Pengumpul Tol
1990-1991 : PT. Bank Swadesi sebagai *Teller*
1991-1999 : PT. Bank Intan sebagai Kepala Seksi Kredit *Support*
1999-2002 : Kantor Akuntan Publik Edi Kaslim dan Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Djuwono (GPJ) sebagai Auditor
2002-2007 : PT. Bank Harmoni sebagai Kepala Bagian Akunting
2007-2008 : PT. Bank Index Selindo sebagai Kepala Bagian Akunting
2008-2010 : PT. Bank Swaguna sebagai Kepala Divisi Akunting
2010-2019 : PT Bank Victoria Syariah dengan jabatan saat ini sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan
Sejak September 2019 s/d sekarang di PT Bank Victoria Syariah dengan jabatan saat ini sebagai Kepala Divisi Kepatuhan



M Rinaldi Taufik S
Kepala Divisi SDI dan Umum

Lahir di Bandung 06 November 1967
Sarjana Informatika, ST Inten Bandung, Tahun 1993

1996-2011 : PT. Bank International Indonesia dengan berbagai jabatan yaitu Kepala Bagian *EDP, Dept. Head Development Analyst, E-Learning & Library Management* dan *Dept. Head Hubungan Industrial & Outsourcing*
2011-2012 : *Smart Multi Finance (SMF)* dengan jabatan sebagai Kepala Bagian *HR Policy & System*
2012-2016 : PT. Bank Victoria International, Tbk sebagai Kepala Bagian pada *Human Capital Management*
2017-2019 : PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Insani
Sejak September 2019 PT. Bank Victoria Syariah sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Insani dan Umum



Suyat

Wakil Kepala Divisi Operasional

Lahir di Yogyakarta 21 Juni 1978

Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Jakarta

2002-2008 : PT. Bank Kesawan (QNB) dengan jabatan terakhir Kepala Seksi Operasional KC Tanah Abang

2008-2011 : PT. Bank Mega Syariah dengan jabatan terakhir Regional Internal Control Manager

Sejak 2011 di PT. Bank Victoria Syariah dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Operasional

Sejak 2019 di PT. Bank Victoria Syariah dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Kepala Divisi Operasional

Profil Komite



Teguh Sukaryanto
Anggota Komite Audit

WNI, lahir di Tanjungkarang pada tahun 1962.

Sarjana Ekonomi dari Universitas Lampung pada tahun 1987.

-
- 1984-1986** : PT Jasa Marga sebagai Kolektor/ Pengumpul Tol
- 1990** : Mulai berkarir di perbankan sebagai Internal Audit di Bank Duta dan selanjutnya berbagai jabatan pernah dipegang pada Bank Yakin Makmur, Bank Akita dan Bank Barclays Indonesia.
- 2011-2012** : Bank Victoria sebagai Kepala Divisi Kepatuhan
- 2012-2015** : Bank Victoria sebagai Kepala Divisi Sistem dan Prosedur tahun
- 2015-2018** : Bank Victoria sebagai Kepala Divisi *Audit Internal / Integrated and Anti Fraud*
- Maret 2018 - saat ini** : Bank Victoria sebagai Komite Audit sampai saat ini
- September 2018 - saat ini** : Bank Victoria Syariah sebagai anggota Komite Audit

BAB 5 - Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
 Komitmen Dalam Tata Kelola Perusahaan
 Kerangka Kerja Dalam Tata Kelola Perusahaan
 APU-PPT dan Prinsip Pengenalan Nasabah
 Rapat Umum Pemegang Saham
 Dewan Komisaris
 Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris
 Direksi
 Komite Eksekutif Direksi
 Dewan Pengawas Syariah
 Penerapan Fungsi Kepatuhan
 Fungsi Audit Internal atau SKAI
 Penyimpangan dan Fraud Internal
 Audit Eksternal
 Kerangka Manajemen Risiko
 Penerapan Manajemen Risiko
 Pengendalian Internal
 Permasalahan Hukum
 Nilai-Nilai Budaya Perusahaan
 Transaksi dengan Benturan Kepentingan
 Kode Etik
 Perlindungan Nasabah
 Keterbukaan Informasi
 Penilaian GCG Secara Self Assessment
 Laporan Self Assessment Manajemen Risiko
 Tahun 2020





Tata Kelola Perusahaan



1. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Dalam rangka menciptakan Bank yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi, dan memperhatikan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, Bank harus tetap mengedepankan penerapan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini penting agar Bank tidak terimbas kerugian ikutan dari pandemi COVID-19.

1. Pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* Bank Victoria Syariah mengacu pada:
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan menjaga keberlangsungan usaha. Oleh karenanya Bank Victoria Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup *transparency, accountability, responsibility, professional, independency* dan *fairness* secara terus-menerus dan berupaya untuk meningkatkan sistem dan praktik tata kelola dari tahun ke tahun, agar tetap dapat bertanggung jawab, transparan, dan berlaku adil.

Prinsip-prinsip GCG menjadi referensi dalam pengambilan keputusan, optimalisasi kinerja, menghindari konflik kepentingan, keterbukaan informasi serta peningkatan akuntabilitas. Dalam mencapai visi dan misinya, Bank Victoria Syariah telah mengimplementasi prinsip-prinsip tersebut untuk meningkatkan nilai dan menjaga kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.

2. Komitmen Dalam Tata Kelola Perusahaan

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas Bank Victoria Syariah dan keragaman produk dan jasa yang ditawarkan,

menjadikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting untuk diterapkan guna membangun kepercayaan yang lebih baik dan memberikan kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Komitmen Bank Victoria Syariah dalam menerapkan GCG tercermin dari disahkannya Kebijakan dan prosedur *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan SK Direksi Nomor 033/DIR-SK/JKT/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang telah dilakukan perubahan ketiga atas kebijakan dan prosedur tersebut. Pedoman tersebut menjadi landasan bagi Bank untuk menerapkan prinsip GCG pada seluruh aktivitas operasionalnya. Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk menguatkan dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di seluruh aspek kegiatan usaha.

Bank Victoria Syariah memiliki Parameter Keberhasilan Bank dalam mencapai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi dapat maju apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif, yang bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari Sumber Daya Insani Bank yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang tepat dalam memaksimalkan kinerja organisasi.

Bank terus mendorong Sumber Daya Insani untuk selalu berkarya dengan menerapkan nilai-nilai perusahaan yaitu *honest, energetic, brilliant, accurate* dan *trust* atau **HEBAT**.

Peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan mendorong peningkatan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Kinerja Perseroan yang dicapai pada periode 2020 sebagai berikut:

1. Laba mencapai Rp 3.412 Juta
2. Pertumbuhan Aset 1,5% menjadi Rp 2.296 Miliar
3. Pembiayaan menjadi Rp 1,167 Miliar
4. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 4,64% menjadi Rp 1.576 Miliar
5. Total Ekuitas menjadi Rp 380 Miliar
6. *Non Performing Financing* (NPF) *Netto* 2,96 %.

3. Kerangka Kerja Dalam Tata Kelola Perusahaan

Bank Victoria Syariah senantiasa melakukan penguatan proses penerapan GCG yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten dari waktu ke waktu. Penguatan Penerapan GCG mengacu kepada regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK). Dan langkah strategis dan rencana bisnis bank disusun sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan visi dan misi dan nilai-nilai Bank Victoria Syariah.

Deklarasi Anti Fraud

Bank Victoria Syariah menyatakan komitmennya untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan standar hukum yang tinggi dan tidak melakukan tindakan *fraud* dan tindakan tidak sesuai lainnya.

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct)

Bank Victoria Syariah dalam melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku menerapkan standar etika yang merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan manajemen Bank diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Pedoman Etika dan Perilaku berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh karyawan dan manajemen Bank Victoria Syariah serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan Bank Victoria Syariah yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kebijakan *Anti Fraud*.

Customer Awareness

Bank Victoria Syariah melaksanakan edukasi untuk meningkatkan *customer awareness* dengan melalui pemasangan *banner* di Cabang dengan maksud mengingatkan nasabah atas penggunaan layanan yang benar dan tepat, termasuk tanggung jawab ke dua belah pihak baik bank maupun nasabah. Dan juga Bank Victoria Syariah turut aktif mendukung Program Literasi dan Inklusi Keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan *customer awareness*.

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Victoria Syariah dilaksanakan mengacu pada ketentuan Undang-undang No 8 Tahun 2010 (UU TPPU) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

4. APU-PPT dan Prinsip Pengenalan Nasabah

Dalam rangka menerapkan APU-PPT atau Prinsip Mengenal Nasabah, secara konsisten dan berkelanjutan Unit Kerja APU-PPT Bank Victoria Syariah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Menyusun program-program dalam rangka penerapan APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Menyusun kebijakan dan prosedur APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah untuk seluruh karyawan.
- Melakukan pengawasan/audit terhadap penerapan APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah
- Menyiapkan organisasi yang bertanggung jawab atas penerapan APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Menyiapkan sistem teknologi informasi untuk mendukung penerapan APU-PPT dan Prinsip Mengenal Nasabah

Melalui upaya-upaya sebagaimana dijelaskan di atas, Bank Victoria Syariah berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

5. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah salah satu organ di dalam Bank sebagai Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan Pemegang Saham dan atau Dewan Komisaris dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, Agenda RUPS Luar Biasa juga bermacam-macam tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu misalnya perubahan susunan Direksi dan Komisarisnya, perubahan nama dan tempat kedudukan, penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, dan lain-lain.

Sesuai Anggaran Dasar Bank Victoria Syariah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bank Swaguna (Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan UUPT No. 40/2007) No. 5 tanggal 06 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohaini, SH., MBA, Notaris di Jakarta, dalam RUPS Tahunan:

Direksi menyampaikan antara lain:

- Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.4 pasal 20 yang telah di telaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
- Laporan Keuangan Tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.4 pasal 20 untuk mendapat pengesahan RUPS;
- Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, Bank Victoria Syariah senantiasa berpedoman pada peraturan OJK dan Anggaran Dasar Bank, antara lain:

- a. Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan/pertanyaan sesuai dengan Mata Acara Rapat.
- b. Pemanggilan RUPS telah mencakup informasi mengenai tanggal penyelenggaraan, waktu dan tempat penyelenggaraan, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir, mata acara termasuk penjelasan atas setiap mata acara RUPS dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan.
- c. Pemegang Saham dapat melihat Pengumuman Pemanggilan RUPS melalui media masa.

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Sepanjang tahun 2020 Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan, yaitu pada tanggal 26 Juni 2020. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2019 No. 64 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Surjadi, SH., MKn., MM., MH. Notaris di Jakarta. Sebagai berikut:

Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan Penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Keputusan RUPS Tahunan

1. Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019.
2. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan Penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya, dan untuk persetujuannya akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Sepanjang tahun 2020 Bank telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS – LB yaitu pada tanggal 26 Juni 2020, dan 21 Oktober 2020. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS LB No. 65 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat oleh Surjadi, SH., MKn., MM., MH. Notaris di Jakarta dan telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0273433 tanggal 03 Juli 2020 isinya menyetujui perubahan Direksi dan Komisaris PT. Bank Victoria Syariah berkedudukan di Jakarta Selatan.

Mata Acara RUPSLB tanggal 26 Juni 2020, adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Tuan Djoko Nugroho dan sekaligus telah berakhir masa jabatan selaku Komisaris Independen Perseroan.
2. Mengangkat Nona Retno Dwiyantri W, selaku Komisaris Independen Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat kembali Anggota Direksi dan Komisaris (Kecuali Tuan Djoko Nugroho karena mengundurkan diri dan telah habis masa jabatannya sebagai Komisaris Independen) dengan masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama 2 (dua) tahun, yang akan berakhir pada saat dilaksanakannya RUPST pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Dengan demikian Susunan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, yang berlaku sejak RUPSLB ini dan setelah diperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*), adalah sebagai berikut:

- Direksi Perseroan

Direktur Utama : Tuan Sugiharto
 Direktur : Tuan Ir. Andy Sundoro
 Direktur : Tuan Deddy Effendi Ridwan
 Direktur Kepatuhan : Nyonya Nurani Raswindriati
 Dan Manajemen Risiko

- Dewan Komisaris

Komisaris Utama
 /Komisaris Independent : Tuan Achmad Friscantono,
*Master of Business Administration**

Komisaris Independent : Nona Retno Dwiyantri W.*

Komisaris : Nyonya Sari Idayanti

- Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Tuan Profesor Doktor Haji
 Hasanuddin, AF, MA
 Anggota : Nyonya Profesor Doktor Hajjah
 Huzaemah Tahido Yanggo, MA

* Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB No. 46 tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat oleh Suwarni Sukiman, SH. dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0402695 tanggal 28 Oktober 2020 isinya menegaskan pengangkatan Tuan Achmad Friscantono, *Master of Business Administration* sebagai Komisaris Utama Independen efektif terhitung sejak tanggal lima belas oktober dua ribu dua puluh (15-10-2020) berdasarkan Keputusan atas Pencalonan Komisaris Utama Independen dari Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

6. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta member nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pelaksanaannya Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan Nomor 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 beserta perubahannya yaitu:

- Surat Keputusan Bersama Nomor 002/DIR-SK/JKT/II/2018 dan Nomor 002/DEKOM/JKT/II/2018 tanggal 10 Januari 2018.
- Surat Keputusan Bersama Nomor 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 dan Nomor 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020.
- Surat Keputusan Bersama Nomor 064/DIR-SK/JKT/XI/2020 dan Nomor 025/DEKOM/JKT/XI/2020 tanggal 9 November 2020.

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013, Komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

- i. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga orang) dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- ii. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- iii. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama
- iv. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Notaril Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Victoria Syariah No.65 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Surjadi, SH., MKn., MM. di Jakarta menyetujui pengunduran diri Bapak Djoko Nugroho selaku Komisaris Independen dan mengangkat penggantinya sehingga susunan anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Nama Dewan Komisaris	Jabatan
Achmad Friscantono *)	Komisari Utama/Komisaris Independen
Retno Dwiyantri *)	Komisaris Independen
Sari Idayanti	Komisaris

*) - efektif setelah mendapat persetujuan Fit and proper test OJK.

- efektif tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Achmad Friscantono telah mendapat persetujuan dari OJK.

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari 3 (tiga) orang Dewan Komisaris yang kesemuanya berdomisili di Indonesia dan 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Dengan demikian anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

b. Independensi Dewan Komisaris

Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan keuangan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali.

Terkait dengan pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris, sampai dengan akhir Desember 2020 Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- i. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- ii. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat/arahan kepada seluruh Direksi.
- iii. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- iv. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan.
- v. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

d. Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, antara lain sebagai berikut:

- i. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan.
- ii. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi.

- iii. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam untuk jangka waktu tertentu.
- iv. Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang.
- v. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- vi. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam anggaran dasar berlaku pula baginya.
- vii. Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.

e. Board Manual

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan Nomor 035/DIR-SK/JKT/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) beserta perubahannya, yaitu:

- Surat Keputusan Bersama Nomor 002/DIR-SK/JKT/I/2018 dan Nomor 002/DEKOM/JKT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.
- Surat Keputusan Bersama Nomor 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 dan Nomor 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020.
- Surat Keputusan Bersama Nomor 064/DIR-SK/JKT/XI/2020 dan Nomor 025/DEKOM/JKT/XI/2020 tanggal 9 November 2020.

Yang mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

f. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.65 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, SH., MKn., MM. Di Jakarta, masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris berlaku sampai dengan ditutupnya atau dilaksanakannya RUPS Tahunan pada tahun 2022.

g. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

- i. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui data yang diperoleh dari sistem informasi manajemen, laporan-laporan rutin, informasi lainnya, dan hasil pemantauan/ review oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemberian arahan/ nasehat/rekomendasi dilakukan melalui memorandum maupun secara langsung dalam kesempatan rapat dengan Direksi.

- ii. Dalam tahun 2020, Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi, antara lain: mengenai penyusunan rencana bisnis bank, evaluasi pencapaian target bisnis bank, penunjukan Kantor Akuntan Publik, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, perbaikan GCG, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh *regulator*, KAP dan SKAI.
- iii. Membuat revisi dan menyetujui tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), mengesahkan revisi beberapa Pedoman/Kebijakan dan Prosedur Bank yang memerlukan persetujuan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain kebijakan pembiayaan, Tresuri, *Good Corporate Governance* (GCG), *Risk Based Internal* (RBIA), *Strategi Anti Fraud*, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT), dan Sumber Daya Insani (SDI).
- iv. Membuat laporan yang wajib disampaikan kepada *Regulator*.
- v. Menyetujui pemberian dan atau perpanjangan pembiayaan dalam rangka pengawasan diatas jumlah tertentu.
- vi. Menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada seluruh kegiatan Bank Victoria Syariah dan melanjutkan penyelarasan (harmonisasi) dengan ketentuan OJK sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai Bank Victoria Syariah.

h. Rapat Kerja Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1(satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2020, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris seperti pada tabel berikut:

Nama Pejabat	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris	
	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Kehadiran	Persentase
Achmad Friscanto *)	9	100%	14	93%
Djoko Nugroho **)	4	45%	7	47%
Retno Dwiyantri W *)	5	55%	5	33%
Sari Idayanti	9	100%	15	100%
Total Rapat	9		15	

*) - efektif setelah mendapat persetujuan Fit and proper test OJK

- efektif tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Achmad Friscantono telah mendapat persetujuan OJK

**) efektif mengundurkan diri per Juni 2020

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Jakarta.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

i. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Tidak terdapat kepemilikan saham Dewan Komisaris pada Bank.

7. Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris

Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu dengan 3 (tiga) komite, yakni Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

a. Komite Audit

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*) dan efektivitas pemeriksaan oleh internal dan auditor eksternal, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yang telah diselaraskan dengan POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi *Audit Intern* Pada Bank Umum; antara lain meliputi :

- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
- Mereviu dan menyetujui Piagam Audit *Intern* (*Internal Audit Chartered*)
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
- Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
- Memastikan SKAI bekerja secara independen; menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI serta penghargaan kinerja
- Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 /POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36 /SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor

Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yakni:

- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- Laporan berkala setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
- Mengevaluasi Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan OJK, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau audit ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

2. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

- Struktur
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 10 April 2019 No. 073B/DIR-SK/JKT/IV/2019, susunan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:
- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Djoko Nugroho | : Komisaris Independen /Ketua Komite |
| Sari Idayanti | : Komisaris/Anggota |
| Retno Dwiyantri W | : Anggota |
| Teguh Sukaryanto | : Anggota |

Sehubungan hasil RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Notaril Risalah RUPS Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No.65 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Surjadi, SH., MKn., MM. di Jakarta, menyetujui pengunduran diri Bapak Djoko Nugroho selaku Komisaris Independen dan mengangkat penggantinya sehingga susunan anggota Dewan Komisaris,

sehingga susunan anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Komisaris Utama/Independen	: Achmad Friscantono *)
Komisaris Independen	: Retno Dwiyantri W *)
Komisaris	: Sari Idayanti

*) efektif setelah mendapat persetujuan Fit and proper test OJK.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 033A/DIR-SK/JKT/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 susunan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

Sari Idayanti *)	: Komisaris/Ketua Komite
Teguh Sukaryanto	: Anggota

*) Sebagai Ketua Komite sampai diperoleh hasil Fit and proper test Komisaris Independen Ibu Retno Dwiyantri W dari OJK

Dengan disetujuinya Bapak Anton Friscantono sebagai Komisaris Utama/Independen oleh OJK per tanggal 12 Oktober 2020, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.060A/DIR-SK/JKT/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 susunan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

Sari Idayanti *)	: Komisaris/
Ketua Komite	
Achmad Friscantono	: Komisaris Utama/
Anggota	
Teguh Sukaryanto	: Anggota

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank akan segera disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah setelah pencalonan Komisaris Independen mendapat persetujuan dari OJK.

- Komite Audit telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja yang akan terus diperbaharui apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan.

3. Rapat Komite

- Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite sebanyak 16 (enam belas) kali, yang membahas bermacam agenda yang berkaitan dengan lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit, antara lain membahas Hasil Penelaahan atas temuan SKAI, Perkembangan Kinerja Bank, serta Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* (GCG).

Keseluruhan rapat tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- Komite Audit telah menerbitkan 17 (tujuh belas) Memo Internal dalam rangka pengawasan sebagai berikut:

No	Memorandum	Tentang
1	No.002/KA/BVIS/3/2020 tanggal 5 Maret 2020	Penelaahan Laporan Keuangan serta Pengendalian Internal BVIS TW IV 2019
2	No.003/KA/BVIS/5/2020 tanggal 8 Mei 2020	Review LHP SKAI Divisi Review Pembiayaan, Hukum, Admin Support & SAM per 31 Des' 2019
3	No.003A/KA/BVIS/5/2020 tanggal 18 Mei 2020	Rekomendasi Komite Audit Penunjukkan KAP
4	No.004/KA/BVIS/5/2020 tanggal 28 Mei 2020	Penelaahan Laporan Keuangan serta Pengendalian Internal BVIS TW I 2020
5	No.005/KA/BVIS/6/2020 tanggal 11 Juni 2020	Laporan Evaluasi Kinerja KAP Mirawati Senni Indris – Audit 2019
6	No.006/KA/BVIS/7/2020 tanggal 14 Juli 2020	Review LHP SKAI untuk Divisi Kepatuhan posisi Mei 2020
7	No.007/KA/BVIS/8/2020 tanggal 10 Agustus 2020	Rekomendasi Penunjukkan KAP & AP untuk General Audit atas Laporan Keuangan PT.BVIS tahun Buku 31 Desember 2019.
8	No.008/KA/BVIS/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020	Penelaahan Laporan Keuangan serta Pengendalian Internal BVIS TW II 2020
9	No.009/KA/BVIS/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020	Review LHP Bagian Umum posisi 31 Mei 2020
10	No.010/KA/BVIS/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020	Review LHP KCU posisi 30 Juni 2020
11	No.011/KA/BVIS/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020	Review LHP KCP Tebet posisi 31 Juli 2020
12	No.012/KA/BVIS/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020	Penelaahan Laporan Keuangan serta Pengendalian Internal BVIS TW III 2020
13	No.013/KA/BVIS/11/2020 tanggal 26 November 2020	Review LHP SKAI untuk Divisi Operasional posisi 31 Agustus 2020
14	No.014/KA/BVIS/12/2020 tanggal 17 Desember 2020	Review LHP SKAI untuk Capem Tanggerang posisi 30 September 2020
15	No.015/KA/BVIS/12/2020 tanggal 17 Desember 2020	Review LHP SKAI untuk Bagian Analisis Risiko posisi 31 Oktober 2020
16	No.016/KA/BVIS/12/2020 tanggal 30 Desember 2020	Rekomendasi Komite Audit atas Berakhirnya Masa Kerja Kepala SKAI Sdr. M Fajar Hermawan.
17	No.017/KA/BVIS/12/2020 tanggal 30 Desember 2020	Rekomendasi Komite Audit atas Penetapan Pjs Kepala SKAI Sdr. Irvan Dermawan.

b. Komite Pemantau Risiko

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan *asset & liability*, likuiditas, pembiayaan serta operasional.
- Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.

- Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, bila diperlukan.

2. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

• Struktur

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 25 September 2018 No. 056/DIR-SK/JKT/IX/2018, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Djoko Nugroho : Komisaris Independen/
Ketua Komite

Retno Dwiyantri W : Anggota

Teguh Sukaryanto : Anggota

Sehubungan hasil RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Notariil Risalah RUPS Luar Biasa PT.Bank Victoria Syariah No.65 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Surjadi, SH., MKn., MM di Jakarta, menyetujui pengunduran diri Bapak Djoko Nugroho selaku Komisaris Independen dan mengangkat penggantinya, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Komisaris Utama : Achmad Friscantono *)
Independen

Komisaris Independen : Retno Dwiyantri W *)

Komisaris : Sari Idayanti

*) efektif setelah mendapat persetujuan Fit and proper test OJK.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 033B/DIR-SK/JKT/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Sari Idayanti *) : Komisaris/
Ketua Komite

Teguh Sukaryanto : Anggota

*) Sebagai Ketua Komite sampai diperoleh hasil Fit and proper test Komisaris Independen dari OJK

Dengan disetujuinya Bapak Anton Friscantono sebagai Komisaris Utama/ Independen oleh OJK per tanggal 12 Oktober 2020, maka keanggotaan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.060B/DIR-SK/JKT/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 menjadi sebagai berikut:

Achmad Friscantono : Komisaris Utama/
Independen/
Ketua Komite

Sari Idayanti : Komisaris/Anggota

Teguh Sukaryanto : Anggota

- Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank akan segera disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah setelah pencalonan Komisaris Independen mendapat persetujuan OJK.
- Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja yang akan terus diperbaharui apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan.

3. Rapat Komite

- Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 9 (sembilan) kali rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite. Rapat membahas bermacam agenda yang berkaitan dengan lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, perkembangan Profil Risiko dan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, serta hal-hal lainnya. Keseluruhan rapat tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menerbitkan 8 (delapan) Memo Internal Pengawasan, yakni:

No	Memorandum	Tentang
1	No.001/KPR/BVIS/II/2020 tanggal 09 Januari 2020	Laporan Tahunan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Victoria Syariah Tahun 2019
2	No.002/KPR/BVIS/II/2020 tanggal 10 Februari 2020	Penelaahan Profil Risiko Bank per 31 Desember 2019
3	No.003/KPR/BVIS/II/2020 tanggal 10 Februari 2020	Penelaahan Laporan Kepatuhan TW IV-2019
4	No.004/KPR/BVIS/VI/2020 tanggal 20 Mei 2020	Penelaahan Profil Risiko Bank per 31 Maret 2020
5	No.005/KPR/BVIS/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020	Penelaahan Profil Risiko Bank per 30 Juni 2020
6	No.006/KPR/BVIS/III/2020 tanggal 24 Agustus 2020	Penelaahan Laporan Kepatuhan TW II-2020
7	No.007/KPR/BVIS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020	Penelaahan Profil Risiko Bank per 30 September 2020
8	No.008/BVIS/KPR/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020	Penelaahan Laporan Kepatuhan TW III-2020

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

i. Tugas dan Tanggung Jawab

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- Melakukan evaluasi Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).

ii. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

- Struktur
Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 23 Oktober 2020 No. 060C/DIR-SK/JKT/X/2020 tentang Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Victoria Syariah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua Komite : Achmad Friscantono
Anggota : Sari Idayanti
Anggota : M. Rinaldi Taufik S.
- Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

iii. Rapat Komite

Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 8 (delapan) kali. Rapat Komite yang dilaksanakan membahas dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. UMP 2020 dan Rencana Replacement dan Mutasi Karyawan.
2. Rekomendasi Pencalonan Kembali Bapak Achmad Friscantono sebagai Komisaris Utama Bank Victoria Syariah dan Usulan Penyesuaian Upah Kepada Karyawan yang Gaji Pokoknya Mendekati UMP 2020.
3. Pengunduran Diri Bapak Djoko Nugroho sebagai Komisaris Independen.
4. Pengunduran Diri Ibu Retno Dwiyaning Widaningsih sebagai Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, Susunan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi setelah RUPS LB tanggal 26 Juni 2020, Merekomendasikan Ibu Sari Idayanti

sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dan Rekomendasi Usulan Kandidat Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

5. Rekomendasi Pencalonan Ibu Retno Dwiyantri Widaningsih sebagai Komisaris Independen dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Ibu Retno Dwiyantri Widaningsih.
6. Persiapan Masa Pensiun Karyawan, Perpanjangan PKWT Komite Audit dan Pemantau Risiko, Promosi Karyawan dan Penutupan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
7. Perubahan Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
8. Program Efisiensi dan Reorganisasi.

8. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar serta mengelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam pelaksanaannya Tugas dan Tanggung Jawab Direksi diatur dalam Surat Keputusan Bersama sebagaimana dalam SK Dewan Komisaris No.007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan SK Direksi No. 020A/DIR-SK/IV/2017 tanggal 14 April 2020 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan SK Direksi No. 064/DIR-SK/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2020, susunan komposisi anggota Direksi sesuai hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 26 Juni 2020 dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013.

Anggota Direksi Bank diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-2 (dua) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/penggantian anggota Direksi, masa kerja anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja anggota Direksi lainnya.

Anggaran Dasar menetapkan bahwa Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk 2 (dua) tahun berikutnya. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Notaril Risalah RUPS Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 65 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Surjadi,SH.,MKn.,MM di Jakarta menyetujui pengangkatan kembali Anggota Direksi.

Seluruh anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:

Nama Direksi	Jabatan
Sugiharto	Direktur Utama
Andy Sundoro	Direktur
Deddy Effendi Ridwan	Direktur
Nurani Raswindriati	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

b. Independensi Direksi

Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain.

Terkait dengan ketentuan perangkapan jabatan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lain. Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Bank selalu menjaga independensi antara lain:

- Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum maupun proyek yang bersifat khusus.
- Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank.
- Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris SK Dewan

Komisaris No.007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan SK Direksi No. 020A/DIR-SK/IV/2017 tanggal 14 April 2020 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan SK Direksi No. 064/DIR-SK/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Tugas Direksi antara lain sebagai berikut :

- i. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah
- ii. Direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- iii. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja *Audit Intern* Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil pengawasan otoritas lainnya
- iv. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- v. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Umum Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- vi. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- iv. Melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis perseroan, disyaratkan adanya persetujuan RUPS.
- v. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- vi. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

e. Board Manual

Tugas dan tanggung jawab Direksi Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor SK Dewan Komisaris No.007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan SK Direksi No. 020A/DIR-SK/IV/2017 tanggal 14 April 2020 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan SK Direksi No. 064/DIR-SK/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual* yang mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

f. Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat minimal setiap bulan dan apabila dipandang perlu, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala bersama Dewan Komisaris melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2020, telah diselenggarakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali rapat Direksi dan 13 (tiga belas) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Pejabat	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Kehadiran	Persentase
Direksi				
Sugiharto	48	100%	15	100%
Andy Sundoro	48	100%	15	100%
Deddy Effendi Ridwan	48	100%	15	100%
Nurani Raswindriati	47	98%	15	100%
Total Rapat	48		15	

d. Kewenangan Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, antara lain sebagai berikut:

- i. Mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu yang ditentukan.
- ii. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- iii. Melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadinya jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus disetujui RUPS.
- iv. Melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis perseroan, disyaratkan adanya persetujuan RUPS.

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dan seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Untuk memastikan bahwa operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja *Audit Internal*, Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan.

g. Kepemilikan Saham Direksi

Terkait dengan ketentuan GCG mengenai pengungkapan kepemilikan saham, tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga keuangan lainnya.

9. Komite Eksekutif Direksi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

a. Komite Aset, *Liabilities Committee* & *Temporary Syirkah Fund Management (ALSyCO)*

Komite ALSyCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No.007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan SK Direksi No. 020A/DIR-SK/IV/2017 tanggal 14 April 2020 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan SK Direksi No. 064/DIR-SK/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

i. Struktur anggota ALSyCO adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama, sebagai Ketua ALSyCO
- Direktur Bisnis, sebagai Wakil Ketua ALSyCO
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagai Anggota
- Direktur Operasi, sebagai Anggota
- Kepala Bagian Unit kerja *Treasury*, sebagai Sekretaris.

Tim pendukung ALSyCO untuk mempersiapkan pembahasan yang lebih komprehensif, antara lain:

- Kepala Bagian Unit Kerja *Treasury* sebagai Koordinator
- *Chief Financial Officer*, sebagai Wakil Koordinator
- Kepala Divisi Komersial, Jaringan Cabang dan Pendanaan Produk

- Koordinator Unit Kerja Pendanaan dan Produk
- Kepala Bagian Analisis Risiko

ii. Rapat Komite ALSyCO wajib dilakukan minimum 1(satu) kali dalam sebulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan sehubungan perkembangan dinamika pasar uang. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan petunjuk strategis yang disesuaikan dengan perkembangan pasar maupun para pesaing sehingga berguna bagi tujuan penyiapan rencana jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu keputusan ALSyCO merupakan keputusan tertinggi dalam pemilihan strategi dan kebijakan operasional bank.

iii. Wewenang dan Tanggung jawab Komite ALSyCO adalah sebagai berikut :

- Membuat, mengkaji dan menerapkan kebijakan untuk mengelola sumber dana, penggunaan dana yang akan datang dengan tingkat nisbah dan risiko yang wajar.
- Mengkomunikasikan kebijakanyang telah disetujui kepada seluruh Divisi terkait serta memantau dan melakukan penyesuaian semestinya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- Memberikan arahan dalam manajemen risiko terkait

c. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan pemberian pembiayaan baru, penambahan, dan perpanjangan dalam batas wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Komite Pembiayaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No.007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan SK Direksi No. 020A/DIR-SK/IV/2017 tanggal 14 April 2020 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/VI/2020 dan SK Direksi No. 064/DIR-SK/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Susunan Anggota Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama
- Direktur Bisnis
- Direktur Operasional
- Kepala Divisi Rivi Pembiayaan, Hukum dan Administrasi *Support* merangkap sebagai Sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite.

i. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan atas proposal pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.

- Melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi:
 - Profesionalisme, yaitu melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan tantangan dan kesempatan.
 - Integritas, yaitu penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, taat pada peraturan yang berlaku dan bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan perusahaan.
 - Mempertimbangkan, mengevaluasi sekurang-kurangnya berdasarkan aspek "5C" yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, and Collateral*. (mengacu pada aspek 5C-Constrain).
 - Pemenuhan terhadap segala prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah yang berlaku agar menghasilkan pembiayaan yang berkualitas.
 - * Pemenuhan terhadap prosedur internal Bank agar pengendalian risiko dapat terjaga dalam upaya mengurangi kemungkinan kerugian sampai sekecil-kecilnya.
- Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proposal pembiayaan yang melebihi Batas Wewenang Komite Pembiayaan.

ii. Rapat diadakan apabila diperlukan.

d. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko

Adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No.007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan SK Direksi No. 020A/DIR-SK/IV/2017 tanggal 14 April 2020 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/VI/2020 dan SK Direksi No. 064/DIR-SK/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Susunan anggota Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagai Ketua
- Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua
- Direktur Bisnis, sebagai Anggota
- Direktur Operasional, sebagai Anggota
- Kepala Unit Kerja Analisis Risiko, sebagai Sekretaris
- Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
 - Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 - Chief Financial Officer
 - Kepala Divisi Kepatuhan
 - Kepala Divisi Rivi Pembiayaan, Hukum dan Administrasi *Support*
 - Kepala Divisi Pembiayaan Komersial dan Jaringan Cabang
 - Kepala Divisi Sumber Daya Insani
 - Kepala Wakil Divisi Operasional
 - Kepala Unit Kerja *Treasury*

- Kepala Divisi Teknologi Informasi (TI)
- Kepala Unit Kerja Pendanaan dan Produk

i. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Mengkaji dan menetapkan kebijakan, strategi dan ketentuan manajemen risiko.
- Menyempurnakan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
- Memperbaiki hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis dan proses operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
- Mengkaji dan menetapkan kebijakan dan ketentuan yang strategis.

ii. Rapat komite dilaksanakan setiap bulan

Selama tahun 2020, Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan rapat/pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite sebanyak 12 (dua belas kali).

e. Komite Sanksi dan Personalia

Komite Sanksi dan Personalia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No.007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan SK Direksi No. 020A/DIR-SK/IV/2017 tanggal 14 April 2020 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan SK Direksi No. 064/DIR-SK/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Susunan anggota Komite Sanksi dan Personalia adalah sebagai berikut:

i. Komite Sanksi

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:

- Direktur Operasional
- Direktur Bisnis.
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- Kepala SKAI.

ii. Komite Personalia

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:

- Direktur Operasional
- Direktur Bisnis.
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- Kepala Divisi SDI

iii. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam merumuskan Kebijakan ketenagakerjaan.
- Mengawasi kebijakan yang berhubungan dengan karyawan agar dapat terlaksana secara konsekuen dan konsisten.
- Memberikan masukan dan solusi untuk permasalahan yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan Bank.

- Memberikan penghargaan (reward) terhadap karyawan yang berprestasi dalam tahun kinerja dan punishment terhadap karyawan yang memperoleh sanksi.

iv. Rapat diadakan apabila dipandang perlu.

f. Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa

Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No.007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan SK Direksi No. 020A/DIR-SK/IV/2017 tanggal 14 April 2020 beserta perubahannya dalam SK Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan SK Direksi No. 064/DIR-SK/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual).

i. Susunan anggota Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

- Direktur Operasional, sebagai Ketua
- Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua
- Direktur Bisnis, sebagai Anggota
- Kepala Divisi SDI dan Umum, merangkap sebagai sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite

Apabila proses persetujuan melalui rapat komite, maka pihak lain dapat diundang dan tidak memiliki hak suara, yaitu:

- *Chief Financial Officer*
- Kepala Unit Kerja Analisis Risiko
- Kepala Unit Kerja Pendanaan dan Produk

ii. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Menyampaikan informasi terkait pembelian / pengadaan barang dan jasa dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal
- Memberikan rekomendasi dan persetujuan terhadap pembelian / pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kewenangannya.

iii. Mengevaluasi hubungan dengan vendor secara berkala dengan mengkategorikan penilaian yang "Direkomendasikan" dan "Tidak Direkomendasikan". Hasil penilaian yang masuk daftar direkomendasikan dipakai sebagai masukan dalam proses pembelian / pengadaan barang dan jasa untuk periode tahun berikutnya.

10. Dewan Pengawas Syariah

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada Bank Victoria Syariah, maka diangkat dan ditempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN) serta anggaran dasar Bank Victoria Syariah.

Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank.

Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN.

a. Komposisi dan Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional Bank yang senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan tahun 2018 susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Nama Dewan Pengawas Syariah	Jabatan
Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah
Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah

b. Independensi Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank juga telah mengungkap rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG. DPS Bank yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah:

Prof. DR. H.Hasanuddin, AF	Prof.DR.Hj.Huzaemah Tahido, MA
Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) Syariah	Asuransi AXA Syariah
PT. Jamkrindo Syariah	Asuransi Jasa Raharja
PT. MNC Finance Syariah	Auto Finance CIMB Niaga Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG.

c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS

i. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG.

c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS

- i. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- ii. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana telah diatur di dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah sesuai SK Direksi Nomer 053/DIR-SK/JKT/IX/2017 tanggal 4 September 2017 meliputi antara lain:
 - Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
 - Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
 - Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
 - Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
 - Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
 - Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
 - Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

d. Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 053/DIR-SK/JKT/IX/2017 tanggal 04 September 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah, yang mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

e. Rapat Dewan Pengawas Syariah

- i. Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun demikian diluar jadwal tersebut salah satu anggota dapat mengundang Direksi untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

- ii. Rekapitulasi rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Pejabat	Rapat Dewan Pengawas Syariah	
	Jumlah Kehadiran	Persentase
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	14	100%
Prof. DR. Huzaima Tahido Yanggo	14	100%
Total Rapat	14	

Pengambilan keputusan Rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

- iii. Seluruh keputusan Rapat DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.
- iv. Hasil Rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Bank dengan baik.

f. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2020 dalam memastikan seluruh kegiatan usaha Bank Victoria Syariah telah memenuhi Prinsip Syariah termasuk penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, antara lain adalah:

- i. Bank menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terkini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip Syariah.
- ii. Setiap produk dan jasa bank telah melalui analisa dan kajian DPS terhadap kesesuaian produk dan jasa tersebut dengan prinsip Syariah.
- iii. DPS senantiasa melakukan pengawasan atas setiap aktifitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- iv. Telah disampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2020 pada tanggal 21 Agustus 2020 dan Semester II tahun 2020 disampaikan pada tanggal 24 Februari 2021.
- v. Opini Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2020 sebagai berikut:

No	Perihal Opini	Nomor Surat
1	Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Produk dan Aktivitas Baru PT Bank Victoria Syariah tahun 2019	No. 001/DPS-BVIS/I/2019 tanggal 22 Januari 2020
2	Pemberian Restrukturisasi Pembiayaan Kepada Nasabah Dengan Akad Murabahah	No. 001A/DPS-BVIS/III/2018 tanggal 30 Maret 2020
3	Pemberian Restrukturisasi Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Kepada PT Maxima America Kerja	No. 002/DPS-BVIS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020
4	Layanan Kartu Debit Bank Victoria Syariah	No. 003/DPS-BVIS/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020

g. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Bank Victoria Syariah telah memenuhi prinsip syariah dalam hal kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Hal ini dapat dilihat dari akad-akad yang digunakan dalam produk usaha Bank

yang telah memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah* dan objek haram.

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank, telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2020 pada tanggal 21 Agustus 2020 dan Semester II tahun 2020 disampaikan pada tanggal 24 Februari 2021.

11. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Seiring dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin berkembang, sehingga dapat berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Bank maka diperlukan upaya untuk melakukan mitigasi risiko kegiatan usaha Bank yang salah satunya adalah melalui langkah yang bersifat *ex-ante* dengan mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.3/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan & Sekretaris Perusahaan dan Divisi Manajemen Risiko.

Direktur Kepatuhan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

a. Selaku Koordinator Bidang Kepatuhan.

- i. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh Bank antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau Business Plan. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia.
- ii. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- iii. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- iv. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan

atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.

- v. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Pembiayaan dan penempatan dana oleh Unit Kerja Treasury diatas jumlah tertentu.
- vi. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi.
- vii. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- viii. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ix. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

b. Selaku Koordinator Bidang Manajemen Risiko

- i. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Manajemen Risiko (*Risk Management*) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.
- ii. Memastikan kegiatan unit kerjanya dikelola dengan efisien, efektif dan akurat, sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan manajemen risiko secara terpadu.
- iii. Menjaga agar risiko Bank teridentifikasi, terukur dan dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai dengan visi, misi strategi dan *risk appetite*.
- iv. Memberikan opini atas rancangan keputusan Bank terhadap kandungan risiko, dan menyampaikan rekomendasi pengelolaan risikonya agar Bank terhindar dari kerugian sampai sekecil-kecilnya.
- v. Menyampaikan laporan Manajemen Risiko secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
- vi. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Manajemen Risiko secara berkala.
- vii. Bersama Direktur Utama mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Tugas dan Tanggung jawab Direktur Kepatuhan

- i. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- ii. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
- iii. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat

pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Laporan ini disampaikan setiap semester.

d. Program Kerja Tahun 2020 dan Realisasinya

Program Kerja

Sesuai rapat kerja Tanggal 1 Februari 2020 di Graha BIP - Jakarta, rencana kerja Direktorat Kepatuhan ditetapkan 5 (lima) prioritas atau program unggulan yaitu sebagai berikut:

- Menetapkan keseimbangan antara risiko dan pengendalian dengan pertumbuhan bisnis
- Membangun MIS untuk *mandatory report*
- Awareness Risiko Operasional
- Terus membangun image Bank Victoria Syariah sebagai bank yang bereputasi baik dalam hal GCG
- Membangun kemampuan kepemimpinan melalui *Talent Management*

Dan untuk melaksanakan prioritas atau program unggulan tersebut di atas, telah dijabarkan dalam *Key Performance Indicator* antara lain sebagai berikut

- Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko dan/atau per jenis aktivitas fungsional.
- Memberikan rekomendasi kepada seluruh unit kerja terkait (*risk taking unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko.
- Membuat dan menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.
- Melakukan kewajiban pelaporan profil risiko bank setiap triwulan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko, Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Uji kepatuhan terhadap proposal pembiayaan dan penempatan dana dalam jumlah tertentu.
- Me-review Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.
- Melakukan sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.
- Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan SKAI.

viii. Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

ix. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum Syariah. Realisasi selama tahun 2020, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Realisasi

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:

- Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Bank Indonesia yaitu sebesar 24,60%
- Giro Wajib Minimum (GWM) yang disyaratkan dalam Rupiah adalah 3.5% sedangkan realisasi GWM posisi Desember 2020 sebesar 3,01%.
- Rasio NPF *gross* sebesar 4,73% dan NPF net sebesar 2,96%
- Laporan keuangan Bank tahun 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Mirawati Sensi Idris", dengan opini "wajar"
- Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.
- Capaian pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah adalah sebesar 23,45%.

12. Fungsi Audit Internal atau SKAI

Fungsi Audit Intern pada Bank Victoria Syariah sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Bank Victoria Syariah yang melibatkan dana masyarakat. Di samping itu, menyadari kedudukan yang strategis dari perbankan dalam perekonomian, Audit Intern Bank Victoria Syariah diharapkan juga mampu menjaga perkembangan Bank Victoria Syariah ke arah yang dapat menunjang program pembangunan Pemerintah.

a. Struktur dan Kedudukan SKAI

Guna mendukung kinerja SKAI agar senantiasa dalam tingkat optimal, Bank Victoria Syariah memberikan SKAI wewenang, kedudukan dan tanggung jawab dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

b. Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank Victoria Syariah dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK.

c. Independensi

Kepala SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab SKAI

Visi dan Misi, wewenang dan tanggung jawab SKAI telah dirumuskan dalam Piagam *Audit Intern (Internal Audit Charter)* yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal ini Bank Victoria Syariah memberikan SKAI wewenang, kedudukan dan tanggung jawab dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

e. Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2020

Aktivitas yang telah dilakukan SKAI selama tahun 2020, antara lain:

- i. Melakukan post audit monitoring atas temuan SKAI serta menyampaikannya ke *Auditee* (Divisi maupun Cabang) untuk segera ditindaklanjuti sesuai komitmen.
- ii. Audit Umum dan Audit Khusus
 - Melaksanakan audit umum terhadap seluruh unit kerja, baik Divisi di Kantor Pusat maupun cabang-cabang, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja audit *Intern* tahunan.
 - Melaksanakan audit khusus sesuai instruksi dari Direksi dan Komite Audit.
- iii. Audit dan *Independent Review* Bidang Teknologi Informasi.
- iv. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada karyawan tentang penguatan sistem pengendalian *Intern* dan *anti fraud awareness* melalui forum *training*, sosialisasi maupun pada saat pembahasan hasil audit (*exit meeting audit*). Dalam hal ini SKAI mengembangkan peran *consultative* kepada *auditee* melalui komunikasi yang efektif dalam membahas temuan audit, sehingga *auditee* dapat memahami risiko-risiko dari defisiensi/penyimpangan yang terjadi.
- v. Berperan aktif dalam menunjang terciptanya sistem pengendalian Intern Bank Victoria Syariah dan pelaksanaan pengawasan GCG, antara lain:
 - Bersinergi dengan *Internal Control* yang di tempatkan di cabang-cabang sebagai bagian dari pilar *early warning system*.
 - Menjadi fasilitator (*liaison officer*) pelaksanaan audit ektern oleh OJK.

f. Tim Anti-Fraud

Dalam rangka menunjang penerapan pengendalian Intern di Bank Victoria Syariah, manajemen membentuk Tim *Anti-Fraud* (TAF) dimana SKAI turut mengambil peranan strategis, yaitu sebagai ketua TAF dan beranggotakan Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Unit Kerja Pengendalian Internal dan Kepala Divisi Sumber Daya Insani (SDI).

Adapun yang melatarbelakangi dibentuknya Tim Anti *Fraud* adalah sebagai berikut:

- i. Penguatan sistem pengendalian Intern Bank Victoria Syariah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
- ii. Terungkapnya berbagai kasus *Fraud* di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau bank maka perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi *anti Fraud*.
- iii. Mengarahkan Bank Victoria Syariah dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.

Strategi *anti-fraud* yang diterapkan di Bank Victoria Syariah didasarkan pada 4 (empat) pilar, sebagai berikut:

i. Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup *anti-fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

ii. Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Bank Victoria Syariah, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

iii. Investigasi, pelaporan, dan sanksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Bank Victoria Syariah, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi.

iv. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *fraud* serta mekanisme tindak lanjut.

g. Kaji Ulang Pelaksanaan Audit SKAI

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, SKAI Bank Victoria Syariah diharuskan menyampaikan laporan hasil kaji ulang (*review*) pihak ekstern yang independen yaitu memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB. SKAI Bank Victoria Syariah telah melakukan kaji ulang 3 (tiga) tahunan yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Ishak, Saleh, Soewono dan Rekan periode Januari 2017 s/d Juni 2020.

13. Penyimpangan dan Fraud Internal

Selama tahun 2020, tidak terdapat kasus kejadian fraud.

14. Audit Eksternal

Sebagai bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* terkait transparansi kondisi keuangan dan untuk memastikan penyusunan laporan keuangan serta pencatatan akuntansi telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Victoria Syariah memerlukan *auditor* eksternal yang independen dalam menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik dan terpercaya.

Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris yang telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit mempertimbangkan:

- Independensi kantor akuntan publik dan akuntan publik yang terdaftar dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Ruang lingkup audit;
- Imbalan jasa audit;
- Keahlian dan pengalaman kantor akuntan *public* dan akuntan publik;
- Potensi risiko atas penggunaan jasa *audit* oleh kantor akuntan publik dan akuntan publik untuk kurun waktu yang panjang, dan;
- Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh kantor akuntan publik dan akuntan *public* pada periode sebelumnya.

Sesuai dengan hasil RUPS Tahunan dengan akta nomor 64 tanggal 26 Juni 2020 dan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Memorandum No. 007/KA/VII/2020 tertanggal 10 Agustus 2018 perihal Rekomendasi Penunjukkan KAP Untuk General Audit Atas Laporan Keuangan PT Bank Victoria Syariah Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 serta surat persetujuan Dewan Komisaris No. 014/DEKOM/JKT/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020

perihal Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan atau Akuntan Publik (AP) untuk general audit atas Laporan Keuangan PT Bank Victoria Syariah Tahun 2020 maka Direksi menetapkan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*member firm of Moore Sthepens*) sebagai *Auditor Independen* Bank Victoria Syariah untuk tahun buku 2020.

Pelaksanaan fungsi audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*member firm of Moore Sthepens*) atas Laporan Keuangan Bank Victoria Syariah untuk tahun buku 2020 telah memenuhi standar profesional akuntan publik, legalisasi perjanjian kerja dan ruang lingkup yang ditetapkan KAP, telah memenuhi unsur independensi dan memiliki reputasi yang baik.

Hasil audit atas Laporan Keuangan Bank Victoria Syariah untuk tahun buku 2020, Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*member firm of Moore Sthepens*) memberikan opini Wajar dalam semua hal yang material berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Adapun biaya jasa profesional untuk audit laporan keuangan, Bank Victoria Syariah membayar kepada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*member firm of Moore Sthepens*) sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah).

15. Kerangka Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank menghadapi risiko yang berpotensi meningkat dan kompleks yang disebabkan oleh dinamika perkembangan dan tuntutan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu, diperlukan pengelolaan risiko secara komprehensif dan terintegrasi dengan penguatan pada aspek pengendalian *intern*.

Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan mengacu kepada *best practices* yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Pengendalian risiko secara *first line of defense* yang dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan proses bisnis.
2. Pengendalian risiko secara *second line of defense* dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi manajemen risiko dan independen dari unit kerja yang melaksanakan proses bisnis.
3. Pengendalian risiko secara *third line of defense* dilakukan oleh SKAI guna memastikan kegiatan pengendalian risiko dilaksanakan secara efektif.

Dengan adanya pengendalian risiko dalam tiga tahapan ini, diharapkan proses pelaksanaan tugas Bank khususnya pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek kehati-hatian termasuk prinsip syariah, prinsip tata kelola yang baik, dan memperoleh hasil yang optimal terhadap kinerja serta keuangan.

Untuk pengelolaan risiko, Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling kurang mencakup hal sebagai berikut:

1. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang diatur pada Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*board manual*) serta Pedoman Tata Kerja DPS.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan *limit* risiko.

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

16. Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha bank di mana tujuan utama dari manajemen risiko adalah melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan operasional Bank Victoria Syariah (Bank) sedapat mungkin dilaksanakan melalui satu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif serta mampu menganalisa dan mengelola seluruh risiko yang terkait.

Penerapan manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada Direksi Bank mengenai kemungkinan kerugian Bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja Bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha Bank serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Bank.

Penerapan Manajemen Risiko Bank mengacu pada Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang disusun berdasarkan POJK No.65/POJK.03/2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah.

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- i. Efektivitas dari penerapan manajemen risiko di Bank merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam upaya melakukan pengawasan serta mitigasi risiko secara aktif maka Dewan Komisaris dan Direksi dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik atas risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- ii. Mewabahnya pandemi COVID-19, tidak menghalangi Rapat Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko yang

diadakan secara berkala dengan menggunakan aplikasi virtual meeting guna membahas laporan profil risiko yang dibuat oleh Unit Kerja Analis Risiko mengenai hasil penilaian Bank terhadap profil risiko yang dihadapi, yang mana hal ini dapat mendukung Dewan Komisaris dan Direksi untuk memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Dalam menjalankan visi, misi dan strategi bisnisnya, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta *limit* risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko yang efektif, yaitu:

- i. Kebijakan dan prosedur sudah dilengkapi dengan *limit* risiko untuk setiap jenis risiko yang dihadapi Bank dan dievaluasi secara berkala. Strategi manajemen risiko yang dibuat oleh Bank dibuat berdasarkan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil.
- ii. Penetapan *limit* dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup *limit* secara keseluruhan dan *limit* per risiko.
- iii. Bank pun telah mengembangkan Kebijakan Dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan *TI* dengan menambahkan mengenai Pengelolaan Keberlangsungan Dan Pemulihan Usaha (*Business Continuity Dan Disaster Recovery Management*).

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh sumber risiko yang ada dan potensial pada produk dan aktivitas Bank termasuk risiko dari produk dan aktivitas baru.

Prinsip pengidentifikasian risiko adalah sebagai berikut:

- i. Bersifat proaktif.
- ii. Mencakup seluruh aktifitas fungsional.
- iii. Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
- iv. Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta dampaknya.

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengukur profil risiko guna memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif.

Metode pengukuran menggunakan metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.

Pemantauan dilakukan oleh Unit Kerja Analisis Risiko terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi serta memantau posisi/eksposur risiko.

Pelaporan Bank mengenai laporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK dan Laporan Profil Risiko memuat substansi yang sama dengan laporan yang disampaikan kepada Direksi dan Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko.

Pengendalian risiko yang diterapkan Bank disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang dapat diterima.

Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dikembangkan Bank untuk kebutuhan manajemen risiko secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan volume eksposur risiko dan kemampuan sistem, sehingga Bank dapat mengukur eksposur risiko secara akurat, informatif dan tepat waktu.

17. Pengendalian Internal

Pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Internal Audit.

Dalam melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penerapan manajemen risiko, Bank mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan di mana penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten.

Unit Kerja Pengendalian Internal dibawah kendali Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara langsung berfungsi sebagai salah satu "*second line of defense*" yang independen dalam melaksanakan evaluasi terhadap kontrol secara harian yang sudah "*built in*" dalam setiap proses operasional Bank dalam rangka mendukung pencapaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan pengelolaan manajemen risiko yang sesuai peraturan otoritas guna pencapaian Visi dan Misi Bank.

Aktivitas pengendalian internal (*Internal Control*) Bank telah sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.5/22/DPNP, Tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bank Umum, yang mana penerapannya dievaluasi oleh Unit Kerja Pengendalian Internal antara lain mencakup:

- a. Melakukan pengendalian terhadap aktivitas dan risiko operasional Bank secara independen untuk memastikan transaksi telah sesuai Peraturan Otoritas, Kebijakan dan Prosedur Internal Bank termasuk didalamnya penerapan Prinsip Syariah serta menilai kekuatan & kepatuhan terhadap pelaksanaan yang sesuai ketentuan.

- b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas *internal control* pada setiap unit kerja.
- c. Melakukan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko di cabang-cabang.

Bank mendorong kesadaran dari sumber daya dalam organisasi untuk peduli pada pengendalian internal (*awareness*) yang mana hal ini bisa menciptakan *zero defect* dan menghilangkan potensi *fraud*.

Dan selama tahun 2020 Unit Kerja Pengendalian Internal telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaporkan hasil pemeriksaan setiap bulan terhadap:
 - i. Bidang Operasional, yang meliputi:
 - Aktivitas di seluruh kantor cabang, yaitu: *cash count*, *stock opname*, *review* dan *monitoring* pembukaan rekening dan transaksi harian.
 - Pemeriksaan operasional unit kerja di Kantor Pusat.
 - Monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya, antara lain pelaksanaan dual control, pengelolaan user ID, pengelolaan e-mail korporasi, pemenuhan prosedur terkait APU-PPT, penerapan prinsip syariah, kelengkapan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung, pengarsipan dan pengembangan karyawan.
 - ii. Bidang Pembiayaan, yang meliputi:
 - Melakukan monitoring terhadap pemenuhan dokumen.
 - Melakukan monitoring terhadap sebagian aktivitas saat inisiasi pembiayaan.
 - Melakukan monitoring terhadap kualitas pembiayaan
 - Melakukan monitoring terhadap pembiayaan restrukturisasi terdampak COVID-19
- b. Melaporkan hasil tindak lanjut komitmen unit kerja Kantor Pusat, Cabang dan Cabang Pembantu terhadap hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik dan Satuan Kerja Audit Internal.
- c. Melaksanakan *sharing session* yang bertujuan untuk meningkatkan *risk awareness* dari setiap karyawan
- d. Memastikan Bank melaksanakan protokol kesehatan dan mekanisme bekerja *work from home* (WFH) guna menekan penyebaran virus COVID-19 sesuai ketentuan dari otoritas.

18. Permasalahan Hukum

Adapun Perkara Hukum Tahun 2020

No	Nama Nasabah	Nomor Gugatan	Tindak Lanjut
1	a. Hanusa Persada, PT b. Agus Adriansyah, SE., Aini Nurilina, Aep Kurnia (Hanusa Persada, PT)	a. No. 675/Pdt.2016/PN.Jkt.Sel tanggal 27-09-2016 b. No. 2570/Pdt. G/2016/PA-Kw tanggal 01-10-2018	a. No. 675/Pdt.2016/PN.Jkt.Sel tanggal 27-09-2016 b. No. 2570/Pdt. G/2016/PA-Kw tanggal 01-10-2018
2	Parah Jaya Steel, PT	No. 1957/Pdt. G/2016/PA-JS tanggal 08-06-2018	Proses Kasasi oleh Penggugat di Mahkamah Agung RI
3	Muhammad Soleh	No. 44/Pdt. G/2019/PN. CBr tanggal 13-03-2019	Proses Kasasi oleh Penggugat di Mahkamah Agung RI
4	Mambal Agar Barak, PT	No. 37/Pdt. G/2020/PN. Jkt. Sel tanggal 07-01-2021 (tanggal gugatan 28-12-2020)	Proses persidangan tahap pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

19. Nilai-Nilai Budaya Perusahaan

Untuk lebih mendukung pencapaian Visi dan penerapan Misi dalam aktivitas operasional Perusahaan, maka Bank Victoria Syariah telah menetapkan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan (*Core Values*) sebagai dasar budaya Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali.

Adapun Nilai-Nilai Budaya Perusahaan yang disepakati dan dianut oleh seluruh Karyawan Bank Victoria Syariah dapat disingkat **H-E-B-A-T**.

Penjabaran dari **HEBAT** tersebut adalah sebagai berikut :

Honest

Kejujuran menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terlebih perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan seperti Bank Victoria Syariah. Seluruh Sumber Daya Insani (SDI) Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi sehingga dapat dipercaya dalam mengemban amanah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Energic

Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dinamis saat ini, semangat dan jiwa muda dalam setiap kepribadian karyawan Bank Victoria Syariah menjadi keharusan agar bank dapat terus berkembang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Brilliant

Dalam mengembangkan bisnis secara berkesinambungan, setiap individu maupun team harus memiliki kemampuan yang *brilliant* untuk melihat setiap peluang maupun tantangan yang ada sehingga dapat menjaga pertumbuhan bisnis Bank Victoria Syariah secara berkesinambungan (*sustainable growth*).

Accurate

Sebagai lembaga keuangan yang merupakan kepercayaan masyarakat, keakuratan data terkait dengan penyebaran informasi baik formal maupun informal sudah menjadi suatu keharusan dan kewajiban dari Bank untuk dipenuhi.

Trust

Bank merupakan lembaga kepercayaan bagi para nasabah untuk menyimpan dana, untuk itu unsur *trust* (kepercayaan) wajib menjadi nilai budaya yang harus melekat pada seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah.

20. Transaksi dengan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu dimana kepentingan ekonomis Bank berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi.

Selama tahun 2020, tidak terdapat transaksi maupun kejadian dalam bentuk apapun yang menyebabkan timbulnya benturan kepentingan pada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Bank Victoria Syariah.

21. Kode Etik

Bank telah memiliki Pedoman dan Kode Etik bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

22. Perlindungan Nasabah

Bank Victoria Syariah senantiasa mengutamakan kepentingan nasabah dan kepuasan nasabah dengan memberikan layanan terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada nasabah, memberikan layanan yang baik dan optimal serta secara pro aktif membantu menyelesaikan dengan cepat dan tepat setiap keluhan nasabah.

Bentuk Komitmen Perusahaan

Bentuk Komitmen Bank Victoria Syariah terhadap perlindungan nasabah tersebut, mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah
Bank memberikan jaminan perlindungan atas uang di simpan/diinvestasikan oleh Nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Pembentukan Pusat Pengaduan Nasabah (*Customer Care*)
Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh nasabah melalui beberapa sarana antara lain:
- *Call Center*: (021) 5672771
- *Website*: www.bankvictoriasyariah.co.id
- *Customer service* di tiap – tiap kantor cabang terdekat dengan Nasabah.
3. Transparansi dalam memberikan informasi bagi hasil bulan terakhir bagi nasabah dana, yang ditampilkan pada papan informasi yang terletak di masing – masing kantor cabang.
4. Bank menerapkan prinsip perlindungan data/informasi nasabah, serta hanya menggunakan data/informasi tersebut sesuai dengan kepentingan dan tujuan.
5. Memberikan layanan transfer real time kepada nasabah dalam rangka mendukung layanan prima kepada nasabah.

Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah

Bank Victoria Syariah menindaklanjuti setiap pengaduan Nasabah melalui mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengkategorian pengaduan Nasabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengaduan yaitu pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui *Call Center* dianggap sebagai pengaduan lisan dan pengaduan melalui formulir pengaduan Nasabah sebagai pengaduan tertulis.
2. Service Level Agreement (SLA) penyelesaian pengaduan Nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa di perpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan kondisi terdapat kendala komunikasi.

Selama tahun 2020, seluruh pengaduan nasabah telah diselesaikan dengan baik.

23. Keterbukaan Informasi

Di dalam era keterbukaan dan transparansi Bank Victoria Syariah memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan non keuangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Bank Victoria Syariah, diantaranya melalui:

- a. Publikasi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- b. Penyampaian informasi produk melalui brosur dan penjelasan langsung oleh petugas Bank Victoria Syariah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Informasi Produk Bank Victoria Syariah dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- c. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (Annual Report) Bank Victoria Syariah kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank Victoria Syariah.
- d. Laporan Publikasi Triwulan
- e. Penyampaian Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank Victoria Syariah.

Hal-hal lain yang dapat disampaikan terkait dengan transparansi kondisi Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah selama setahun adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) Tahun 2020	
	Jumlah (Org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1.026
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	3	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2020*)	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	3
Total	3

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi
Total remunerasi Direksi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (KOTOR) tahun 2020	
	Jumlah (Org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	4.048
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	4	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2020*)	JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	4
Dibawah Rp. 500 juta	-
Total	4

*) Yang diterima secara tunai

b. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,

atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

- i. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 16 : 1
- ii. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 2 : 1
- iii. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 2 : 1
- iv. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

24. Penilaian GCG Secara Self Assessment

Untuk memastikan peningkatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada manajemen maupun kepada pemangku kepentingan lainnya, Bank Victoria Syariah melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG 2 (dua) kali dalam setahun.

Meskipun belum menggunakan jasa pihak ketiga yang independen, pelaksanaan *self assessment* memiliki akurasi dan objektivitas yang baik karena dilakukan sesuai dengan metodologi yang diberikan oleh *Regulator* dan dengan melibatkan seluruh elemen Bank. Adapun hasilnya dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan kepada Bank Victoria International Tbk (BVIC) sebagai Entitas Utama dan atau pemegang saham. Pelaksanaan *self assessment* secara semesteran ini juga digunakan sebagai alat yang penting bagi BVIC untuk mengukur Tata Kelola Secara Terintegrasi dan tingkat kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Umum Syariah.

Hasil Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG melalui penetapan peringkat faktor-faktor GCG yang dilakukan secara factual terhadap tata kelola (*governance*) terdiri dari 3 (tiga) aspek utama, yaitu: *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Bank Indonesia dan Hasil *self assessment* GCG tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Periode	Nilai	Predikat
Semester I	1.65	Baik
Semester II	1.63	Baik

Dan parameter penilaian *self assessment* adalah:

Nilai	Predikat
< 1,5	Sangat Baik
< 2,5	Baik
< 3,5	Cukup Baik
< 4,5	Kurang Baik
≤ 5	Tidak Baik

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Governance Structure

• Faktor-Faktor positif aspek *governance structure*

- Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank telah memiliki Pedoman Tata Kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat sebagaimana SKB Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan SK Direksi No. 064/DIR-SK/XI/2020 tanggal 9 November 2020.
- Bank telah memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis yang memadai, dan secara berkala melakukan pengkinian serta menerbitkan kebijakan dan prosedur baru sesuai kebutuhan.
- Jumlah Anggota DPS berjumlah 2 (dua) orang telah memenuhi 50% dari jumlah anggota Direksi.
- Anggota DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh Bank.
- Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan operasional.
- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk Batas Maksimum Penyediaan Dana.

• Faktor-faktor negatif aspek *governance structure*

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang telah sesuai, namun sesuai RUPS tanggal 26 Juni 2020, 1 (satu) orang anggota Komisaris Independen masih menunggu *Fit and proper test* OJK.
- Paling kurang (50%) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah komisaris independen telah sesuai namun 1 (satu) orang masih menunggu *Fit and proper test* OJK.
- Susunan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terdapat 1 (satu) orang anggota independen yang masih *vacant*.
- DPS belum memiliki pegawai secara khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi masih dirangkap oleh Staff Kepatuhan.

Governance Process

• Faktor-faktor positif aspek *governance process*

- Seluruh anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
- Pengangkatan dan/ atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan melalui RUPS.
- Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat mengurangi *asset* atau keuntungan Bank. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

- Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang transparansi kondisi keuangan.
- Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan SDI secara berkala untuk berkelanjutan selama semester-II 2020 yakni Sertifikasi Kepatuhan untuk 4 (empat) orang dan *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko.

• Faktor-faktor negatif aspek *governance process*

- Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realitis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal, namun realisasinya belum tercapai dengan baik.
- Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, namun masih perlu adanya perbaikan kemampuan Teknologi yang dimiliki Bank.
- Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, namun masih perlu perbaikan di beberapa lini, dengan mempertimbangkan masih adanya sanksi denda dan target yang belum tercapai.

Governance Outcome

• Faktor-faktor positif aspek *governance outcome*

- Bank telah menerapkan Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran serta kemampuan Bank.
- Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada OJK dan pihak terkait, yang cakupan laporannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portfolio penyediaan dana.
- Selama tahun 2020 tidak terjadi benturan kepentingan.
- Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi terus dilakukan secara berkesinambungan.

• Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome*

- Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh Karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya, masih belum sesuai yang diharapkan
- Budaya kepatuhan masih harus terus dibangun dalam

- setiap pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank
- Bank telah berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, namun demikian masih memerlukan peningkatan atas *compliance awareness*.

Berdasarkan pelaksanaan GCG selama tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa kondisi pelaksanaan GCG tahun 2020 relatif sama baiknya dibandingkan dengan pelaksanaan GCG tahun 2019.

25. Laporan *Self Assessment* Manajemen Risiko Tahun 2020

Gambaran Umum Manajemen Risiko

Manajemen Risiko memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Bank. Dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang makin pesat, maka Bank Victoria Syariah menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan eksposur risiko diseluruh lini organisasi.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank Victoria Syariah membentuk kerangka manajemen risiko yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur, *limit-limit* transaksi dan kewenangan dan ketentuan lain yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha Bank Victoria Syariah.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank Victoria Syariah membentuk kerangka manajemen risiko yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur, *limit-limit* transaksi dan kewenangan dan ketentuan lain yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha Bank Victoria Syariah.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Manajemen Risiko di Bank Victoria Syariah, didasarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.

Unit Kerja Analisis Risiko di Bank Victoria Syariah merupakan suatu fungsi yang bersifat independen terhadap unit bisnis maupun terhadap unit satuan audit internal. Namun ketiga unit tersebut saling berkaitan dan berperan aktif dalam menerapkan manajemen risiko dengan kewenangan yang berbeda sebagai *first line*, *second line* dan *third line of defense*. Penerapan konsep tersebut dilaksanakan secara konsisten sehingga menjaga independensi dalam proses pengambilan keputusan, agar tidak memihak, menguntungkan unit kerja operasional tertentu atau mengabaikan unit operasional kerja lainnya.

Meningkatkan Peran Manajemen Risiko

Kegiatan usaha perbankan syariah senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan dan eksternal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Dalam hal ini perbankan syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah serta sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh serta Otoritas Jasa Keuangan serta sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFBS). Seiring dengan perkembangan globalisasi, teknologi informasi dan inovasi produk serta aktivitas perbankan syariah telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antar masing-masing sektor keuangan baik dalam produk dan kelembagaan maupun kepemilikan yang menyebabkan meningkatnya eksposur risiko.

Menghadapi kondisi tersebut, Bank Victoria Syariah memperhatikan seluruh risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Melalui penerapan manajemen risiko yang menyeluruh, dan berupaya untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko secara lebih baik dan penetapan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) serta toleransi risiko (*risk tolerance*) sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha Bank.

Penerapan kerangka manajemen risiko dilakukan antara lain melalui organisasi yang terstruktur, serangkaian prosedur dan metodologi yang berguna untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dan melaporkan risiko-risiko yang sudah ada maupun yang mungkin akan timbul.

Struktur manajemen risiko menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi unit-unit organisasi serta elemen penting dalam memastikan kecukupan dan kualitas Sumber Daya Insani untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern dan unit kerja manajemen risiko, independen terhadap unit kerja operasional maupun bisnis. Kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas produk, tingkat risiko yang akan timbul serta pengalaman dan keahlian personel yang menangani.

Bank Victoria Syariah mengembangkan kebijakan manajemen risiko sebagai arahan tertulis dalam penerapan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis dimana penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait. Kebijakan dan prosedurnya didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, *risk appetite*, *risk tolerance*,

profil risiko serta peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat.

Secara konsisten Bank Victoria Syariah memperbaiki kebijakan, menyempurnakan prosedur dan menyesuaikan batas toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dan profitabilitas usaha, serta menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Victoria Syariah dan induk perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko bank mengacu pada POJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan ketentuan terkait risiko lainnya serta *best practice* penerapan manajemen risiko perbankan. Bank mengelola 10 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko investasi dan risiko imbal hasil.

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis maka Bank harus meningkatkan pula monitoring atas risiko-risiko yang ada dan selalu dijaga serta disempurnakan agar lebih baik dan dapat memberikan mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul.

Penerapan atas Manajemen Risiko yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan rapat Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko (KKMR) secara berkala.
- Melakukan pemantauan/monitoring terhadap Risiko yang melekat pada aktivitas dan kegiatan bisnis Bank.
- Membuat kajian Manajemen Risiko terkait dengan produk dan aktifitas baru.
- Melakukan evaluasi tentang hasil perbaikan atau mitigasi yang telah dilakukan apakah sudah dilakukan dengan efektif.
- Membuat Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara berkala dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*), dengan cakupan penilaian meliputi factor-faktor sebagai berikut:
 - Profil Risiko (*Risk Profile*)
 - Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
 - Aspek Rentabilitas (*Earnings*) dan
 - Pemenuhan Permodalan (*Capital*)

Untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dan menyempurnakan Identifikasi Risiko dalam Laporan Profil Risiko maupun laporan Tingkat Kesehatan Bank agar lebih akurat sehingga dapat dilakukan antisipasi dan mitigasi yang lebih cepat dan lebih baik.

- Meningkatkan Budaya Risiko pada seluruh jajaran organisasi (*risk taking unit*) dan setiap aspek kegiatan operasional Bank antara lain melalui

rapat-rapat pada masing-masing unit kerja dan dalam pengambilan keputusan bisnis.

- g. Mengikutsertakan jajaran Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif Bank dan karyawan untuk mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan Program Sertifikasi Manajemen Risiko termasuk *Refreshment Program*.
- h. Meningkatkan peran Unit Kerja Independen (satuan Kerja Audit Intern, Satuan kerja *Review* Pembiayaan, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Kerja Analisis Risiko dan Unit Pengendalian Internal) dalam rangka memperbaiki fungsi pengendalian intern.
- i. Mempertimbangkan hasil kajian oleh Unit Kerja Analisis Risiko dan Opini Kepatuhan dalam proses usulan penyediaan dana Tresuri dan pembiayaan untuk jumlah tertentu.

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Manajemen Risiko pada aktivitas fungsional Bank Victoria Syariah meliputi atas 10 (sepuluh) jenis risiko sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Proses kredit dan pengelolaan risiko kredit dilakukan secara terintegrasi oleh unit bisnis, unit operasional, dan unit risiko kredit yang dalam pelaksanaannya didukung oleh system yang terintegrasi dan dilakukan secara *end to end*.

Key Risk Indicator yang digunakan dalam risiko kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas pembiayaan yang ditunjukkan dengan *Non Performing Financing* (NPF).
- b. Kualitas penyediaan dana dan besarnya *coverage* yang dibentuk, pembiayaan yang direstrukturisasi.
- c. Tingkat konsentrasi pembiayaan.
- d. Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana.
- e. Faktor eksternal.

2. Risiko Pasar

Adalah risiko pada posisi neraca dan rekening *administrative* akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Key Risk Indicator untuk risiko pasar adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan nilai tukar.
- b. Cover risiko atas transaksi valuta asing dengan menggunakan metode pengukuran *Value at Risk* (VaR).
- c. Penilaian volume dan komposisi portofolio.
- d. Potensial kerugian (potensial *loss*) dari risiko *Benchmark* Suku Bunga dalam *Banking Book* (RBBR) Strategi dan Kebijakan Bisnis.

3. Risiko Likuiditas

Adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Key Risk Indicator untuk risiko likuiditas adalah sebagai berikut:

- a. Kecukupan rasio *Secondary Reserve*
- b. Tingkat Financing to Deposit Ratio
- c. Komposisi dari Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif.
- d. Konsentrasi dari aset dan kewajiban.
- e. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan.
- f. Alses pada sumber-sumber pendanaan.

4. Risiko Operasional

Adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Bank melakukan manajemen risiko operasional yang efektif agar dapat menekan kerugian akibat risiko operasional.

Key Risk Indicator untuk risiko operasional adalah sebagai berikut:

- a. Self assessment terhadap potensi risiko perusahaan.
- b. Kerugian aktual akibat risiko operasional.
- c. Karakteristik dan kompleksitas bisnis.
- d. Sumber daya insani.
- d. Sumber daya insani.
- e. Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung.
- f. Kejadian fraud.
- g. Kejadian eksternal.

5. Risiko Hukum

Adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat terjadi diseluruh aspek transaksi dan operasional yang ada di Bank Victoria Syariah, termasuk pula perjanjian yang dilakukan nasabah maupun pihak lain yang dapat berdampak terhadap risiko-risiko lain antara lain risiko kepatuhan, risiko pasar, risiko reputasi maupun risiko likuiditas.

Key Risk Indicator untuk risiko hukum adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya gugatan pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan kerugian bank.
- b. Faktor litigasi.
- c. Faktor kelemahan perikatan.
- d. Faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan.

6. Risiko Reputasi

Adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Cakupan risiko reputasi cukup luas dan tidak terbatas hanya pada reputasi dari sebuah bank saja, namun dapat memicu risiko lainnya bahkan risiko reputasi dapat berdampak pada munculnya risiko lainnya. Risiko reputasi pun dapat mempengaruhi kinerja sektor industri perbankan secara menyeluruh. Kejadian risiko mungkin terjadi hanya pada satu bank yang pengendalian risikonya tidak memadai, selanjutnya reputasi dari masing-masing produk atau sektor dapat mempengaruhi keseluruhan industri perbankan.

Key Risk Indicator adalah untuk risiko reputasi adalah sebagai berikut:

- Pemberitaan negative di media massa
- Pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait
- Pelanggaran etika bisnis
- Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank
- Frekuensi materialitas dan eksposur pemberitaan negatif
- Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah

7. Risiko Strategik

Adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Manajemen Risiko Strategik dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan strategis (*planning and budgeting*) yang mencakup penyelarasan strategi perusahaan.

Key Risk Indicator untuk risiko strategik adalah sebagai berikut:

- Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis.
- Strategi berisiko tinggi dan Strategi berisiko rendah.
- Posisi Bisnis Bank.
- Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB)

8. Risiko Kepatuhan

Adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.

Pada praktiknya, aktivitas bisnis Bank terkait dengan banyak peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah, Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN).

Key Risk Indicator untuk risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

- Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan.
- Frekuensi pelanggaran yang dilakukan
- Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Key Risk Indicator untuk risiko imbal hasil adalah sebagai berikut:

- Komposisi Dana Pihak Ketiga
- Strategi dan kinerja Bank dalam menghasilkan Laba/pendapatan
- Perilaku nasabah Dana Pihak Ketiga

10. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and *loss sharing*.

Key Risk Indicator untuk risiko investasi adalah sebagai berikut:

- Komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil
- Kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil.
- Faktor eksternal

Proses pengidentifikasian risiko-risiko yang melekat (risiko inheren) dilakukan oleh unit kerja terkait/risk taking unit dan unit kerja Analis Risiko. Identifikasi risiko-risiko tersebut terus dilakukan dan disempurnakan bersama-sama dengan penentuan limit/risk appetite dan penghitungan bobot untuk masing-masing risiko dan dibicarakan dalam rapat Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko sehingga dapat lebih menggambarkan profil Risiko Bank yang sebenarnya.

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko diterapkan dengan gambaran sebagai berikut:

a. Tata Kelola Risiko

Sebagai bagian dari tata kelola risiko, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah di Bank Victoria Syariah telah melaksanakan pengawasan aktif, antara lain:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris melalui komite yang berada dibawahnya, yaitu Komite Audit (*Audit Committee*) yang membantu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal, pengawasan yang berkaitan dengan pelaporan auditor internal dan eksternal; Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring*

Committee), yang membantu dalam mengawasi kebijakan remunerasi dan nominasi.

- ii. Pengawasan aktif Direksi melalui rapat Direksi yang dilakukan secara rutin, melalui rapat-rapat Direksi dan rapat Komite yang berada dibawah Dewan Direksi, yaitu Komite Aset, Liabilitas dan Dana *Syirkah* Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management/ALSYCO*), Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko, Komite Pembiayaan, Komite Sanksi dan Personalia. Selain itu, Pengawasan aktif Direksi mencakup pula pengawasan terhadap hasil pemeriksaan oleh Unit Kerja Pengendalian Internal atas risiko operasional yang terjadi pada unit-unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

iii. Cabang

Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memastikan bahwa transaksi dan operasional Bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Termasuk di dalam tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah antara lain memberikan arahan dan masukan dari sisi kesesuaian terhadap prinsip syariah untuk produk dan aktivitas baru serta melakukan pengawasan dan *check on the spot* secara sampling atas penerapan prinsip syariah pada unit-unit bisnis, operasional maupun cabang. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga bertugas memintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum didukung oleh fatwa.

b. Kerangka Manajemen Risiko Dalam Bentuk Kebijakan, Prosedur, Maupun *Limit*

Bank telah menyusun ketentuan internal mengenai manajemen risiko, pembiayaan, operasional, pasar, likuiditas, serta prosedur terkait dengan prosedur dan produk peroduk pembiayaan per segmen bisnis dan kegiatan operasional Bank lainnya. Ketentuan Internal Bank Victoria Syariah disusun berdasarkan hierarki yang terdiri dari level kebijakan dan prosedur, dimana kebijakan mengatur hal-hal yang bersifat *high level* sementara prosedur mengatur hal-hal yang lebih bersifat teknis.

Penyusunan ketentuan internal dilakukan dengan melibatkan unit kerja terkait, termasuk didalamnya unit analisis risiko, kepatuhan, legal dan internal audit.

Dalam pembiayaan, Bank memperhatikan bahwa pembiayaan kepada satu group usaha nasabah tidak melebihi Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga memastikan bahwa transaksi dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan, maka Bank mengimplementasikan limit terkait dengan pemutusan

pembiayaan, operasional secara berjenjang untuk mencegah terjadinya konsentrasi pemutusan pada satu level tertentu saja.

- c. Proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; kecukupan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, serta kecukupan system informasi manajemen risiko.

Hal-hal yang dilakukan terkait dengan aktivitas ini antara lain:

- i. Melakukan analisis risiko inheren atas setiap produk dan aktivitas Bank yang dilakukan oleh masing-masing pemilik produk dan selanjutnya dikaji antara lain oleh unit manajemen risiko, kepatuhan dan legal.
- ii. Melakukan penilaian profil risiko secara berkala atas 10 (sepuluh) jenis risiko dan melaporkannya kepada manajemen dan Otoritas Jasa Keuangan. Metodologi atas penilaian profil risiko dikaji dan dikembangkan secara berkala.
- iii. Proses rekrutmen pegawai secara selektif.
- iv. Peningkatan kualitas SDI secara berkelanjutan melalui pelaksanaan pelatihan yang sesuai dengan rencana pelatihan dan disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi pegawai.
- v. Secara aktif melakukan sosialisasi dan *sharing session*, baik karyawan *front-end*, *back office* dan karyawan Kantor Pusat Non Operasional, yang mendukung peningkatan kompetensi pegawai serta peningkatan pengetahuan pegawai mengenai proses operasional Bank.
- vi. Melakukan penilaian kinerja portofolio pembiayaan secara berkala oleh unit bisnis dan unit *support* bisnis (*reviewer*) untuk seluruh segmen pembiayaan.

- d. Kecukupan system pengendalian risiko yang mencakup pengendalian internal oleh unit Internal Audit dan *Anti Fraud Team* serta *independent review* yang dilakukan oleh auditor eksternal dan juga pihak konsultan.

Satuan Kerja Audit Internal melaksanakan audit secara berkala dan atau melakukan audit khusus atas permasalahan yang muncul di Bank. Laporan audit tersebut disampaikan kepada manajemen untuk dapat ditindaklanjuti segera dan disampaikan kepada Unit Kerja Analisis Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan kualitas manajemen risiko dan pengembangan kebijakan serta prosedur terkait. Untuk beberapa kasus tertentu, audit dapat dilakukan oleh audit eksternal berdasarkan persetujuan manajemen, sehingga diperoleh penilaian yang independen dari pihak lain di luar Bank.

Bank telah memiliki Unit Kerja *Anti Fraud* yang berkoordinasi erat dengan unit internal audit atas permasalahan dan kasus yang muncul. Bersama dengan team dari Divisi Sumber Daya Insani, telah dibentuk Komite Sanksi yang memberikan pandangan yang komprehensif atas permasalahan atau kasus yang perlu diselesaikan. Unit Kerja *Anti Fraud* melaporkan tindak lanjutnya secara berkala kepada manajemen dan/atau Direktur Utama.

Penilaian Profil Risiko

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh stakeholder mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi bank. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan efektifitas kualitas penerapan manajemen risiko.

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Selama tahun 2020 Bank telah melakukan *self assessment* terhadap penilaian profil Risiko Bank. Peringkat komposit profil risiko Bank Victoria Syariah adalah 2 atau *Low to Moderate* dengan penilaian Risiko Inheren adalah komposit 2 atau *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank adalah Komposit 2 atau *Satisfactory*.

Hasil Penilaian masing-masing jenis risiko pada periode Desember 2020 yang dilakukan secara *self assessment* adalah:

No	Jenis Risiko	Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)	Tingkat Risiko Komposit
1	Risiko Kredit	3 Moderate	3 Fair	3 Moderate
2	Risiko Pasar	1 Low	2 Satisfactory	1 Low
3	Risiko Likuiditas	2 Low to moderate	2 Satisfactory	2 Low to moderate
4	Risiko Operasional	2 Low to moderate	2 Satisfactory	2 Low to moderate
5	Risiko Hukum	2 Low to moderate	2 Satisfactory	2 Low to moderate
6	Risiko Reputasi	1 Low	2 Satisfactory	1 Low
7	Risiko Strategik	2 Low to moderate	2 Satisfactory	2 Low to moderate
8	Risiko Kepatuhan	2 Low to moderate	2 Satisfactory	2 Low to moderate
9	Risiko Imbal Hasil	3 Moderate	2 Satisfactory	2 Low to Moderate
10	Risiko Investasi	3 Moderate	2 Satisfactory	2 Low to Moderate
Peringkat Komposit		2 Low to Moderate	2 Satisfactory	2 Low to Moderate

26. Konsolidasi dan Integrasi Manajemen Risiko dengan Perusahaan Induk sesuai dengan POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, serta dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara perusahaan anak dan perusahaan induk, Bank Victoria Syariah selaku perusahaan anak selalu mendukung konsolidasi penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh entitas utama yaitu PT Bank Victoria International, Tbk.

BAB 6 - Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

Laporan Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Arus Kas

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Catatan Atas Laporan Keuangan





PT Bank Victoria Syariah

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019/
For the Years Ended December 31, 2020 and 2019

**PT BANK VICTORIA SYARIAH/
PT BANK VICTORIA SYARIAH
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS**

	Halaman/ Page
Laporan Auditor Independen/ Independent Auditors' Report	
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan PT Bank Victoria Syariah untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019/ <i>The Directors' Statement on the Responsibility for Financial Statements of PT Bank Victoria Syariah for the Years Ended December 31, 2020 and 2019</i>	
LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019/ FINANCIAL STATEMENTS – For the Years Ended December 31, 2020 and 2019	
Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas/ <i>Statements of Changes in Equity</i>	4
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	5
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil/ <i>Statements of Reconciliation of Income and Revenue Sharing</i>	7
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat/ <i>Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds</i>	8
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/ <i>Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds</i>	9
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	10

MIRAWATI SENSI IDRIS

Registered Public Accountants
Business License No. 1353/KM.1/2016
Intiland Tower, 7th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Kav 32
Jakarta - 10220
INDONESIA

T +62-21-570 8111
F +62-21-572 2737

Laporan Auditor Independen

No. 00426/2.1090/AU.4/07/0154-2/1/III/2021

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Bank Victoria Syariah**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Victoria Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang ditentukan perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No. 00426/2.1090/AU.4/07/0154-2/1/III/2021

**The Stockholders, Board of Commissioners,
and Directors
PT Bank Victoria Syariah**

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Victoria Syariah, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakah funds, and statement of sources and uses of benevolence funds for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Victoria Syariah tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Victoria Syariah as of December 31, 2020, and its financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakah funds, and sources and uses of benevolence funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Jacinta Mirawati

Izin Akuntan Publik No. AP.0154/Certified Public Accountant License No. AP.0154

30 Maret 2021/March 30, 2021

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

PT BANK VICTORIA SYARIAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name

Alamat Kantor/Office address

Alamat Domisili/sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Residential
Address/in accordance with
Personal Identity Card

Nomor Telepon/Telephone number
Jabatan/Title

2. Nama/Name

Alamat Kantor/Office address

Alamat Domisili/sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Residential
Address/in accordance with
Personal Identity Card

Nomor Telepon/Telephone number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019**

PT BANK VICTORIA SYARIAH

We, the undersigned:

SUGIHARTO

Gedung Graha BIP Lt.5
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.23

Jl. Alam Asri XII/12 SM.7
RT 009/015, Pondok Pinang
Kebayoran Lama – JAKARTA SELATAN

(021) 5600467
Direktur Utama / President Director

DEDDY EFFENDI RIDWAN

Gedung Graha BIP Lt.5
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.23

Taman Sari Persada Blok 16 No.7
RT 003/001, Jatibening Baru
Pondok Gede – BEKASI

(021) 5600467
Direktur / Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements for the years ended December 31, 2020 and 2019.
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

h

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
- b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements, and
- b. The Company's financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.

4. We are responsible for the Company's internal control system.

This statement has been made truthfully.

30 Maret 2021/March 30, 2021



Sugiharto
Direktur Utama / President Director



Deddy Effendi Ridwan
Direktur / Director

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Financial Position
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ASET				ASSETS
Kas	1.817.587.800		1.926.556.100	Cash
Giro pada Bank Indonesia	42.115.858.874	4	77.085.905.034	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	3.049.975.484	5	5.134.077.361	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	248.000.000.000	6	99.000.000.000	Placement with other banks and Bank Indonesia
Efek-efek	712.683.346.578	7	712.304.073.278	Marketable securities
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-		(2.000.000.000)	Less: Allowance for impairment losses
Efek-efek - bersih	712.683.346.578		710.304.073.278	Marketable securities - net
Piutang murabahah	220.403.750.882	8	219.540.543.553	Murabahah receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.930.888.246)		(1.162.890.129)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah piutang murabahah - bersih	218.472.862.636		218.377.653.424	Total murabahah receivables - net
Pembiayaan musyarakah	938.148.736.691	9	988.378.349.665	Musyarakah financing
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(24.225.247.850)		(20.647.166.985)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah pembiayaan musyarakah - bersih	913.923.488.841		967.731.182.680	Total musyarakah financing - net
Pembiayaan mudharabah	6.816.777.400	10	21.230.017.271	Mudharabah financing
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(241.801.769)		(200.359.933)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah pembiayaan mudharabah - bersih	6.574.975.631		21.029.657.338	Total mudharabah financing - net
Piutang Ijarah	171.179.684		171.179.684	Ijarah receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-		-	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah pendapatan ijarah - bersih	171.179.684		171.179.684	Ijarah receivables - net
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	15.107.630.083	11	13.529.862.550	Revenue sharing receivables
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	1.602.331.673		2.464.757.320	Assets acquired for ijarah - net
Penyertaan saham	29.468.550		60.468.550	Investments in shares
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(294.686)		(604.686)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah penyertaan saham - bersih	29.173.864		59.863.864	Total investments in shares - net
Aset tetap	20.560.604.815	12	9.631.604.217	Property and equipment
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(12.255.317.961)		(8.817.837.690)	Less: Accumulated depreciation
Jumlah aset tetap - bersih	8.305.286.854		813.766.527	Total property and equipment - net
Aset tak berwujud	7.874.836.070	13	7.517.021.785	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(6.044.689.580)		(5.237.208.437)	Less: Accumulated amortisation
Jumlah aset tak berwujud - bersih	1.830.146.490		2.279.813.348	Total intangible assets - net
Biaya dibayar di muka	8.682.276.197	14	9.075.854.519	Prepaid expenses
Aset lain-lain	118.501.515.639	15	124.128.506.677	Other assets
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.496.345.601)		(10.640.507.489)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah aset lain-lain - bersih	103.005.170.038		113.487.999.188	Total other assets - net
Aset pajak tangguhan	10.655.395.013	34	19.978.978.112	Deferred tax assets
JUMLAH ASET	2.296.026.685.840		2.262.451.180.327	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Financial Position
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDERS' EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	2.700.640.223	16	1.566.070.089	Liabilities immediately payable
Simpanan giro wadiah	251.344.863.716	17	23.294.654.259	Wadiah demand deposits
Simpanan dari bank lain	260.000.000.000	18	183.000.000.000	Deposits from other banks
Bagi hasil yang belum dibagikan	4.805.984.900	19	3.998.879.515	Undistributed revenue sharing
Liabilitas sewa	8.028.813.492	20	-	Lease liabilities
Pendapatan ditangguhkan	949.506.640		1.102.690.271	Deferred income
Utang pajak	1.857.814.488	21	2.000.073.058	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	2.222.277.313		630.785.907	Other liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	5.377.421.352	33	4.924.171.012	Long term employment benefit liabilities
JUMLAH LIABILITAS	537.287.322.124		220.517.324.111	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER		22		TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Tabungan mudharabah	41.214.400.450		49.927.405.093	Mudharabah saving deposits
Deposito mudharabah	1.337.953.785.605		1.637.427.718.933	Mudharabah deposits
Giro mudharabah	14.175.195		335.222.592	Mudharabah demand deposits
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	1.379.182.361.250		1.687.690.346.618	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
EKUITAS				SHAREHOLDERS' EQUITY
Modal saham				Share capital
Nilai nominal Rp 1.000 per saham, Modal dasar - 1.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor 360.000.000 saham	360.000.000.000	23	360.000.000.000	Nominal value Rp 1,000 per share, Authorized - 1,000,000,000 shares issued and paid-up capital - 360,000,000 shares
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	23.328.255.294	7	(3.095.711.496)	Unrealised gain (loss) from changes in changes in fair value of marketable securities measured through other comprehensive income - net
Saldo laba (defisit)				Retained earnings (deficit)
Telah ditentukan penggunaannya	9.156.165.256	24	9.156.165.256	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	(12.927.418.084)		(11.816.944.162)	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	379.557.002.466		354.243.509.598	TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	2.296.026.685.840		2.262.451.180.327	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDER'S EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib		25		Income from fund management by Bank as mudharib
Pendapatan dari jual beli murabahah	18.470.603.254		29.518.331.679	Income from sales and purchases murabahah
Pendapatan dari bagi hasil:				Income from profit sharing:
Musyarakah	76.272.301.212		90.271.772.833	Musyarakah
Mudharabah	840.610.814		2.594.387.636	Mudharabah
Pendapatan dari ijarah - bersih	231.551.160		420.276.064	Income from ijarah - net
Pendapatan usaha utama lainnya	52.935.110.779		45.213.931.310	Other main operating income
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib	148.750.177.219		168.018.699.522	Total income from fund management by Bank as mudharib
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(112.243.865.295)	26	(118.915.951.607)	Third parties' share on returns of temporary syirkah funds
Hak bagi hasil milik Bank	36.506.311.924		49.102.747.915	Bank's share in profit sharing
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Pendapatan operasional lainnya	15.969.591.869	27	4.476.895.397	Other operating income
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Beban umum dan administrasi	(18.398.612.511)	28	(19.452.329.859)	General and administrative expenses
Beban personalia	(24.427.215.327)	29	(29.160.838.463)	Personnel expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(3.603.754.383)	30	(3.862.374.249)	Provision for impairment losses - net
Beban lainnya	(2.430.222.758)		(756.404.901)	Other expenses
Jumlah beban operasional lainnya	(48.859.804.979)		(53.231.947.472)	Total other operating expenses
LABA OPERASIONAL	3.616.098.814		347.695.840	PROFIT FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH	(204.180.173)	31	720.988.297	NON OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET
LABA SEBELUM PAJAK	3.411.918.641		1.068.684.137	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	3.626.535.374	34	155.352.381	TAX EXPENSES
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(214.616.733)		913.331.756	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified subsequently to profit and loss
Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah dampak pajak tangguhan	26.423.966.790	7	12.390.130.167	Unrealised gain from changes in fair value of marketable securities measured through other comprehensive income - net of tax
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified subsequently to profit and loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - setelah dampak pajak tangguhan	(895.857.189)	33	(309.437.301)	Remeasurement of defined benefit liability - net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	25.313.492.668		12.994.024.622	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek- efek Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain - bersih/ Unrealised Gain (Loss) from Changes in Fair Value of Marketable Securities Through Other Comprehensive Income - Net	Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)		Jumlah Ekuitas/ Shareholders' Equity
			Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019	310.000.000.000	(15.485.841.663)	9.156.165.256	(12.420.838.617)	291.249.484.976
Penghasilan Komprehensif Laba tahun berjalan	-	-	-	913.331.756	913.331.756
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	-	-	-	-	-
Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	7	12.390.130.167	-	-	12.390.130.167
Pengukuran kembali liabilitas imbalance kerja jangka panjang	33	-	-	(309.437.301)	(309.437.301)
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	-	603.894.455	12.994.024.622
Setoran modal	23	50.000.000.000	-	-	50.000.000.000
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	360.000.000.000	(3.095.711.496)	9.156.165.256	(11.816.944.162)	354.243.509.598
Penghasilan Komprehensif Rugi tahun berjalan	-	-	-	(214.616.733)	(214.616.733)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	-	-	-	-	-
Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	7	26.423.966.790	-	-	26.423.966.790
Pengukuran kembali liabilitas imbalance kerja jangka panjang	33	-	-	(895.857.189)	(895.857.189)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif	-	-	-	(1.110.473.922)	(25.313.492.868)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	360.000.000.000	23.328.255.294	9.156.165.256	(12.927.418.084)	379.557.002.466

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib:		12,25		Receipt of income from fund management by Bank as mudharib:
Penerimaan dari jual beli	17.631.710.150		29.602.271.716	Receipt from sales and purchases
Penerimaan dari pendapatan bagi hasil	77.112.912.026		92.248.693.049	Receipt from profit sharing income
Penerimaan dari pendapatan ijarah	231.551.160		420.276.064	Receipt from income ijarah
Penerimaan dari usaha lainnya:		12,25		Receipt from other main operating income:
Efek-efek syariah	48.068.320.259		33.867.375.454	Sharia marketable securities
Administrasi	1.411.182.212		4.482.363.830	Administration income
Giro pada Bank Indonesia dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	564.995.333		1.058.474.306	Current account with Bank Indonesia and Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (FASBIS)
Giro dan penempatan pada bank lain	1.998.554.915		1.926.489.875	Current accounts and placement with other Banks
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(111.436.759.910)	20,26	(118.915.951.607)	Payment of profit sharing of temporary syirkah funds
Penerimaan operasional lainnya	1.070.502.849	27	1.297.040.489	Receipt from other operating income
Pembayaran beban operasional lainnya	(17.660.986.767)	31	(18.857.698.533)	Payment for other operating expenses
Pembayaran beban personalia	(25.122.499.845)	29	(30.009.349.666)	Payment for personnel expenses
Penerimaan (pembayaran) pendapatan (beban) non operasional	(256.337.429)	31	109.301.909	Receipt (payment) from non operating income (expenses)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	(6.386.855.047)		(2.770.713.114)	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				Decrease (increase) in operating assets:
Penempatan pada Bank Indonesia	20.000.000.000	6	(20.000.000.000)	Placement with Bank Indonesia
Piutang murabahah	3.516.590.025	8	25.813.160.233	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	51.166.071.315	9	(52.858.993.596)	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	14.413.239.870	10	35.509.535.462	Mudharabah financing
Aset yang diperoleh untuk ijarah	2.345.476.527		1.197.287.629	Assets acquired for ijarah
Aset lainnya	5.627.605.370	15	673.289.881	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	1.134.570.134	16	(2.808.980.972)	Liabilities immediately payable
Simpanan giro wadiah	228.050.209.457	17	(18.126.938.533)	Wadiah demand deposit
Simpanan dari bank lain	77.000.000.000	18	(34.000.000.000)	Deposit from other Banks
Liabilitas lain-lain	1.591.491.402		(265.962.353)	Other liabilities
Utang pajak	(142.258.570)	21	(244.831.354)	Taxes payable
Dana syirkah temporer	(308.507.985.368)	22	129.970.654.362	Temporary syirkah funds
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	89.808.155.115		62.087.507.645	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian efek-efek				Purchase of marketable securities
diukur pada biaya perolehan	(1.862.361.549)	7	(302.624.670.152)	at cost
Penerimaan dari penjualan efek-efek				Proceeds from sale of marketable securities
diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	47.272.781.205		16.529.790.219	measured at fair value through other comprehensive income
Hasil penjualan aset tetap	90.245.000	12	758.906.911	Proceeds from sale of property and equipment
Perolehan aset tetap	(232.335.807)	12	(81.069.252)	Acquisition of property and equipment
Perolehan aset tak berwujud	(357.814.285)	13	(652.467.855)	Purchase of intangible assets
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	44.910.514.564		(286.069.510.129)	Net Cash Provided from (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran liabilitas sewa	(2.881.785.916)	20	-	Payment of lease liabilities
Penambahan modal disetor	-	23	50.000.000.000	Proceeds from additional issuance of share capital
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(2.881.785.916)		50.000.000.000	Net Cash Provided from (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	131.836.883.763		(173.982.002.484)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	163.146.538.495		337.128.540.979	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	294.983.422.258		163.146.538.495	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents consist of:
Kas	1.817.587.900		1.926.556.100	Cash
Giro pada Bank Indonesia	42.115.858.874	4	77.085.905.034	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	3.049.975.484	5	5.134.077.361	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan	248.000.000.000	6	79.000.000.000	Placement with Bank Indonesia and other Bank with maturity three months or less from acquisition date
JUMLAH	294.983.422.258		163.148.538.495	TOTAL

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Reconciliation of Income and Revenue Sharing
For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
Pendapatan usaha utama (akrual)		25		Main operating income (accrual)
Pendapatan dari jual beli	18.470.603.254		29.518.331.679	Income from sales and purchases
Pendapatan bagi hasil	77.112.912.026		92.866.160.469	Income from profit sharing
Pendapatan dari ijarah - bersih	231.551.160		420.276.064	Income from ijarah - net
				Income from sharia marketable securities
Pendapatan efek-efek Syariah	48.747.088.486		37.746.603.299	Current accounts and deposit with other banks income
Pendapatan giro dan deposito pada bank lain	1.998.554.915		1.926.489.875	Administration income
Pendapatan administrasi	1.411.182.212		4.482.363.830	FASBIS bonus income
Pendapatan bonus FASBIS	387.378.472		1.058.474.306	BI Sharia Certificate income (SBIS)
Pendapatan SBIS	213.289.833		-	Current account with BI income
Pendapatan giro pada BI	177.616.861		-	
	<u>148.750.177.219</u>		<u>168.018.699.522</u>	
Pengurang				Deductions
Pendapatan tahun berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima:		11		Current year income in which the cash and cash equivalents were not received:
Pendapatan bagi hasil murabahah yang akan diterima	1.739.253.851		1.053.544.377	Murabahah revenue sharing receivables
Pendapatan ijarah	11.671.501		11.671.501	Ijarah income
				Revenue sharing marketable securities
Pendapatan bagi hasil efek-efek	13.106.325.174		12.323.036.950	Revenue sharing placement with other banks
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	250.379.557		141.609.722	
	<u>15.107.630.083</u>		<u>13.529.862.550</u>	
Penambah				Additions
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:		11		Prior year income in which the cash were received during the current year:
Penerimaan pelunasan pendapatan bagi hasil murabahah	1.053.544.377		1.169.699.764	Receipt of settlement from murabahah margin income
Penerimaan pendapatan ijarah	11.671.501		11.671.501	Receipt of ijarah income
				Revenue sharing marketable securities
Pendapatan bagi hasil efek-efek	12.323.036.950		8.104.160.493	Revenue sharing placement with other banks
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	141.609.722		481.258.333	
	<u>13.529.862.550</u>		<u>9.766.790.091</u>	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	<u>147.172.409.686</u>		<u>164.255.627.063</u>	Available income for revenue sharing
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	<u>34.928.544.391</u>		<u>45.339.675.456</u>	Bank's share from revenue sharing
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	<u>112.243.865.295</u>	26	<u>118.915.951.607</u>	Fund owners' share from revenue sharing
Dirinci atas:				Details of:
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	107.437.880.395		114.917.072.092	Fund owners' share on distributed revenue sharing
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	4.805.984.900	19	3.998.879.515	Fund owners' share on undistributed revenue sharing
Jumlah	<u>112.243.865.295</u>		<u>118.915.951.607</u>	Total

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds
For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
Sumber Dana Zakat			Sources of Zakah Funds
Zakat dari pihak luar bank	164.190	113.026	Zakah from external banks
Lain- lain	15.889.669	28.909.436	Others
Jumlah	16.053.859	29.022.462	Subtotal
Penyaluran Dana Zakat			Distribution of Zakah Funds
BAZNAS	(15.000.008)	(29.763.260)	BAZNAS
Kenaikan (penurunan) dana zakat	1.053.851	(740.798)	Increase (decrease) in zakah funds
Dana zakat pada awal tahun	15.720.744	16.461.542	Zakah funds at beginning of the year
Dana zakat pada akhir tahun	16.774.595	15.720.744	Zakah funds at end of the year

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds
For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
Sumber Dana Kebajikan			Sources of Benevolence Funds
Infaq dan shadaqah	5.280.000	27.297.860	Infaq and shadaqah
Pendapatan non-halal	-	160.334.248	Non-halal income
Lainnya	77.186.495	848.769	Others
Jumlah	82.466.495	188.480.877	Subtotal
Penggunaan Dana Kebajikan			Use of Benevolence Funds
Sumbangan	(33.604.546)	(212.778.582)	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(57.772.704)	(10.399.433)	Use for other public interest
Jumlah	(91.377.250)	(223.178.015)	Subtotal
Penurunan Sumber Dana Kebajikan	(8.910.755)	(34.697.138)	Decrease in Benevolence Funds
Dana kebajikan pada awal tahun	70.172.070	104.869.208	Benevolence funds at beginning of the year
Dana kebajikan pada akhir tahun	61.261.315	70.172.070	Benevolence funds at end of the year

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disediakan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Victoria Syariah (dahulu PT Bank Swadana) Bank didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 15 April 1966 dan Beres-Daftar Lolo SH Nomor 1 di Jakarta. Aktanya pendirian Bank telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 16.579/66 tanggal 7 November 1967 dan telah dimuatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42, Tambahan No. 62 tanggal 24 Mei 1966.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta No. 48 tanggal 14 November 2017 dan Surat SH MKK, MM, Negeri di Jakarta tentang peninjauan modal dasar dari Rp. 320.000.000.000 menjadi Rp. 1.000.000.000.000. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU/AH/02731/2017 tanggal 03-04-2017 Tahun 2017 tanggal 14 November 2017.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/KEP/08/Dec/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank beroperasi dengan prinsip Syariah mulai tanggal April 2010.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank maka tujuan utama kegiatan usaha Bank adalah menyediakan jasa Bank dengan prinsip Syariah. Bank merupakan bank umum syariah.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Gedung Gramp BIA, Saran, Jalan Jenderal Gajah Mada, Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930 yang juga merupakan Kantor Pusat Operasional dan Kantor Pusat Non Operasional. Bank memiliki kantor cabang di Tembung Jakarta, Bekasi, Bandung, Cirebon, Denpasar dan Solo serta kantor cabang pembantu di Tangerang.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Bank Victoria Syariah (formerly PT Bank Swadana) Bank was established based on Notarial Deed No. 8 dated April 15, 1966 of Beres-Daftar Lolo SH a public company in Jakarta. The Articles of Association was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. 16.579/66 dated November 7, 1967 and published in State Gazette of Republic of Indonesia No. 42, Supplement No. 62 dated May 24, 1966.

The Bank's Articles of Association has been amended several times, with the latest amendment based on Decree No. 48 dated November 14, 2017 of Surat SH MKK, MM, Negeri a public notice in Jakarta concerning the increase in authorized share capital from Rp. 320,000,000,000 to Rp. 1,000,000,000,000. Amendments to the Articles of Association were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU/AH/02731/2017 dated November 14, 2017.

The change of the Bank's operation from conventional Bank to Shariah Bank was approved by Bank Indonesia based on the Decision Letter of Governor of Bank Indonesia No. 12/KEP/08/Dec/2010 dated February 10, 2010. The Bank starts to operate based on sharia principle on April 1, 2010.

In accordance with the Bank's Articles of Association, the aim and objective of the Bank is to provide banking services based on sharia principle. The Bank is a conventional exchange bank.

The Bank's Head Office is located in The Gramp BIA 1st floor Jalan Jenderal Gajah Mada, Subroto Kav. 23 South Jakarta 12930 which is also the Operating Head Office and Non-Operational Head Office. The Bank has branches in Tembung Jakarta, Bekasi, Bandung, Cirebon, Denpasar and Solo, and sub-branches in Tangerang.

2014 Recruitment of participants

2015 Baseline assessment

2016 Intervention

2017 Follow-up assessment

2018 Data analysis

2019 Publication of results

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019
Komisaris Independen	1 orang	1 orang
Direksi	5 orang	5 orang
Dewan Pengawas Syariah	1 orang	1 orang
Total	7 orang	7 orang

Personel manajemen kunci Bank terdiri dari Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Dewan Pengawas Syariah.

Key management personnel of the Bank consists of Commissioners, Directors, Executive Officers, and Board of Sharia Supervisory.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah karyawan Bank masing-masing adalah sejumlah 142 orang dan 130 orang (tidak diaudit).

As of December 31, 2020 and 2019, the total employees of the Bank are 142 and 130 people, respectively (unaudited).

Laporan keuangan PT Bank Victoria Syariah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 telah diselesaikan dan diaudit oleh firma oleh Direksi Bank pada tanggal 30 Maret 2021. Direksi Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

The financial statements of PT Bank Victoria Syariah for the year ended December 31, 2020 was completed and audited by the Board of Directors on March 30, 2021 by the Bank's Directors, and are responsible for the preparation and presentation of the financial statements.

12. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali dinyatakan lain. Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Al-Pecerman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPBS), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PSAK lain, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPBS), Otoritas Jasa Keuangan Regulations and other PSAK as long as does not contradict with sharia principle.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan. Nilai beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing. Akun tersebut laporan keuangan disusun dengan metode akrual sesuai laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan biaya bank yang disusun menggunakan dasar kas.

The measurement basis used in the financial cost except for certain accounts which have presented on the basis described in the related accounting policies. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting except for statement of cash flows and statement of reconciliation of bank and revenue statement which are prepared under cash basis.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah
unless Otherwise Stated)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan menggunakan aliran arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas giro pada bank lain, giro dan penempatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dan jangka perolehan.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of cash flows statement, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with other bank, current accounts and placements with Bank Indonesia with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan laba menunjukkan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dialokasikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Statements of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to funds owners under cash basis.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan amalan sosial dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai penyalur amalan dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana zakat dan zakat dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum dibagikan pada tanggal pelaporan.

Statements of sources and distribution of zakat funds and statements of sources and uses of benevolence funds represents the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity fund which are separately managed. Statements of sources and distribution of zakat funds shows the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds at the reporting date.

Laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan menunjukkan sumber dan penyaluran dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal pelaporan.

Statements of sources and uses of benevolence funds shows the sources and uses of benevolence funds for a certain period, and benevolence funds balance at the reporting date.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam untuk diberikan kepada mustahik penerima zakat. Sumber dana zakat berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk dibagikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Zakat is a portion of the wealth that must be taken out by muzaki (the zakat payer) to be given to mustahik (the zakat receiver). The sources of zakat funds are from Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

Bank tidak secara langsung terlibat dalam pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan. Dana yang terkumpul oleh Bank selanjutnya diserahkan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

The Bank is not directly involved in the management of zakat and benevolence funds. All funds collected by the Bank have been transferred to BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Kecuali untuk dampak penerapan PSAK No. 73 yang efektif diadopsi sejak 1 Januari 2020 sebagai mana diungkapkan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2020 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2019, except for the impact of the adoption of PSAK No. 73, which had been adopted effective January 1, 2020 as disclosed in Note 44 to the financial statements.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah
unless Otherwise Stated)

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan kecuali bila dinyatakan secara khusus adalah disajikan dalam Rupiah penuh.

The currency used in the financial statements is Rupiah (Rp). The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are presented in full amount of Rupiah.

b. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Bank apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

b. Transactions with Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Bank if it meets the definition of a related party in PSAK No. 7 Related Party Disclosures.

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

All significant transactions with related parties are disclosed in the financial statements.

c. Kas dan Setara Kas

Kes terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan nilai tetap dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak mengandung serta tidak dibatasi pada lainnya.

c. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term highly liquid investments that are easily convertible to known amounts of cash with original maturities of three months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

d. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro dan penempatan.

d. Current Accounts and Placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances.

e. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro ditambah dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diberikan Bank dan bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usahanya. Penempatan jasa giro pada bank umum konvensional jika ada tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana ketahanan.

e. Current Accounts with Other Banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses. Bonuses received from other commercial banks are recognized as other operating income. Interest income from conventional commercial banks if any are not recognized as the Bank's income but are used as part of the benevolence funds.

f. Penempatan Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan dana Bank pada bank lainnya yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka mudharabah dan atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

f. Placement with Other Banks

Placement with other banks represent placements in the form of mudharabah, time deposits and/or other forms of placement based on sharia principles.

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Placement with other banks are stated at their outstanding balance, net of allowance for impairment losses.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

investasi, maka akan menerima pembagian
investasi berbasis waktu dimana Bank
akan mendapatkan angka keuntungan
berupa laba diantisipasi. Dana yang
dibekalkan Bank kemudian diinvestasikan
pada produk yang halal. Hasilnya diberikan
kepada Bank sebesar laba aktual jika hasil
investasi berupa laba aktual lebih kecil dari
laba diantisipasi, jika hasil investasi berupa
laba aktual lebih besar dari laba diantisipasi
maka keuntungan Bank perantara adalah
sebesar laba diantisipasi dan selisihnya
akan menjadi pendapatan Bank.

Wakalah investment is placed with based
on Wakalah that the Bank will receive
return in form of anticipated profit. Funds
owed by the Bank will be invested in
halal products. Return distributed to
customer were based on actual profit if the
return on investment was lower than the
anticipated profit. If return from investment
was higher than the anticipated profit, the
investor will receive an amount based on
anticipated profit, while the difference will
be recognized as income of the Bank.

g. Efek-efek

Efek-efek Syariah adalah surat atau
investasi berdasarkan prinsip syariah yang
lazim diperdagangkan di pasar uang syariah
di antara pasar modal syariah antara lain
Surat Efek Syariah (SES) dan Reksadana
Syariah.

Pada saat pengukuran awal, entitas
menentukan klasifikasi investasi pada
sukuk sebagai berikut: pada biaya
perolehan, untuk pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain atau untuk
pada nilai wajar melalui laba rugi.

Sukuk yang diklasifikasikan sebagai untuk
pada biaya perolehan dan pada nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain,
biaya perolehan termasuk biaya transaksi.

Sukuk yang diklasifikasikan sebagai untuk
pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya
perolehan tidak termasuk biaya transaksi.

Investasi pada sukukjarah dan sukuk
Mudharabah setelah pengukuran awal
sukuk sebagai berikut:

- 1) Untuk pada biaya perolehan, jika
investasi tersebut dimiliki dalam
tujuan modal usaha yang bertujuan
dalam untuk memperoleh laba dan
kontraknya mengandung persyaratan
kontrakual menentukan tanggal
terhadap pembayaran pokok dan atau
hasilnya. Selain itu, biaya
perolehan dan nilai nominal
dijelaskan secara garis lurus
selama jangka waktu sukuk. Rasio
pendapatan atau biaya jika jumlah
pendapatan lebih kecil dari jumlah
terhadap dan disajikan sebagai
penurunan nilai dalam laba rugi.

g. Marketable Securities

Sharia Securities are proof of investment
based on Sharia principles that are
commonly traded in the sharia money
market and/or sharia capital markets,
including sharia bonds, sukuk and sharia
mutual funds.

At initial recognition, the entity determines
the classification of investments in sukuk
as measured at cost, at fair value through
other comprehensive income or at fair
value through profit and loss.

Sukuk classified as measured at cost and
at fair value through other comprehensive
income is measured at acquisition cost
including transaction costs.

Sukuk classified as at fair value through
profit and loss, after being at acquisition
cost excluding transaction costs.

Investment in sukukjarah and
Mudharabah after the initial measurement
are measured as follows:

- 1) Measured at acquisition cost. The
investment is held with a business
model whose primary goal is to
obtain the contractual cash flows
and there is a contractual
requirements that specify a specific
date of payment of principal and/or
the results. Difference between the
acquisition cost and the nominal
value is amortized using straight
line basis for a period of the sukuk.
Impairment losses is recognized in
the recoverable amount unless than
the carrying amount and are
presented separately in the statement of
profit or loss and other comprehensive income.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah
Unless Otherwise Stated)

2. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan mengacu kepada kuotasi harga di pasar aktif atau harga yang terjadi pada transaksi terkini jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif atau jika pasar instrumen tersebut tidak aktif dan kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang wajar dan transaksi terkini.

2. Measured at fair value through profit or loss with reference to the price quotations in an active market or the price that occurs in the current transaction if there is no price quotations in an active market or the fair value of similar instrument in active market and no available price from the current transaction.

3. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika dimiliki dalam suatu mode usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual pokok dan bagi instrumen dan melakukan pembelian untuk Pelayaran Kontrak yang menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan arus kasnya. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui dalam laba rugi.

3. Investments are classified as fair value through other comprehensive income if it belongs in a business mode whose primary purpose is to obtain contractual cash flows principal and amortizable and selling such contractual terms determine the specific date of payment of principal and/or results. The difference between the fair value and the carrying amount is recognized in the statement of profit or loss.

b. Piutang Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus menanggungkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.

b. Murabahah Receivables

Murabahah is an agreement of sales transaction for goods in which the selling price is determined based on acquisition cost added with mutually agreed margin and the seller shall disclose the acquisition cost to buyer.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung ke biaya pembelian untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat modal nilai bersih dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets and subsequent recognition are measured at amortized cost based on effective rate or fair method less allowance for impairment losses.

3. Penyertaan Saham

Penyertaan Saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non publik.

3. Investment in Shares

Investment in shares are long-term investment in non-public companies.

Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk penyertaan jangka panjang diavakikan sebagai biaya perolehan metode biaya. Jika terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mendukung penurunan tersebut yang dimaksudkan untuk setiap investasi secara individu dan kerugian diakui dalam laba rugi.

Investments in shares with ownership of less than 20% which the fair value is not available and intended for long-term investments are stated at cost cost method. If there is a permanent impairment, the carrying amount is reduced to recognize the decline that specified for every investment individually and the loss which is charged to the profit or loss.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Bank memiliki penyertaan saham pada
Yayasan Perbanas dengan kepemilikan
masing-masing kurang dari 5%.

The Bank has investment in shares of
Yayasan Perbanas with each percentage
of ownership less than 5%.

1. Pembiayaan

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah
penanaman dana dari pemilik dana
(shahibul maal) kepada pengelola dana
(mudharib) untuk melakukan kegiatan
usaha tertentu dengan menggunakan
bagi hasil (*profit sharing*) atau metode bagi hasil
usaha (*gross profit margin*) antara kedua
pihak untuk berdasarkan usaha yang telah
disepakati sebelumnya. Bank menerapkan
bagi hasil berdasarkan metode *margin laba*
kotor.

1. Financing

Mudharabah Financing

Mudharabah financing is investment of
funds from the owner of funds (*shahibul*
maal) to the fund manager (*mudharib*) to
conduct certain business activity with
profit sharing or gross profit margin
method between the two parties based on
a mutually agreed preferential net rate.
The Bank uses profit sharing scheme
based on gross profit margin method.

Pembiayaan mudharabah dinyatakan
sebagai saldo pembiayaan dikurangi
dengan cadangan kerugian penunahan
risiko. Bank menetapkan cadangan kerugian
penunahan risiko sesuai dengan kualitas
pembiayaan berdasarkan penilaian atas
masing-masing saldo pembiayaan. Apabila
sebagian pembiayaan mudharabah hilang
sebelum dielaborasi usaha karena adanya
kecurangan atau sebab lainnya tanpa
adanya kelalaian atau kesalahan pihak
pengelola dana, maka bagian tersebut
mengurangi saldo pembiayaan
mudharabah dan tidak sebagai kerugian
Bank. Apabila sebagian pembiayaan
mudharabah hilang setelah dielaborasi
usaha tanpa adanya kelalaian atau
kesalahan pengelola dana, maka loss
tersebut dipertanggungjawabkan pada saat
akhir tahun. Kerugian pembiayaan mudharabah
akibat kelalaian atau kesalahan pengelola
dana dibebankan pada pengelola dan tidak
mengurangi saldo pembiayaan
mudharabah.

Mudharabah financing is stated at the
outstanding balance net of allowance for
possible losses. The bank provides
allowance for impairment losses based on
the financing quality as determined by a
review of each account. In the event that a
portion of the mudharabah financing is lost
prior to the start of operations due to
fraud or any other reasons without
negligence or fault of the fund manager,
the loss shall be deducted from
mudharabah financing balance and shall
be recognized as a loss by the Bank. If
part of mudharabah financing is lost after
the commencement of business without
negligence or fault of the fund manager,
such loss is estimated using profit
sharing loss on mudharabah financing
due to negligence or error by the
fund manager is charged to the fund
manager and not deducted from the
balance of mudharabah financing.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad
kerjasama antara dua pihak atau lebih
untuk suatu usaha tertentu dimana
masing-masing pihak menyetor
kontribusi dana dengan ketentuan bahwa
keuntungan dibagi berdasarkan
kepersentase. Sedangkan kerugian
berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana
tersebut meliputi kas atau aset non-kas
yang diperkenankan oleh syariah.
Pembiayaan musyarakah dinyatakan
sebagai saldo pembiayaan dikurangi
dengan cadangan kerugian penunahan
risiko. Bank menetapkan cadangan kerugian
penunahan risiko sesuai dengan kualitas
pembiayaan berdasarkan penilaian atas
masing-masing saldo pembiayaan.

Musyarakah Financing

Musyarakah financing is an agreement
between two or more parties for a
particular business in which each party
contributes funds provided that the profits
are divided according to the agreement,
while losses are based on the portion of
fund contributions. The fund consists of
cash or non-cash assets allowed by
sharia. Musyarakah financing is stated at
outstanding balance net of allowance for
impairment losses. The Bank provides
allowance for impairment losses based on
the financing quality as determined by a
review of each account.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah
unless Otherwise Stated)

16. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

Aset yang diperoleh untuk ijarah adalah aset yang diadakan objek sewa (gaji) dan diakui sebesar harga perolehan. Objek sewa dalam transaksi ijarah disusutkan secara kasibaka, penusutan aset sejenis berdasarkan objek sewa dalam ijarah mutakhir, hingga disusutkan sesuai masa sewa. Aset yang diperoleh untuk ijarah diakui sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi.

17. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, diukurkan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan, sedangkan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi nilai penurunan nilai jika ada. Tanah tidak disusutkan dan diayatkan berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi nilai penurunan nilai jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaannya yang ditetapkan.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun ganda untuk penyusutan mesin dan peralatan serta kendaraan bermotor selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Tahun/Years

Bangunan
Mesin dan peralatan
Kendaraan bermotor

20
5-8
4-8

Nilai tercatat aset tetap diaudit kembali dan dilakukan peninjauan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Pada setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset jika biaya setiap inspeksi signifikan apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

18. Assets Acquired for Ijarah

Assets acquired for ijarah represent assets that are objects of lease transactions (jarah) and are recognised at the acquisition cost. The assets in an ijarah transaction are depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while in an ijarah mutakhir, the asset for lease is depreciated over the lease period. Assets acquired for ijarah are presented at the acquisition cost less accumulated depreciation and amortisation.

19. Property and Equipment

Property and equipment except land are carried at cost excluding day to day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value. Land is not depreciated and is stated at cost less any impairment value.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Depreciation are computed on a straight-line method for building and double declining balance method for machine and equipment and motor vehicle over the useful lives as follows:

Bangunan
Machine and equipments
Motor vehicle

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount on the date of property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection cycle.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah
unless Otherwise Stated)

Jumlah tercatat aset tetap diidentifikasi berdasarkan pada saat diabaikan atau tidak ada manfaat ekonomis maya di masa yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengukuran aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengukuran.

Nilai aset tetap, umur manfaat, serta metode penyusutan/deteriorasi setiap aset tetap dan dilakukan penyesuaian apabila hasil relasi berbeda dengan estimasi sebelumnya.

m. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud yang dimiliki oleh Bank berupa aplikasi, perangkat lunak dan lisensi APLI.

Aplikasi perangkat lunak dan lisensi APLI diakui sebagai aset tak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Aplikasi perangkat lunak dan lisensi APLI diukur menggunakan straight line method selama masa estimasi manfaat ekonomis aset yang bersangkutan.

n. Transaksi Sewa

Selanjut Januari 2020

Bank menerapkan PSAK No. 73 yang menyatakan pengakuan liabilitas sewa selanjutnya sebagai sewa yang sepenuhnya diidentifikasi sebagai sewa operasi. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau yang telah berubah pada atau setelah Januari 2020.

Sebagai penyewa

Bank menganggap pemilikan kontrak. Bank menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset untuk dipertukarkan dengan imbalan.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of property and equipment is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The asset valuation, useful life, asset type, and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate at each financial year-end.

m. Intangible Assets

Intangible assets held by the Bank are application software and APLI license.

The application software and APLI license is recorded as an intangible asset and is stated at cost less accumulated amortization.

The application software and APLI license are amortized using straight line method over the estimated useful life of the assets, which is 3 (three) years.

n. Lease Transactions

From January 2020

The Bank has applied PSAK No. 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases, which had been previously classified as operating lease. This policy is applied to contracts entered into or changed on or after January 1, 2020.

As lessee

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract or contains a lease. A contract contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah
unless Otherwise Stated)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Bank harus menilai apakah:

- i. Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi dan;
- ii. Bank memiliki hak untuk mengotakotaki penggunaan aset identifikasi. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya.

i. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset.

Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode pengundutan.

Pada tanggal awal zamanarwa kontrak atau pada tanggal penutupan kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Bank mengotakotaki jabatan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen-komponennya.

Pada tanggal penutupan sewa, Bank mengakui aset tak guna dan liabilitas sewa. Aset tak guna dari pada biaya perolehan, kurang minus jumlah pengurangan aset liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal penutupan.

Aset tak guna kemudian disajikan menggunakan metode garis lurus dan jumlah penjumlahan, jumlah tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset tak guna atau akhir masa sewa.

Pembayaran sewa dalam pada dan dari pembayaran sewa yang diterima dipayai pada tanggal penutupan, didiskontokan dengan menggunakan tingkat sewa implisit dalam sewa atau jika tingkat sewa tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan tingkat sewa. Pada umumnya, Bank menggunakan sewa sebagai tingkat sewa diskonto.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

- i. The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- ii. The Bank has the right to direct the use of the asset. The Bank has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined.

i. The Bank has the right to operate the asset.

The Bank has designed the asset with a way that predetermines how and for what purpose it will be used.

At the inception of or, on reassessment of a contract that contains a lease component, the Bank allocates the consideration in the contract to each lease component, on the basis of their relative stand-alone prices, and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Bank recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost which comprises the initial amount of the lease liability, adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

Right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the lease rate implicit in the lease or if that rate cannot be readily determined, using Bank rate. Generally, the Bank uses its lease as the discount rate.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- Pembayaran sewa yang bergantung pada indeks atau tingkat imbalan yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau tingkat imbalan pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Bank cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Bank cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat sewa periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Bank memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Bank mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Bank is reasonably certain to exercise; and penalties for early termination of a lease unless the Bank is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of lease on the remaining balance of the liability for each period.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Short-term leases

The Bank has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Bank recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal awal sewa. Perjanjian tersebut ditelaah apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset secara signifikan berada pada pesewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi dibebankan dalam laba rugi secara garis lurus selama masa sewa.

o. Aset Lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari setoran jaminan, uang muka, agunan yang diambil alih ("AYDA"), properti terbengkalai dan tagihan lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke pos-pos sebelumnya.

AYDA diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya, maksimum sebesar kewajiban nasabah pembiayaan. Bank tidak dapat mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. AYDA tidak disusutkan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan AYDA (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari AYDA) diperhitungkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Prior to January 1, 2020

The determination of whether an arrangement is or contains a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in the arrangement.

Leases in which a significant portion of the risks and rewards incidental to ownership retained by the lessor are classified as operating leases.

Payments made under operating leases are charged profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

o. Other Assets

Other assets consist of deposit guarantee, advances, foreclosed assets, abandoned properties and other assets that cannot be classified to previous accounts.

At initial recognition, foreclosed assets are measured at carrying amount and its fair value less cost to sell, whichever is lower such that the maximum amount represents the customer's outstanding amount balance. The Bank cannot recognise profit when acquiring the assets. After initial recognition, foreclosed assets are recognised at carrying value and fair value less cost to sell, whichever is lower. Foreclosed assets are not depreciated.

Any gain or loss arising from the sale of foreclosed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the foreclosed asset) is included in the profit or loss in the period such asset is derecognized.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

p. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro dan penempatan pada bank lain, efek-efek, piutang murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi.

Aset non-produktif adalah aset selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, dan antara lain terdiri dari rekening antar kantor, rekening rupa-rupa, agunan yang diambil alih, dan properti terbengkalai.

Kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai aset tertentu mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" dan POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Berdasarkan POJK diatas, klasifikasi aset dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif dan non produktif adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Persentase Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/Percentage of Allowance for Impairment Losses		Classification
Lancar	Minimum/Minimum of	1%	Current
Dalam perhatian khusus	Minimum/Minimum of	5%	Special mention
Kurang lancar	Minimum/Minimum of	15%	Substandard
Diragukan	Minimum/Minimum of	50%	Doubtful
Macet		100%	Loss

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, kecuali untuk aset yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai.

p. Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts and placements with other banks, marketable securities, murabahah receivables, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets, which have potential loss, and consists of inter-office accounts, suspense accounts, foreclosed assets, and abandoned properties.

The quality and allowance for impairment losses of certain assets are based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 19/POJK.03/2018 dated 20 September 2018 concerning "Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/2014 concerning Asset Quality Assessment for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units" and POJK No. 11/POJK.03/2020 dated March 13, 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019.

Based on the above POJK, the classification and allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets are as follow:

The above percentages are applied to the outstanding balance of assets less the value of eligible collateral in line with above regulation, except for those classified as current and are not secured by cash collateral.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan Pemerintah tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Aset produktif atas piutang murabahah sesuai dengan PSAK No. 50, 55 dan 102 (Revisi 2019) "Akuntansi *Murabahah*", dan aset produktif atas giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga mengacu pada PAPS 2013.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang murabahah telah mengalami penurunan nilai. Piutang murabahah mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

1. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
2. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
3. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
4. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit;
5. melakukan reorganisasi keuangan lainnya; hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
6. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - a. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan

Bonds issued by the Government based on sharia principle, Bank Indonesia Sharia Certificates and part of earning assets which are secured with Government guarantee do not have allowance for impairment losses.

Earning assets for murabahah receivables are in accordance with PSAK No. 50, 55 and 102 (Revised 2019) "Accounting for Murabahah" and earning assets for current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks and investment in marketable securities are in accordance with PAPS 2013.

At each of the statement of financial position date, the Bank assesses whether there is objective evidence that murabahah receivables are impaired. Murabahah receivables are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition and that the loss event has an impact on the future cash flows that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

1. significant financial difficulty of the issuer or obligor;
2. a breach of contract, such as a default or delinquency in margin or principal payments;
3. the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
4. there is a probability that the borrower will enter into bankruptcy;
5. conduct other financial reorganization, the disappearance of an active market for the financial asset because of financial difficulties; or
6. observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has yet been identified individually in the portfolio, including:
 - a. adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- b. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas piutang murabahah. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara individual, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok piutang murabahah yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Piutang murabahah yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Perhitungan penurunan nilai secara individu

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika piutang murabahah tersebut memiliki bukti obyektif penurunan nilai.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk piutang murabahah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat piutang murabahah dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat imbal hasil efektif awal dari piutang murabahah tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laba rugi.

- b. national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 months to 12 months; in exceptional cases longer periods are warranted.

The Bank first assesses whether the objective evidence of impairment exist or not. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed murabahah receivables, it includes the asset in a group of murabahah receivables with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Murabahah receivables that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognised are not included in a collective assessment of impairment.

Individual impairment calculation

The Bank determines that murabahah receivables should be evaluated for impairment individually if murabahah receivable which have an objective evidence of impairment.

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for murabahah receivables with substandard, doubtful and loss collectability.

The amount of impairment loss is measured as the difference between the murabahah receivables' carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the murabahah receivables' original effective rate of return. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment loss account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas piutang murabahah dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised murabahah receivables reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Collective impairment calculation

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif jika piutang murabahah tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if murabahah receivables do not have objective evidence of impairment.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Piutang murabahah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Allowance for impairment loss on murabahah receivables that are collectively evaluated, are calculated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Murabahah receivables are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

Bank menggunakan metode analisis model statistik yaitu metode analisis migrasi untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan data historis 3 tahun.

The Bank applies statistical model analysis method, which are migration analysis methods, to assess the allowance for impairment losses which collectively assessed, using 3 years historical data.

Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap piutang murabahah yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan atas piutang murabahah yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar imbal hasil yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laba rugi.

Losses are recognised in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against murabahah receivables carried at amortised cost. Income on the impaired murabahah receivables continues to be recognised using the rate of return used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognised is reversed through profit or loss.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

q. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

r. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank.

s. Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain

Simpanan merupakan titipan pihak lain berdasarkan prinsip wadiah yadh dhamanah dalam bentuk giro wadiah.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Giro wadiah dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro wadiah.

Simpanan dari bank lain adalah simpanan syariah dalam bentuk Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada bank lain.

t. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer merupakan investasi dari pihak lain dengan akad mudharabah mutlaqah, dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan giro mudharabah.

Tabungan mudharabah dan giro mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank.

q. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

r. Liabilities Immediately Payable

Liabilities immediately payable represents the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority which are stated at the amounts of the Bank's liabilities.

s. Deposits from Customers and Other Banks

Deposits represent other parties' deposits based on the wadiah yadh dhamanah principle in the form of wadiah demand deposit.

Wadiah demand deposit is a yadh dhamanah demand deposit in which the funds owner will get a bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount of wadiah demand deposit value.

Deposits from other banks are sharia deposits in the form of Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA). Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

t. Temporary Syirkah Funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) to manage investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits, and mudharabah demand deposits.

Mudharabah savings deposits and mudharabah demand deposits represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana, kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

u. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi murabahah, pendapatan bagi hasil dari mudharabah dan musyarakah, pendapatan dari sewa (ijarah) dan pendapatan usaha utama lainnya.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi pendapatan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai non-performing. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai non-performing dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima pada laporan komitmen dan kontinjensi.

Pengakuan pendapatan transaksi ijarah

Pendapatan ijarah diakui selama masa akad secara proporsional.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the Bank does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses incurred due to the Bank's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because it has maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised profit from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio (nisbah).

u. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib

Revenue from fund management by Bank as mudharib consists of income from sales and purchases murabahah transactions, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing, income from lease (ijarah) and other main operating income.

The Bank determines the risk rate policies based on the internal regulation. The Bank terminates the amortisation of deferred income when financing is classified as non-performing. The Bank's income from business transactions that are classified as non-performing is recorded as revenue to be received in the statement of commitments and contingencies.

Revenue recognition of ijarah transaction

Income from ijarah is recognised proportionally over the period of the contract.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pengakuan pendapatan transaksi
musyarakah dan mudharabah

Pendapatan bagi hasil musyarakah yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dan proyek hasil usaha.

Pengakuan pendapatan transaksi
murabahah

Pengakuan pendapatan atas piutang murabahah diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang murabahah untuk memperoleh biaya perolehan diamortisasi dari piutang murabahah. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang murabahah tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

v. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah kas yang telah diterima dari bagi hasil.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari laba kotor Bank (*gross profit margin*).

Revenue recognition of musyarakah
and mudharabah transaction

Profit sharing income for passive partner in musyarakah is recognised in the period when the right arises in accordance with the agreed sharing ratio.

Profit sharing income from mudharabah is recognised in the period when the right arises in accordance with the agreed sharing ratio and the recognition based on projection of income is not allowed.

Revenue recognition of murabahah
transaction

The revenue recognition of murabahah receivables are recognised in profit or loss using the effective rate of return method.

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate that exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the murabahah receivable to obtain the carrying amount of a murabahah receivable. When calculating the effective rate of return, the Bank estimates future cash flows by considering all contractual terms of the murabahah receivable, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in a contract that are an integral part of the effective rate of return, transaction costs, and all other premiums or discounts.

v. Third Parties' Share on Returns of Temporary Syirkah Funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian didistribusikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan margin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely earned by the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

w. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan administrasi merupakan pendapatan atas jasa administrasi pembiayaan dan jasa perbankan lainnya. Pendapatan administrasi diakui langsung dalam laporan laba rugi pada saat transaksi dilakukan, kecuali atas pendapatan administrasi yang diperhitungkan dalam imbal hasil efektif atas piutang murabahah.

w. Income and Expense Recognition

Administration income is income from financing administration services and other banking services. Administration income is directly recognised into profit or loss at the transaction date, except for administration income that is an integral part of effective return of murabahah receivables.

Pendapatan dan beban lainnya diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

Revenues and expenses are recognized when incurred using accrual basis.

x. Imbalan Kerja

x. Employee Benefits

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Short-term Employee Benefits Liability

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Long-term Employee Benefits Liability

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the Projected Unit Credit. Remeasurement is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

<i>Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)</i>	<i>Termination Benefits</i>
<p>Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja diakui sebagai liabilitas dan beban dalam laporan keuangan. Jika pesangon ini jatuh tempo lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, maka besarnya liabilitas pesangon disajikan sebesar nilai kini yang didiskontokan.</p>	<p>Termination benefits are recognized as a liability and an expense in the financial statements. If the termination benefit falls due in a period in excess of twelve (12) months from the statement of financial position date, the termination benefit liability are presented at its discounted amount.</p>
y. Pajak Penghasilan	y. Income Tax
<p><i>Pajak Kini</i></p> <p>Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.</p> <p><i>Pajak Tangguhan</i></p> <p>Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.</p> <p>Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.</p> <p>Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini.</p>	<p><i>Current Tax</i></p> <p>Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.</p> <p><i>Deferred Tax</i></p> <p>Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.</p> <p>Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.</p> <p>Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities.</p>
z. Dana Zakat Dan Kebajikan	z. Zakah Funds and Benevolence Funds
<p>Dana zakat dan dana kebajikan pengelolaannya diserahkan kepada Unit Pengelola Zakat Bank Victoria Syariah lalu kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) pada tahun 2020 dan 2019.</p>	<p>The management of zakah and benevolence funds is delegated to Unit Pengelola Zakat Bank Victoria Syariah then to BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) in 2020 and 2019.</p>

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

Penalties/sanctions are charged to customers who are able to pay, but deliberately delay payments, in the amount that are not agreed and not determined in the contract. The funds from penalties/sanctions will be used for charity funds/benevolence funds.

aa. Provisi

Provisi diakui jika Bank mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Bank harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

aa. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Bank will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

bb. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

bb. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Bank statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Bank, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

3. Management Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Bank's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

- a. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari Piutang Murabahah

Kondisi spesifik nasabah yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang murabahah dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan nasabah dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio piutang murabahah dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan pencadangan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan nasabah tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements:

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

- a. Allowance for Impairment losses on Murabahah Receivables

In the calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables, the specific condition of impaired customer is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the customer's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of murabahah receivables with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific customer allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Bank. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Bank diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diungkapkan pada Catatan 12.

b. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Estimated Useful Lives of Property and Equipment

The useful life of each of the item of the Bank's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

The carrying values of these assets as of December 31, 2020 and 2019 is disclosed in Note 12.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Penurunan Nilai Aset Non-Produktif

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Bank.

Nilai tercatat aset non-produktif berupa agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diungkapkan pada Catatan 15.

c. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 33 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Bank dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, diungkapkan pada Catatan 33.

b. Impairment of Non-Productive Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Bank's operations.

The carrying values of non-productive assets in the form of foreclosed assets and abandoned properties as of December 31, 2020 and 2019 are set out in Note 15.

c. Long-term Employee Benefits

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 33 and include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Bank's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are appropriate and reasonable, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

The carrying value of long-term employee benefits liability as of December 31, 2020 and 2019 are set out in Note 33.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

d. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 34.

4. Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia merupakan saldo giro pada Bank Indonesia dalam mata uang Rupiah. Saldo giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 42.115.858.874 dan Rp 77.085.905.034.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2020 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 "Perubahan keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah", yang berlaku efektif 1 Agustus 2020, dimana besarnya GWM Bank ditetapkan sebesar 3,0% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2019 dihitung berdasarkan PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang "Perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif 1 Juli 2019, dimana besarnya GWM Bank ditetapkan sebesar 4,5% dana pihak ketiga dalam Rupiah. Ketentuan tersebut juga mengubah tentang batas bawah dan batas atas target GWM Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah menjadi sebesar 84% - 94%.

d. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Deferred tax assets are disclosed in Note 34.

4. Current Accounts with Bank Indonesia

Current accounts with Bank Indonesia is a balance of current accounts with Bank Indonesia in Rupiah. Current accounts with Bank Indonesia as of December 31, 2020 and 2019 is Rp 42,115,858,874 and Rp 77,085,905,034, respectively.

Balance of current accounts with Bank Indonesia is provided to fulfill the Statutory Minimum Reserves (GWM) by Bank Indonesia.

The GWM ratio as of December 31, 2020 is calculated based on Regulation of the Board of Governors (PADG) No. 22/19/PADG/2020 dated July 29, 2020 concerning "the Second Amendment to the Members of the Board of Governors' Regulation No. 20/10/PADG/2018 concerning Statutory Reserves in Rupiahs and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units", effective August 1, 2020, wherein the amount of Bank's GWM which is set at 3.0% of third party funds in Rupiah.

The GWM ratio as of December 31, 2019 is calculated based on Regulation of the Board of Governors No. 21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019 concerning "the Second Amendment to the Members of the Board of Governors' Regulation No. 20/10/PADG/2018 concerning Statutory Reserves in Rupiahs and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units", effective July 1, 2019, wherein the amount of GWM which is set at 4.5% of third party funds in Rupiah. This regulation also amends the lower and upper limit of the GWM's target of the Sharia Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) target to be 84% - 94%.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/4/PADG/2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No 22/4/PBI/2020 Tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona. Besaran insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian ditetapkan sebesar 0,5%.

Rasio GWM dalam Rupiah Bank sebesar 3,07% dan 4,53% pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Based on regulation of Members of the Board of Governors No. 22/4/PADG/ 2020 Regarding the Implementation of Bank Indonesia Regulation No. 22/4/PBI/2020 Regarding Incentives for Banks Providing Funds for Certain Economic Activities to Support the Handling of the Economic Impacts of the Corona Virus Outbreak. The amount of allowance incentives for the fulfillment of Statutory Reserves in rupiah which must be fulfilled daily is set at 0.5%.

The Bank's GWM ratio in Rupiah are 3.07% and 4.53% as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

The Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the GWM as of December 31, 2020 and 2019.

5. Giro pada Bank Lain

	2020	2019
Pihak berelasi (Catatan 35)		
PT Bank Victoria International Tbk	837.063.230	501.207.458
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	1.056.522.365	2.962.796.833
PT Bank Syariah Mandiri	974.303.163	517.483.427
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	175.839.229	219.632.644
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.560.637	930.733.271
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.686.860	2.223.728
Jumlah pihak ketiga	2.212.912.254	4.632.869.903
Jumlah giro pada bank lain	3.049.975.484	5.134.077.361

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas giro pada bank lain sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen, kolektibilitas seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah lancar.

Tingkat pengembalian (bonus dan bunga) per tahun adalah sebesar 0,00%-2,00% pada tahun 2020 dan 2019.

5. Current Accounts with Other Banks

Related party (Note 35)	
PT Bank Victoria International Tbk	
Third parties	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank Syariah Mandiri	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	
Total third parties	
Total current accounts with other banks	

Management believes that there is no impaired current accounts with other banks, therefore, no allowance for impairment losses is provided for.

Based on the management review, all current accounts with other banks as of December 31, 2020 and 2019 are classified as current.

Average annual rates of return (bonus and interest) range 0.00%-2.00% in 2020 and 2019, respectively.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

6. Penempatan pada Bank Lain dan Bank Indonesia

6. Placement with Other Banks and Bank Indonesia

Jenis Penempatan	Jangka Waktu/ Term	2020		Type of Placement
		Tingkat bagi hasil/ Revenue sharing Rate %	Pihak Ketiga/ Third Parties	
Penempatan pada Bank Indonesia Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	1 hari/day	4,25	33.000.000.000	Placements with Bank Indonesia Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (FASBIS)
Penempatan pada bank lain Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	7-50 hari/days	3,75 - 5,85	215.000.000.000	Placements with other banks Certificate of Interbanks Mudharabah Investment (SIMA)
Jumlah			248.000.000.000	Total

Jenis Penempatan	Jangka Waktu/ Term	2019		Type of Placement
		Tingkat bagi hasil/ Revenue sharing Rate %	Pihak Ketiga/ Third Parties	
Penempatan pada Bank Indonesia Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	2 hari/days	4,25	79.000.000.000	Placements with Bank Indonesia Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (FASBIS)
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	183 hari/days	5,09	20.000.000.000	Bank Indonesia Sharia Certificate (SBIS)
Jumlah			99.000.000.000	Total

Penempatan pada bank lain berupa Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank merupakan penempatan pada:

Details of placements with other banks in the form is of Certificate of Interbanks Mudharabah Investment are as follows:

2020	
PT Bank Mega Syariah	105.000.000.000
PT Bank BJB Syariah	90.000.000.000
PT BPD Kaltimara	20.000.000.000
Jumlah	215.000.000.000

PT Bank Mega Syariah
PT Bank BJB Syariah
PT BPD Kaltimara
Total

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada bank lain sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that there is no impaired placement with other banks, therefore, no allowance for impairment losses is provided for.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, kolektibilitas seluruh penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah lancar.

Based on management review, all placement with other banks as of December 31, 2020 and 2019 are classified as current.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

7. Efek-efek**a. Berdasarkan jenis**

	2020	2019
Diukur pada biaya perolehan		
Surat Berharga Syariah Negara	214.775.725.396	199.766.770.120
Sukuk Korporasi	-	1.998.525.209
Jumlah diukur pada biaya perolehan	214.775.725.396	201.765.295.329
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Surat Berharga Syariah Negara	465.678.691.520	381.935.759.770
Sukuk Korporasi	17.209.800.000	96.549.146.440
Jumlah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	482.888.491.520	478.484.906.210
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		
Reksadana Syariah	15.019.129.662	15.159.757.259
Surat Berharga Syariah Negara	-	16.894.114.480
Jumlah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	15.019.129.662	32.053.871.739
Jumlah	712.683.346.578	712.304.073.278
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(2.000.000.000)
Bersih	712.683.346.578	710.304.073.278

b. Berdasarkan jatuh tempo

	2020	2019
Kurang dari 3 bulan	55.546.000.000	7.353.000.000
Lebih dari 3 sampai dengan 12 bulan	34.930.036.776	354.449.082.745
Lebih dari 12 sampai dengan 60 bulan	25.060.882.717	202.315.447.923
Lebih dari 5 tahun	597.146.427.085	146.186.542.610
Surat-surat berharga - bersih	712.683.346.578	710.304.073.278

c. Berdasarkan kolektibilitas

	2020	2019
Lancar	712.683.346.578	710.305.548.068
Macet	-	1.998.525.210
Jumlah	712.683.346.578	712.304.073.278
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(2.000.000.000)
Jumlah - bersih	712.683.346.578	710.304.073.278

7. Marketable Securities**a. By type**

At cost	
Sharia Government Bonds	
Corporate sukuk	
Total At cost	
Fair value through other comprehensive income	
Sharia Government Bonds	
Corporate sukuk	
Total fair value through other comprehensive income	
At fair value through profit or loss	
Sharia Mutual Funds	
Sharia Government Bonds	
Total fair value through profit or loss	
Total	
Less:	
Allowance for impairment losses	
Net	

b. By maturity

Less than 3 months	
More than 3 to 12 months	
More than 12 to 60 months	
More than 5 years	
Marketable securities - net	

c. By collectibility

Current	
Loss	
Total	
Less:	
Allowance for impairment losses	
Net	

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

d. Tingkat pengembalian rata-rata per tahun

	2020
Sukuk Bank Indonesia	3,75%
Sukuk Korporasi	8,50% - 9,00%
Surat Berharga Syariah Negara	5,45% - 8,88%

d. Rate of annual average return

	2019
Bank Indonesia Sukuk	5,00%
Corporate Sukuk	7,50% - 9,60%
Sharia Government Securities Bonds	5,45% - 8,88%

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal tahun	2.000.000.000	1.300.000.000
Pencadangan (pemulihan)		
selama tahun berjalan (Catatan 30)	(516.911.751)	700.000.000
Penghapusan	(1.483.088.249)	-
Saldo akhir tahun	-	2.000.000.000

e. Movement of allowance for impairment losses on securities are as follows:

Beginning balance	
Allowance (recovery) for impairment losses in current year (Note 30)	
Write off	
Ending balance	

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas efek-efek pada tanggal 31 Desember 2020 sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai dan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan timbul akibat tidak tertagihnya efek-efek.

Management believes that is no impaired marketable securities as of December 31, 2020, therefore, no allowance for impairment losses is provided for, and the allowance for impairment losses on securities as of December 31, 2019 are adequate to cover the losses which might arise from uncollectible securities.

Nilai wajar dari surat berharga (termasuk obligasi Pemerintah) yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar
Rp 212.487.632.168 dan
Rp 183.388.037.410.

The fair values of marketable securities carried at cost (including government bonds) as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 212,487,632,168 and Rp 183,388,037,410, respectively.

8. Piutang Murabahah

a. Berdasarkan jenis

	2020	2019
Pihak berelasi (Catatan 35)		
Konsumsi	538.282.509	685.857.177
Pihak ketiga		
Modal kerja	111.247.792.406	110.114.151.147
Investasi	68.046.047.844	76.223.739.180
Konsumsi	40.571.628.123	32.516.796.049
Jumlah	219.865.468.373	218.854.686.376
Jumlah	220.403.750.882	219.540.543.553
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.930.888.246)	(1.162.890.129)
Jumlah - bersih	218.472.862.636	218.377.653.424

8. Murabahah Receivables

a. By type

Related parties (Note 35)	
Consumer	
Third parties	
Working capital	
Investment	
Consumption	
Subtotal	
Total	
Less:	
Allowance for impairment losses	
Net	

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 35)			Related parties (Note 35)
Lain-lain	538.282.509	685.857.177	Others
Pihak ketiga			Third parties
Jasa-jasa dunia usaha	57.028.168.541	62.857.794.361	Business services
Perdagangan lain	44.970.701.458	33.684.566.457	Other trading
Konstruksi	43.084.555.165	50.158.323.016	Construction
Perdagangan besar dan eceran	27.600.676.715	30.353.999.292	Large trading and retail
Industri pengolahan lainnya	6.609.738.371	7.531.189.420	Other processing industry
Lain-lain	40.571.628.123	34.268.813.830	Others
Jumlah	219.865.468.373	218.854.686.376	Subtotal
Jumlah	220.403.750.882	219.540.543.553	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.930.888.246)	(1.162.890.129)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	218.472.862.636	218.377.653.424	Net

b. By economic sector

c. Berdasarkan jangka waktu pembiayaan

	2020	2019	
1 sampai dengan 2 tahun	32.908.675.125	69.199.994	1 year to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	96.636.142.173	42.699.734.796	2 years to 5 years
Lebih dari 5 tahun	90.858.933.584	176.771.608.763	More than 5 years
Jumlah	220.403.750.882	219.540.543.553	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.930.888.246)	(1.162.890.129)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	218.472.862.636	218.377.653.424	Net

c. By period of financing

d. Berdasarkan kolektibilitas

	2020	2019	
Lancar	195.661.481.154	194.762.629.945	Current
Dalam perhatian khusus	6.859.942.992	8.156.461.448	Special mention
Kurang lancar	-	247.962.578	Substandard
Diragukan	1.107.601.547	314.593.710	Doubtful
Macet	16.774.725.189	16.058.895.872	Loss
Jumlah	220.403.750.882	219.540.543.553	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.930.888.246)	(1.162.890.129)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	218.472.862.636	218.377.653.424	Net

d. By collectability

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai			e. Movement of allowance for impairment losses
	2020	2019	
Saldo awal tahun	1.162.890.129	2.072.981.878	Beginning balance
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 30)	(3.417.926.339)	(2.569.480.232)	Recovery for impairment losses in current year (Note 30)
Penerimaan kembali pembiayaan yang dihapus bukukan	4.185.924.456	1.659.388.483	Reversal from write off financing
Saldo akhir tahun	1.930.888.246	1.162.890.129	Ending balance
Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah yang telah dibentuk pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang murabahah.		Management believes that the allowance for impairment losses as of December 31, 2020 and 2019 is sufficient to cover all possible losses arising from uncollected murabahah receivables.	
f. Mutasi pembiayaan murabahah yang dihapus buku			f. The movement of murabahah financing written-off
	2020	2019	
Saldo awal tahun	55.067.401.476	56.726.789.959	Beginning balance
Mutasi selama tahun berjalan			Movement during the year
Penerimaan kembali	(4.185.924.456)	(1.659.388.483)	Reversal
Hapus tagih	(63.557.642)	-	Delete notes
Saldo akhir tahun	50.817.919.378	55.067.401.476	Ending balance
g. Tingkat margin rata-rata per tahun			g. Average annual margin rate
Tingkat margin rata-rata per tahun adalah sebesar 12,09% dan 12,01% pada tahun 2020 dan 2019.		Average annual margin rate is 12.09% and 12.01% in 2020 and 2019, respectively.	
h. Pembiayaan bersama			h. Joint financing
Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang murabahah termasuk fasilitas pembiayaan bersama <i>without recourse</i> dengan perusahaan pembiayaan sebesar Rp 14.473.361.668 dan Rp 34.146.013.170.		As of December 31, 2020 and 2019, murabahah receivables include joint financing without recourse with multifinance companies amounted to Rp 14,473,361,668 and Rp 34,146,013,170, respectively.	
i. Piutang murabahah direstrukturisasi			i. Restructured murabahah receivables
Piutang murabahah yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 87.462.049.963 dan Rp 32.794.517.484 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.		Restructured murabahah receivables amounted to Rp 87,462,049,963 and Rp 32,794,517,484 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.	

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

9. Pembiayaan Musyarakah**a. Berdasarkan jenis**

	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 35)			Related parties (Note 35)
Modal kerja	-	20.000.000.000	Working capital
Konsumsi	-	71.890.182	Consumption
Jumlah pihak berelasi	-	20.071.890.182	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Modal kerja	917.136.784.569	947.008.786.682	Working capital
Investasi	16.099.706.616	16.355.242.173	Investment
Konsumsi	4.912.245.506	4.942.430.628	Consumption
Jumlah pihak ketiga	938.148.736.691	968.306.459.483	Total third parties
Jumlah	938.148.736.691	988.378.349.665	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24.225.247.850)	(20.647.166.985)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	913.923.488.841	967.731.182.680	Net

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 35)			Related parties (Note 35)
Perdagangan lain	-	20.071.890.182	Other trading
Pihak ketiga			Third parties
Jasa-jasa dunia usaha	749.294.522.350	736.733.617.057	Business services
Industri pengolahan lainnya	104.586.543.934	106.203.510.243	Other processing industry
Perdagangan eceran	54.163.871.895	85.878.957.866	Retail
Perdagangan lain	16.911.764.702	24.892.430.628	Other trading
Konstruksi	13.192.033.810	14.597.943.689	Construction
Jumlah pihak ketiga	938.148.736.691	968.306.459.483	Total third parties
Jumlah	938.148.736.691	988.378.349.665	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24.225.247.850)	(20.647.166.985)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	913.923.488.841	967.731.182.680	Net

c. Berdasarkan jangka waktu pembiayaan

	2020	2019	
Kurang dari 1 tahun	119.131.235.334	68.300.000.000	Less than 1 year
1 sampai dengan 2 tahun	145.170.987.171	340.356.491.089	1 year to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	456.514.766.146	345.303.650.525	2 years to 5 years
Lebih dari 5 tahun	217.331.748.040	234.418.208.051	More than 5 years
Jumlah	938.148.736.691	988.378.349.665	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24.225.247.850)	(20.647.166.985)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	913.923.488.841	967.731.182.680	Net

9. Musyarakah Financing**a. By type****b. By economic sector****c. By period of financing**

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

d. Berdasarkan kolektibilitas

	2020	2019
Lancar	840.724.711.570	922.856.738.507
Dalam perhatian khusus	60.111.984.726	33.656.914.130
Kurang lancar	-	-
Diragukan	554.287.286	-
Macet	36.757.753.109	31.864.697.028
Jumlah	938.148.736.691	988.378.349.665
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24.225.247.850)	(20.647.166.985)
Jumlah - bersih	913.923.488.841	967.731.182.680

d. By collectability

Current	
Special mention	
Substandard	
Doubtful	
Loss	
Total	
Less:	
Allowance for impairment losses	
Net	

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

	2020	2019
Saldo awal tahun	20.647.166.985	12.423.139.991
Pencadangan selama tahun berjalan (Catatan 30)	2.641.622.525	3.124.026.994
Penerimaan kembali pembiayaan yang dihapusbukukan	936.458.340	5.100.000.000
Saldo akhir tahun	24.225.247.850	20.647.166.985

e. Movement in allowance for impairment losses

Beginning balance	
Allowance for impairment losses in current year (Note 30)	
Reversal from write off financing	
Ending balance	

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah yang telah dibentuk adalah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan musyarakah.

Management believes that the allowance for impairment losses of musyarakah financing is sufficient to cover all possible losses arising from uncollected musyarakah financing.

f. Mutasi pembiayaan musyarakah yang dihapus buku

	2020	2019
Saldo awal tahun	10.333.125.079	15.433.125.079
Mutasi selama tahun berjalan		
Penerimaan kembali	(936.458.340)	(5.100.000.000)
Saldo akhir tahun	9.396.666.739	10.333.125.079

f. The movement of musyarakah financing written-off

Beginning balance	
Movement during the year	
Reversal	
Ending balance	

g. Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun

Tingkat bagi hasil rata-rata adalah sebesar 12,18% dan 11,80% pada tahun 2020 dan 2019.

g. Average annual profit sharing rate

Average annual profit sharing rate in 2020 and 2019 is 12.18% and 11.80%, respectively.

h. Pembiayaan musyarakah direstrukturasikan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat pembiayaan musyarakah yang direstrukturasikan masing-masing sebesar Rp 294.364.936.724 dan Rp 65.805.854.404.

h. Restructured musyarakah financing

As of December 31, 2020 and 2019, restructured musyarakah financing amounted Rp 294,364,936,724 and Rp 65,805,854,404, respectively.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

10. Pembiayaan Mudharabah

Seluruh pembiayaan mudharabah diberikan kepada pihak ketiga.

a. Berdasarkan jenis

	2020	2019
Modal kerja	6.816.777.400	21.230.017.271
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(241.801.769)	(200.359.933)
Jumlah - bersih	<u>6.574.975.631</u>	<u>21.029.657.338</u>

b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2020	2019
Jasa-jasa dunia usaha	6.816.777.400	21.230.017.271
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(241.801.769)	(200.359.933)
Jumlah - bersih	<u>6.574.975.631</u>	<u>21.029.657.338</u>

c. Berdasarkan jangka waktu pembiayaan

	2020	2019
1 sampai dengan 2 tahun	-	-
2 sampai dengan 5 tahun	4.593.444.314	16.748.158.520
Lebih dari 5 tahun	2.223.333.086	4.481.858.751
Jumlah	6.816.777.400	21.230.017.271
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(241.801.769)	(200.359.933)
Jumlah - bersih	<u>6.574.975.631</u>	<u>21.029.657.338</u>

d. Berdasarkan kolektibilitas

	2020	2019
Lancar	3.394.986.123	21.230.017.271
Dalam perhatian khusus	3.421.791.277	-
Kurang lancar	-	-
Diragukan	-	-
Macet	-	-
Jumlah	6.816.777.400	21.230.017.271
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(241.801.769)	(200.359.933)
Jumlah - bersih	<u>6.574.975.631</u>	<u>21.029.657.338</u>

10. Mudharabah Financing

All mudharabah financing were given to third parties.

a. By type

	2020	2019
Working capital	6.816.777.400	21.230.017.271
Less: Allowance for impairment losses	(241.801.769)	(200.359.933)
Net	<u>6.574.975.631</u>	<u>21.029.657.338</u>

b. By economic sector

	2020	2019
Business services	6.816.777.400	21.230.017.271
Less: Allowance for impairment losses	(241.801.769)	(200.359.933)
Net	<u>6.574.975.631</u>	<u>21.029.657.338</u>

c. By period of financing

	2020	2019
1 year to 2 years	-	-
2 years to 5 years	4.593.444.314	16.748.158.520
More than 5 years	2.223.333.086	4.481.858.751
Total	6.816.777.400	21.230.017.271
Less: Allowance for impairment losses	(241.801.769)	(200.359.933)
Net	<u>6.574.975.631</u>	<u>21.029.657.338</u>

d. By collectability

	2020	2019
Current	3.394.986.123	21.230.017.271
Special mention	3.421.791.277	-
Substandard	-	-
Doubtful	-	-
Loss	-	-
Total	6.816.777.400	21.230.017.271
Less: Allowance for impairment losses	(241.801.769)	(200.359.933)
Net	<u>6.574.975.631</u>	<u>21.029.657.338</u>

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai	2020	2019	
Saldo awal tahun	200.359.933	659.091.793	Beginning balance
Pencadangan (pemulihan) selama tahun berjalan (Catatan 30)	41.441.836	(458.731.860)	Allowance (recovery) for impairment losses in current year (Note 30)
Saldo akhir tahun	241.801.769	200.359.933	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah yang telah dibentuk adalah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan mudharabah.

Management believes that allowance for impairment losses of mudharabah financing is sufficient to cover all possible losses arising from uncollected mudharabah financing.

f. Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun adalah sebesar 12,98% dan 12,60% pada tahun 2020 dan 2019.

f. Average annual profit sharing rate

Annual average profit sharing rate is 12.98% and 12.60% in 2020 and 2019, respectively.

g. Pembiayaan mudharabah direstrukturisasi

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 1.339.558.129 dan Rp 1.421.362.698

g. Restructured mudharabah financing

As of December 31, 2020 and 2019, restructured mudharabah financing amounted to Rp 1,339,558,129 and Rp 1,421,362,698, respectively.

11. Pendapatan Bagi Hasil Yang Akan Diterima

	2020	2019
Bagi hasil efek-efek	13.106.325.174	12.323.036.950
Bagi hasil piutang murabahah	1.739.253.851	1.053.544.377
Bagi hasil penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	250.379.557	141.609.722
Pendapatan ijarah	11.671.501	11.671.501
Jumlah	15.107.630.083	13.529.862.550

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pendapatan bagi hasil yang akan diterima dari pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 4.476.511 dan Rp 4.589.510 (Catatan 35) atau masing-masing 0,03% dan 0,03% dari jumlah pendapatan bagi hasil yang akan diterima.

11. Revenue Sharing Receivables

As of December 31, 2020 and 2019, revenue sharing receivables received from related parties amounted to Rp 4,476,511 and Rp 4,589,510 (Note 35) respectively, or 0.03% and 0.03%, respectively of total revenue sharing receivables.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

12. Aset Tetap**12. Property and Equipment**

	Perubahan Selama Tahun 2020/ Changes during 2020			31 Desember 2020/ December 31, 2020
	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	
<u>Biaya perolehan:</u>				<u>At cost:</u>
Tanah	81.556.965	-	-	81.556.965
Bangunan	245.619.585	-	-	245.619.585
Mesin dan peralatan	7.129.050.326	232.335.807	(557.492.608)	6.803.893.525
Kendaraan bermotor	2.175.377.341	-	(49.406.000)	2.125.971.341
Jumlah	9.631.604.217	232.335.807	(606.898.608)	9.257.041.416
<u>Aset hak-guna</u>				<u>Right-of-use asset</u>
Bangunan *)	-	11.303.563.399	-	11.303.563.399
Jumlah	9.631.604.217	11.535.899.206	(606.898.608)	20.560.604.815
<u>Akumulasi penyusutan:</u>				<u>Accumulated depreciation:</u>
Bangunan	118.910.211	12.280.980	-	131.191.191
Mesin dan peralatan	6.750.375.688	224.457.333	(550.404.864)	6.424.428.157
Kendaraan bermotor	1.948.551.791	167.398.517	(49.406.000)	2.066.544.308
Jumlah	8.817.837.690	404.136.830	(599.810.864)	8.622.163.656
<u>Aset hak-guna</u>				<u>Right-of-use asset</u>
Bangunan	-	3.633.154.305	-	3.633.154.305
Jumlah	8.817.837.690	4.037.291.135	(599.810.864)	12.255.317.961
Nilai Tercatat	813.766.527			8.305.286.854

*) Penerapan PSAK No.73
yang mulai berlaku 1 Januari 2020 (Catatan 44)

*) Implementation of PSAK No.73
started January 1, 2020 (Note 44).

	Perubahan Selama Tahun 2019/ Changes during 2019			31 Desember 2019/ December 31, 2019
	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	
<u>Biaya perolehan:</u>				<u>At cost:</u>
Tanah	81.556.965	-	-	81.556.965
Bangunan	245.619.585	-	-	245.619.585
Mesin dan peralatan	7.408.849.989	81.069.252	(360.868.915)	7.129.050.326
Kendaraan bermotor	3.453.777.341	-	(1.278.400.000)	2.175.377.341
Jumlah	11.189.803.880	81.069.252	(1.639.268.915)	9.631.604.217
<u>Akumulasi penyusutan:</u>				<u>Accumulated depreciation:</u>
Bangunan	106.629.231	12.280.980	-	118.910.211
Mesin dan peralatan	6.742.894.151	357.192.068	(349.710.531)	6.750.375.688
Kendaraan bermotor	2.983.477.102	107.412.547	(1.142.337.858)	1.948.551.791
Jumlah	9.833.000.484	476.885.595	(1.492.048.389)	8.817.837.690
Nilai Tercatat	1.356.803.396			813.766.527

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tahun 2020 dan 2019, Bank menjual aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

In 2020 and 2019, the Bank sold its property and equipment with detail as follows:

	2020	2019	
Harga jual	90.245.000	758.906.911	Selling value
Nilai tercatat	7.087.744	147.220.526	Net book value
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 31)	83.157.256	611.686.385	Gain on sales of property and equipment (Note 31)

Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran, gempa bumi dan pencurian kepada pihak ketiga dengan jumlah pertanggungan sebagai berikut:

Property and equipment are insured against fire, earthquake and theft to third parties with insurance coverage as follows:

	2020	2019	
PT Asuransi Takaful Umum	7.571.217.623	7.956.411.091	PT Asuransi Takaful Umum
PT Asuransi Adira Dinamika	704.110.750	1.903.150.000	PT Asuransi Adira Dinamika
Jumlah	8.275.328.373	9.859.561.091	Total

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Management believes that the sum insured is sufficient to cover all possible losses of the insured assets.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah nilai perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah sebesar Rp 2.156.914.881 dan Rp 3.056.930.001.

As of December 31, 2020 and 2019, total property and equipment that have been fully depreciated, but still used for operation amounted Rp 2,156,914,881 and Rp 3,056,930,001, respectively.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Based on management review, there is no impairment in the property and equipment as of December 31, 2020 and 2019.

13. Aset Tak Berwujud

13. Intangible Assets

	2020	2019	
Biaya perolehan			Acquisition costs
Lisensi ATM	2.784.598.875	2.784.598.875	ATM license
Aplikasi dan perangkat lunak	5.090.237.195	4.732.422.910	Application and software
Jumlah	7.874.836.070	7.517.021.785	Subtotal
Akumulasi amortisasi			Accumulated amortisation
Lisensi ATM	(2.784.598.875)	(2.784.598.875)	ATM license
Aplikasi dan perangkat lunak	(3.260.090.705)	(2.452.609.562)	Application and software
Jumlah	(6.044.689.580)	(5.237.208.437)	Subtotal
Jumlah	1.830.146.490	2.279.813.348	Total

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat penurunan nilai atas aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Based on management review, there is no impairment on intangible assets as of December 31, 2020 and 2019.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

14. Biaya Dibayar Dimuka

	2020	2019
Uang muka pembiayaan	5.338.451.760	5.334.141.890
Perbaikan gedung	1.131.194.154	1.502.530.716
Pengembangan sistem	912.024.768	469.979.588
Iuran keanggotaan	458.333.334	421.500.005
Sewa rumah/gedung	29.703.000	635.673.080
Promosi	17.621.441	22.200.604
Asuransi	6.997.851	10.841.304
Lain-lain	787.949.889	678.987.332
Jumlah	8.682.276.197	9.075.854.519

14. Prepaid Expenses

Financing in advance
 Building renovation
 System development
 Membership fee
 Building/house rent
 Promotion
 Insurance
 Others

Total**15. Aset Lain-lain**

	2020	2019
Agunan yang diambil alih	114.302.909.621	119.374.161.338
Setoran jaminan	2.723.607.450	2.251.462.450
Biaya yang ditangguhkan dan tagihan lain	1.341.812.151	1.169.015.991
Properti terbengkalai	128.252.200	128.252.200
Aset program pensiun (Catatan 33)	-	1.200.347.928
Lain-lain	4.934.217	5.266.770
Jumlah	118.501.515.639	124.128.506.677
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.496.345.601)	(10.640.507.489)
Jumlah	103.005.170.038	113.487.999.188

15. Other Assets

Foreclosed assets
 Deposit guarantee
 Deferred expenses and other receivables
 Abandoned properties
 Assets of pension plan (Note 33)
 Others

Total

Less:
 Allowance for impairment losses

Total

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kolektibilitas agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai adalah Macet.

As of December 31, 2020 and 2019, the foreclosed assets and abandoned properties are classified as Loss.

Aset program pensiun adalah investasi dalam bentuk polis asuransi yang diterbitkan oleh asurador yang merupakan pihak berelasi, sehingga tidak bisa didefinisikan sebagai polis asuransi yang memenuhi syarat sesuai PSAK 24 dan tidak dapat mengurangi kewajiban imbalan kerja (Catatan 33). Pada tahun 2020, investasi dalam bentuk polis asuransi tersebut telah dihentikan.

Assets of pension plan are investment in form of insurance policy issued by insurer which is related party, then could not be defined as insurance policy meet the criteria PSAK 24 and could not deducted employee benefit liability (Note 33). In 2020, investment in form of this insurance policy had been terminated.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Movement in allowance for impairment losses of other assets as of December 31, 2020 and 2019, as follows:

	2020	2019	
Saldo awal tahun	10.640.507.489	7.573.948.142	Beginning balance
Pencadangan selama tahun berjalan (Catatan 30)	4.855.838.112	3.066.559.347	Allowance for impairment losses in current year (Note 30)
Saldo akhir tahun	15.496.345.601	10.640.507.489	Ending balance

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain yang telah dibentuk adalah memadai.

Management believes that allowance for impairment losses on other assets is adequate.

Termasuk di dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih masing-masing sebesar Rp 15.368.093.401 dan Rp 10.512.255.289 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Included in allowance for impairment losses is allowance for impairment losses of foreclosed assets amounted to Rp 15,368,093,401 and Rp 10,512,255,289 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

16. Liabilitas Segera

16. Liabilities Immediately Payable

	2020	2019	
Titipan pembiayaan	1.913.630.527	1.260.174.798	Financing
Titipan dana sosial	115.849.899	98.463.459	Social fund
Lain-lain	671.159.797	207.431.832	Others
Jumlah	<u>2.700.640.223</u>	<u>1.566.070.089</u>	Total

Seluruh liabilitas segera merupakan liabilitas kepada pihak ketiga.

All liabilities immediately payable are from third parties.

17. Simpanan Giro Wadiah

17. Wadiah Demand Deposits

	2020	2019	
Simpanan giro wadiah			Wadiah demand deposits
Pihak berelasi (Catatan 35)	31.569.251	35.577.383	Related parties (Note 35)
Pihak ketiga	251.313.294.465	23.259.076.876	Third parties
Jumlah	<u>251.344.863.716</u>	<u>23.294.654.259</u>	Total

Simpanan giro wadiah yang dijadikan sebagai jaminan atas piutang dan pembiayaan sebesar Rp 230.000.000.000 dan 980.000.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Wadiah demand deposits pledged as collateral for receivables and financing amounted to Rp 230,000,000,000 and Rp 980,000,000 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Tingkat bonus rata-rata per tahun untuk giro wadiah selama tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar 1,35% dan 1,50%.

Average annual bonus rate for wadiah demand deposits during 2020 and 2019 is 1.35% and 1.50%, respectively.

18. Simpanan dari Bank Lain

18. Deposit from Other Banks

Simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 260.000.000.000 dan Rp 183.000.000.000 merupakan simpanan syariah dalam bentuk Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dari pihak ketiga.

As of December 31, 2020 and 2019, deposit from other banks amounting to Rp 260,000,000,000 and Rp 183,000,000,000, respectively, are sharia deposits in the form of Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA) from third parties.

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain selama tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 4,74% dan 5,59%.

Average annual profit sharing rate for deposit from other banks during 2020 and 2019 are 4.74% and 5.59%, respectively.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

19. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan**19. Undistributed Revenue Sharing**

	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 35)			Related parties (Note 35)
Deposito mudharabah	10.756.220	153.870.781	Mudharabah time deposits
Tabungan mudharabah	249.217	-	Mudharabah savings
Giro wadiah	34.606	-	Wadiah demand deposits
Jumlah	11.040.043	153.870.781	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
Deposito mudharabah	3.897.003.878	3.461.823.431	Mudharabah time deposits
Tabungan mudharabah	130.477.826	170.367.984	Mudharabah savings
SIMA	379.722.222	201.305.556	SIMA
Giro mudharabah	-	3.621.352	Mudharabah demand deposits
Giro wadiah	387.740.931	7.890.411	Wadiah demand deposits
Jumlah	4.794.944.857	3.845.008.734	Subtotal
Jumlah	4.805.984.900	3.998.879.515	Total

20. Liabilitas Sewa**20. Lease Liabilities**

Berikut adalah pembayaran sewa minimum masa yang akan datang (*future minimum lease payment*) berdasarkan perjanjian sewa:

The following are the future minimum lease payments based on the lease agreement:

	2020	
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:		Payments due in:
Sampai dengan 1 tahun	3.837.811.247	Until 1 year
Lebih dari 1-2 tahun	3.757.732.440	More than 1-2 years
Diatas 2 tahun	918.830.935	Over 2 years
Jumlah pembayaran sewa pembiayaan minimum	8.514.374.622	Total minimum lease liabilities
Imbalan	(485.561.130)	Fee
Nilai sekarang pembayaran sewa pembiayaan minimum	8.028.813.492	Present value of minimum lease liabilities

Liabilitas sewa diatas berasal dari transaksi yang memenuhi kriteria tertentu sesuai standar akuntansi yang berlaku pada masing-masing tahun. Pada tahun 2019, liabilitas sewa diakui apabila transaksi sewa memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan PSAK No. 30. Sedangkan mulai tahun 2020, liabilitas sewa diakui apabila transaksi sewa memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 73.

The above lease liabilities resulted from transactions that met certain criteria under applicable accounting standards in the respective year. In 2019, transactions that met finance lease criteria under PSAK No. 30 were recorded as lease liabilities. While in 2020, transactions were recorded as lease liabilities if it met lease criteria in accordance with PSAK No. 73.

Beban imbalan liabilitas sewa adalah sebesar Rp 377.172.983 tahun 2020 (Catatan 31).

Fee expense on lease liabilities amounted to Rp 377,172,983 in 2020 (Note 31).

Liabilitas sewa yang kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.876.724.358 (Catatan 35).

Lease liabilities incurred with related parties As of December 31, 2020 amounted to Rp 7,876,724,358 (Note 35).

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

21. Utang Pajak**21. Taxes Payable**

	2020	2019	
Pasal 4 ayat 2	1.357.097.620	1.525.951.332	Article 4 paragraph 2
Pasal 21	480.142.093	469.007.208	Article 21
Pasal 23	20.574.775	5.114.518	Article 23
Jumlah	<u>1.857.814.488</u>	<u>2.000.073.058</u>	Total

22. Dana Syirkah Temporer**22. Temporary Syirkah Funds****a. Tabungan mudharabah****a. Mudharabah saving deposits**

	2020	2019	
Bukan bank			Non - bank
Pihak berelasi (Catatan 35)	267.936.764	431.344.961	Related parties (Note 35)
Pihak ketiga	40.946.463.686	49.496.060.132	Third parties
Jumlah	<u>41.214.400.450</u>	<u>49.927.405.093</u>	Total

Tingkat bagi hasil per tahun untuk tabungan mudharabah selama tahun 2020 dan 2019 berkisar dari 0,50% - 5,00%.

Annual profit sharing for mudharabah saving during 2020 and 2019 range from 0.50% to 5.00%.

b. Deposito mudharabah**b. Mudharabah deposits****i) Berdasarkan pemilik dana****i) By type of customer**

	2020	2019	
Bukan bank			Non - bank
Pihak berelasi (Catatan 35)	2.655.000.000	24.831.500.000	Related parties (Note 35)
Pihak ketiga	1.280.798.785.605	1.431.096.218.933	Third parties
Jumlah	<u>1.283.453.785.605</u>	<u>1.455.927.718.933</u>	Subtotal
Bank			Bank
Pihak ketiga	54.500.000.000	181.500.000.000	Third parties
Jumlah	<u>1.337.953.785.605</u>	<u>1.637.427.718.933</u>	Total

ii) Berdasarkan periode deposito berjangka**ii) By the contractual maturity**

	2020	2019	
Kurang dari 1 bulan	133.300.000.000	87.420.000.000	Less than 1 month
1 bulan	319.275.691.669	412.522.325.326	1 month
3 bulan	466.524.182.426	298.182.752.410	3 months
6 bulan	217.858.911.510	562.313.139.789	6 months
12 bulan	200.995.000.000	276.989.501.408	12 months
Jumlah	<u>1.337.953.785.605</u>	<u>1.637.427.718.933</u>	Total

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

iii) Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

iii) By remaining period until maturity

	2020	2019	
Deposito mudharabah			Mudharabah deposit
Kurang dari 1 bulan	296.595.351.161	595.971.357.313	Less than 1 month
1 sampai dengan 3 bulan	695.710.434.444	719.918.019.744	1 month to 3 months
3 sampai dengan 6 bulan	152.343.000.000	147.721.000.000	3 months to 6 months
6 sampai dengan 12 bulan	193.305.000.000	173.817.341.876	6 months to 12 months
Jumlah	1.337.953.785.605	1.637.427.718.933	Total

iv) Tingkat bagi hasil

iv) Profit sharing rate

Tingkat bagi hasil per tahun untuk deposito mudharabah selama tahun 2020 dan 2019 masing-masing berkisar dari 2,75% - 6,00% dan 4,00% - 6,25%.

Annual profit sharing for mudharabah deposits during 2020 and 2019 ranges from 2.75% to 6.00% and from 4.00% to 6.25% respectively.

Deposito mudharabah yang dijadikan sebagai jaminan atas piutang dan pembiayaan adalah masing-masing sebesar Rp 273.135.000.000 dan Rp 387.050.000.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Mudharabah deposits pledged as collateral for receivables and financing amounted to Rp 273,135,000,000 and Rp 387,050,000,000 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

c. Giro mudharabah

c. Mudharabah demand deposits

	2020	2019	
Bukan bank			Non - bank
Pihak berelasi (Catatan 35)	8.957.388	-	Related parties (Note 35)
Pihak ketiga	5.217.807	335.222.592	Third parties
Jumlah	14.175.195	335.222.592	Total

Tingkat bagi hasil per tahun untuk giro mudharabah selama tahun 2020 dan 2019 berkisar dari 1,00% - 5,00%.

Annual profit sharing for mudharabah demand deposits during 2020 and 2019 range from 1.00% to 5.00%.

23. Modal Saham

23. Capital Stock

Susunan kepemilikan saham Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's stockholder as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Nama Pemegang Saham	2020 dan/and 2019			Name of Stockholder
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Stock	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah/ Total	
PT Bank Victoria International Tbk	359.982.683	99,99	359.982.683.000	PT Bank Victoria International Tbk
Lain-lain	17.317	0,01	17.317.000	Others
Jumlah	360.000.000	100,00	360.000.000.000	Total

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Bank yang didokumentasikan dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) No. 09 tanggal 9 Januari 2019 dari Ririn, S.H., notaris di Jakarta, telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Bank dari Rp 310.000.000.000 menjadi Rp 360.000.000.000 yang diambil dan disetor seluruhnya sebesar Rp 50.000.000.000 atau sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham oleh PT Bank Victoria International Tbk. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0024305 tanggal 15 Januari 2019.

Based on the Shareholders' Resolution of the Bank which is documented in the Deed Statement General Meeting of Shareholders – Extraordinary (EGM) No. 09 dated January 9, 2019 from Ririn, S.H., a public notary in Jakarta, shareholders have approved an increase in the Bank's issued and paid up capital from Rp 310,000,000,000 to Rp 360,000,000,000 which is entirely taken and paid amounted to Rp 50,000,000,000 or 50,000,000 (fifty million) shares by PT Bank Victoria International Tbk. The related amendment of the Article of Association has been received and recorded by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Letter No. AHU-AH.01.03-0024305 dated January 15, 2019.

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Bank adalah untuk memastikan bahwa Bank mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Bank wajib untuk memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Capital Management

The primary objective of the Bank's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Bank is required by Bank Indonesia to meet Capital Adequacy Ratio (CAR).

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan kepada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan dari aset tertimbang menurut risiko terhadap modal yang tersedia.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. Bank Indonesia's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital resources requirement measured of risk-weighted assets to available capital resources.

Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan sepanjang tahun.

The Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the year.

Perhitungan rasio KPMM pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The calculation of CAR as of December 31, 2020 and 2019, is as follows:

	2020	2019	
I. Komponen Modal			I. Capital Stock Component
A. Modal Inti	238.536.825.092	216.354.179.711	A. Core Capital
B. Modal Pelengkap	8.286.450.211	8.684.028.353	B. Supplementary Capital
II. Jumlah modal	246.823.275.303	225.038.208.064	II. Total
III. Aset tertimbang menurut risiko kredit, pasar dan operasional	1.003.361.431.341	1.054.115.000.754	III. Risk weighted assets for credit, market and operational risk
IV. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	24,60%	19,44%	IV. Capital Adequacy Ratio (CAR)
V. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	9% - 10%	9% - 10%	V. Minimum Capital Adequacy Ratio

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

24. Saldo Laba yang Sudah Ditentukan
Penggunaannya

Berdasarkan Akta No. 23 tertanggal 26 Maret 2010 dan Akta No. 24 tertanggal 26 Maret 2010 keduanya dari Erni Rohaini, SH, MBA, notaris di Jakarta, saldo laba sebelum proses konversi menjadi bank umum syariah dikapitalisasi menjadi cadangan umum sebesar Rp 10.014.130.827. Setelah ada perubahan pencadangan imbalan pasti karyawan dan pajak penghasilan badan, maka saldo cadangan umum menjadi Rp 9.156.165.256. Perubahan ini telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 30 Juni 2014 dari Setiawan, S.H., notaris di Jakarta.

24. Appropriated Retained Earnings

Based on Notarial Deed No. 23 dated March 26, 2010 and Deed No. 24 dated March 26, 2010, both from Erni Rohaini, SH, MBA, a public notary in Jakarta, retained earnings before conversion into sharia bank is capitalised into general reserves amounted to Rp 10,014,130,827. After changes in allowances for post-employment benefit and current income tax, the balance of general reserves becomes Rp 9,156,165,256. These changes have been rectified by General Shareholders Meeting based on Notarial Deed No. 12 dated June 30, 2014 from of Setiawan, S.H., a public notary in Jakarta.

25. Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank
Sebagai Mudharib

25. Income From Fund Management by Bank
as Mudharib

	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 35)			Related parties (Note 35)
Pendapatan dari jual beli murabahah	60.640.801	72.766.268	Income from sales and purchases of murabahah
Pendapatan ijarah - bersih	34.713.444	35.685.267	Income from ijarah - net
Pendapatan bagi hasil musyarakah	-	2.452.838.212	Income from profit sharing musyarakah
Jumlah - pihak berelasi	95.354.245	2.561.289.747	Subtotal - related parties
Pihak ketiga			Third parties
Pendapatan dari jual beli murabahah	18.409.962.453	29.445.565.411	Income from sales and purchases of murabahah
Pendapatan bagi hasil:			Income from profit sharing:
Musyarakah	76.272.301.212	87.818.934.621	Musyarakah
Mudharabah	840.610.814	2.594.387.636	Mudharabah
Pendapatan ijarah - bersih	196.837.716	384.590.797	Income from ijarah - net
Pendapatan usaha utama lainnya :			Other main operating income :
Pendapatan efek-efek Syariah	48.747.088.486	37.746.603.299	Income from sharia marketable securities
Pendapatan giro dan penempatan pada bank lain	1.998.554.915	1.926.489.875	Current accounts and placement with other banks income
Pendapatan administrasi	1.411.182.212	4.482.363.830	Administration income
Pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBIS)	387.378.472	1.058.474.306	Bank Indonesia Sharia Deposit Facility income (FASBIS)
Pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	213.289.833	-	Bank Indonesia Sharia Certificate income (SBIS)
Pendapatan giro pada Bank Indonesia	177.616.861	-	Current account with Bank Indonesia income
Jumlah	52.935.110.779	45.213.931.310	Subtotal
Jumlah - pihak ketiga	148.654.822.974	165.457.409.775	Subtotal - third parties
Jumlah	148.750.177.219	168.018.699.522	Total

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

26. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer **26. Third Parties Share on Returns of Temporary Syirkah Funds**

	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 35)			Related parties (Note 35)
Deposito mudharabah	10.756.220	2.459.149.692	Mudharabah deposits
Tabungan mudharabah	249.217	3.911.256	Mudharabah saving deposits
Giro	34.606	3.347.627	Current accounts
SIMA	-	373.938.056	SIMA
Jumlah	11.040.043	2.840.346.631	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
Deposito mudharabah	101.368.484.939	110.563.931.294	Mudharabah deposits
SIMA	6.147.783.815	3.506.157.323	SIMA
Tabungan mudharabah	1.896.840.961	1.589.711.350	Mudharabah saving deposits
Giro	2.819.715.537	415.805.009	Current accounts
Jumlah	112.232.825.252	116.075.604.976	Subtotal
Jumlah	112.243.865.295	118.915.951.607	Total

27. Pendapatan Operasional Lainnya

27. Other Operating Income

	2020	2019	
Keuntungan penjualan efek-efek - bersih	14.899.089.020	3.179.854.908	Gain on sale of marketable securities - net
Administrasi dan lainnya	1.070.502.849	803.368.465	Administrative and others
Keuntungan dari peningkatan nilai wajar efek yang diperdagangkan - bersih	-	493.672.024	Gain on increase in fair value of trading securities - net
Jumlah	15.969.591.869	4.476.895.397	Total

28. Beban Umum dan Administrasi

28. General and Administrative Expenses

	2020	2019	
Asuransi	4.463.459.397	4.135.606.136	Insurance
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	4.037.291.135	476.885.595	Depreciation of property and equipment (Note 12)
Pemeliharaan dan perbaikan	1.901.588.463	2.100.195.129	Repair and maintenance
Pengembangan sistem	1.577.014.578	1.875.048.291	System development
Sewa	1.404.633.654	5.092.047.753	Rent
Keanggotaan	1.142.073.558	1.521.112.774	Membership
Amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 13)	807.481.143	818.474.821	Amortisation of intangible assets (Note 13)
Biaya fee ATM tahunan	660.000.004	549.999.996	Annual fee ATM expense
Konsultan	618.800.000	375.499.998	Consultants
Peralatan kantor	418.787.599	354.197.249	Office supplies
Listrik dan air	366.132.582	528.727.347	Electricity and water
Transportasi	327.171.633	537.843.227	Transportation
Telekomunikasi	208.865.212	337.228.713	Telecommunication
Promosi	176.926.162	341.799.763	Promotional
Keamanan dan kebersihan	130.839.462	141.982.352	Securities and cleanliness
Pajak dan perijinan	100.563.635	117.010.297	Tax and permission
Lain-lain	56.984.294	148.670.418	Others
Jumlah	18.398.612.511	19.452.329.859	Total

Beban sewa yang dibayar kepada pihak berelasi untuk tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 874.506.000 dan Rp 4.751.380.260 (Catatan 35).

Rent expenses incurred with related parties in 2020 and 2019 amounted to Rp 874,506,000 and Rp 4,751,380,260, respectively (Note 35).

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

29. Beban Personalia**29. Personnel Expenses**

	2020	2019	
Gaji	18.526.720.065	22.428.311.400	Salaries
Tunjangan hari raya	1.573.258.386	1.949.498.298	Holiday allowance
Honor Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas	1.200.711.789	1.341.991.017	Remuneration of Board of Commissioners and Supervisory Boards
Beban imbalan pasti (Catatan 33)	1.047.960.381	1.179.676.509	Post-employment benefit (Note 33)
Premi asuransi jiwa	886.684.853	1.146.313.325	Life insurance premium
Kesehatan	440.849.449	110.584.799	Health
Lembur	395.746.590	647.239.544	Overtime
Pendidikan	355.283.814	357.223.571	Educational expenses
Jumlah	<u>24.427.215.327</u>	<u>29.160.838.463</u>	Total

30. Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**30. Allowances (Recovery) For Impairment Losses Expenses**

Rincian beban pencadangan (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif adalah sebagai berikut:

Details of allowance (recovery) for impairment losses in earning and non-earning assets are as follows:

	2020	2019	
Efek-efek (Catatan 7)	(516.911.751)	700.000.000	Marketable securities (Note 7)
Piutang murabahah (Catatan 8)	(3.417.926.339)	(2.569.480.232)	Murabahah receivables (Note 8)
Pembiayaan musyarakah (Catatan 9)	2.641.622.525	3.124.026.994	Musyarakah financing (Note 9)
Pembiayaan mudharabah (Catatan 10)	41.441.836	(458.731.860)	Mudharabah financing (Note 10)
Aset lain-lain (Catatan 15)	4.855.838.112	3.066.559.347	Other assets (Note 15)
Penyertaan saham	(310.000)	-	Investments in shares
Jumlah	<u>3.603.754.383</u>	<u>3.862.374.249</u>	Total

31. Pendapatan (Beban) Non Operasional**31. Non Operating Income (Expense)**

	2020	2019	
Pendapatan non operasional			Non operating income
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 12)	83.157.256	611.686.385	Gain on sale of property and equipment (Note 12)
Pendapatan imbalan dari pihak ketiga	8.156.443	119.375.278	Income fee from third parties
Pendapatan non operasional lainnya	161.429.411	229.045.670	Other non-operating income
Jumlah	<u>252.743.110</u>	<u>960.107.333</u>	Total
Beban non operasional			Non-operating expenses
Imbalan liabilitas sewa (Catatan 20)	(377.172.983)	-	Fee of lease liabilities (Note 20)
Denda dan sanksi	(49.500.000)	(209.276.536)	Penalties
Lain-lain	(30.250.300)	(29.842.500)	Others
Jumlah	<u>(456.923.283)</u>	<u>(239.119.036)</u>	Total
Jumlah	<u>(204.180.173)</u>	<u>720.988.297</u>	Net

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

32. Komitmen dan Kontinjensi

	2020	2019
Liabilitas komitmen:		
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	(53.469.490.295)	(100.843.197)
Tagihan kontinjensi:		
Margin dalam penyelesaian	5.504.470.420	4.255.904.403
Liabilitas kontinjensi:		
Bank Garansi	-	(2.532.000.000)
Tagihan kontinjensi – bersih	5.504.470.420	1.723.904.403

32. Commitment and Contingencies

Commitment payables:	
Unused financing facilities	
Contingencies receivables:	
Margin from non-performing receivables	
Contingencies payables:	
Bank guarantees issued	
Contingencies receivables - net	

33. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003.

Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh PT Ricky Leonard Jasatama, aktuaris independen, tertanggal 21 Januari 2021.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut masing-masing sebanyak 108 dan 124 pada tahun 2020 dan 2019.

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Beban jasa kini	744.032.221	726.748.131
Beban bunga neto	303.928.160	452.928.378
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	1.047.960.381	1.179.676.509
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(1.148.534.858)	(412.583.068)
Jumlah	(100.574.477)	767.093.441

Beban imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp 1.047.960.381 dan Rp 1.179.676.509 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai bagian dari "Beban personalia" (Catatan 29).

33. Long-term Employee Benefits

The amount of post-employment benefits is determined based on the outstanding regulation Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003.

The latest actuarial valuation report dated January 21, 2021 on the long-term employee benefits liability was from PT Ricky Leonard Jasatama, an independent actuary.

Number of eligible employees is 108 and 124 in 2020 and 2019, respectively.

The amount of employee benefits recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income as follows:

Current service costs	
Interest costs	
Component of employee benefits cost recognized in statements of profit or loss	
Remeasurement of defined benefit liability	
Total	

Long-term employee benefits expense amounted to Rp 1,047,960,381 and Rp 1,179,676,509 as of December 31, 2020 and 2019, respectively is presented as part of "Personnel expense (Note 29).

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Movements of long-term employee benefits liability follows:

	2020	2019	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang awal tahun	4.924.171.012	5.360.099.147	Long-term employee benefits liability at the beginning of the year
Beban imbalan kerja jangka panjang tahun berjalan	1.047.960.381	1.179.676.509	Long-term employee benefits expense during the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	1.148.534.858	412.583.068	Remeasurement of defined benefit liability
Pembayaran imbalan kerja jangka panjang	(1.743.244.899)	(2.028.187.712)	Benefit payments during the year
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang akhir tahun	5.377.421.352	4.924.171.012	Long-term employee benefits liability at the end of the year

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Principal assumptions used in the valuation of the long-term employee benefits follows:

	2020	2019	
Tingkat diskonto	7,02%	7,73%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	6,00%	6,00%	Increase of salary rate
Tingkat perputaran karyawan	5% sampai dengan usia 40 tahun kemudian menurun secara linear sampai dengan 0% pada saat usia 55 tahun/ 5% per annum at age up 40 years old, then decrease in linear to 0% per annum at age 55 years old		Level of employee turnover

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Analysis of sensitivity from changes of main assumptions to long-term employee benefits liability as follows:

	2020		
	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Effect on employee benefits liability		
	Perubahan Asumsi/ Changes of assumption	Kenaikan Asumsi/ Increases of assumption	Penurunan Asumsi/ Decreases of assumption
Tingkat diskonto/Discount rate	1%	(479.452.546)	553.162.851
Tingkat kenaikan gaji/Future salary increases	1%	553.232.890	(488.055.822)

	2019		
	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Effect on employee benefits liability		
	Perubahan Asumsi/ Changes of assumption	Kenaikan Asumsi/ Increases of assumption	Penurunan Asumsi/ Decreases of assumption
Tingkat diskonto/Discount rate	1%	(487.014.407)	566.497.788
Tingkat kenaikan gaji/Future salary increases	1%	549.489.514	(481.240.748)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

34. Pajak Penghasilan

a. Beban pajak terdiri dari:

	2020	2019	
Pajak kini	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	3.626.535.374	155.352.381	Deferred tax
Jumlah	3.626.535.374	155.352.381	Total

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan akumulasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	3.411.918.641	1.068.684.137	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Cadangan kerugian penurunan nilai	5.275.626.185	5.517.007.340	Allowances for impairment losses
Imbalan kerja jangka panjang - bersih	(695.284.518)	(848.511.203)	Long-term employee benefits
Aset hak-guna	532.043.190	-	Right-of-use assets
Amortisasi aset tak berwujud	425.920.882	580.011.737	Amortization of intangible assets
Jumlah	5.538.305.739	5.248.507.874	Total
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Keuntungan penjualan aset tetap	(83.157.256)	(611.686.385)	Gain on sale of property and equipment
Lain-lain	234.469.496	164.411.774	Others
Jumlah	151.312.240	(447.274.611)	Total
Laba kena pajak tahun berjalan	9.101.536.620	5.869.917.400	Taxable income for current year
Rugi fiskal tahun-tahun lalu			Prior year's fiscal loss
2017	(1.436.412.831)	(1.436.412.831)	2017
2016	(59.193.921.220)	(59.193.921.220)	2016
2015	(4.703.070.077)	(10.572.987.477)	2015
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	(65.333.404.128)	(71.203.321.528)	Fiscal losses can be utilized
Akumulasi rugi fiskal	(56.231.867.508)	(65.333.404.128)	Accumulated fiscal losses

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU No.2 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Bank telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

34. Income Tax

a. The tax expense consists of the following:

b. Current Tax

A reconciliation between profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income with accumulated fiscal losses follows:

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 which has been passed relating to State Financial Policies and Financial System Stability in Response to Corona Virus Disease (Covid-19) outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and further decrease to 20% in fiscal year 2022. The Bank has adopted the change of new corporate income tax rate in computing its income taxes.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan Bank telah dihitung menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat direalisasi.

The Bank's deferred tax assets and liabilities has been calculated using the expected tax rates when realized.

Bank mengalami rugi fiskal pada tahun 2020 dan 2019 sehingga Bank tidak memiliki utang pajak penghasilan pada tahun tersebut. Sesuai peraturan perpajakan, kerugian fiskal tersebut dapat dikompensasikan dengan laba kena pajak pada masa 5 (lima) tahun mendatang sejak terjadinya kerugian fiskal.

The Bank still suffered fiscal losses in 2020 and 2019 so the Bank did not have income tax debt in both year. In accordance with tax regulations, the fiscal loss can be compensated with taxable profits for the next 5 (five) years since the occurrence of the fiscal loss.

Laba kena pajak dan akumulasi rugi fiskal tahun 2019 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Taxable income and accumulated fiscal loss the year 2019 conforms with its Annual Corporate Income Tax Return filed loss.

c. Pajak Tangguhan

c. Deferred Tax

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Laba Rugi/ Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other comprehensive income	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:					Deferred tax assets (liabilities):
Imbalan kerja jangka panjang	1.231.042.752	(300.687.725)	252.677.669	1.183.032.696	Employment benefit liabilities
Keuntungan belum direalisasi					Unrealized gain on
atas penurunan nilai investasi	(990.024.707)	-	(5.949.725.394)	(6.939.750.101)	impairment of investment value
Cadangan kerugian penurunan nilai	2.769.442.448	501.960.421	-	3.271.402.869	Allowances for impairment losses
Biaya amortisasi aset					Amortization of intangible
tak berwujud	635.166.587	17.482.604	-	652.649.191	assets
Aset hak-guna	-	117.049.502	-	117.049.502	Right-use-assets
Rugi fiskal yang dapat					
dikompensasikan	16.333.351.032	(3.962.340.176)	-	12.371.010.856	Fiscal loss carry forward
Jumlah aset pajak					
tangguhan - Bersih	19.978.978.112	(3.626.535.374)	(5.697.047.725)	10.655.395.013	Deferred tax assets - net

	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Laba Rugi/ Profit or Loss	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other comprehensive income	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:					Deferred tax assets (liabilities):
Imbalan kerja jangka panjang	1.340.024.786	(212.127.801)	103.145.767	1.231.042.752	Employment benefit liabilities
Keuntungan belum direalisasi					Unrealized gain on
atas penurunan nilai investasi	(30.219.563)	-	(959.805.144)	(990.024.707)	impairment of investment value
Cadangan kerugian penurunan nilai	1.390.190.613	1.379.251.835	-	2.769.442.448	Allowances for impairment losses
Biaya amortisasi aset					Amortization of intangible
tak berwujud	490.163.653	145.002.934	-	635.166.587	assets
Rugi fiskal yang dapat					
dikompensasikan	17.800.830.381	(1.467.479.349)	-	16.333.351.032	Fiscal loss carry forward
Jumlah aset pajak					
tangguhan - Bersih	20.990.989.870	(155.352.381)	(856.659.377)	19.978.978.112	Deferred tax assets - net

Manajemen berpendapat bahwa terdapat kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Management believes that the future taxable income will likely be sufficient to compensate temporary differences giving rise to the deferred tax assets.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara manfaat pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba akuntansi sebelum pajak penghasilan tidak final dengan beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax benefit and the amounts computed by applying the effective tax rate to profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income follows:

	2020	2019	
Laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	3.411.918.641	1.068.684.137	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku: 22% tahun 2020 dan 25% tahun 2019	750.622.101	267.171.034	Tax expense at prevailing tax rate 22% in 2020 and 25% in 2019
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap:			Tax effects of permanent differences:
Keuntungan penjualan aset tetap	(18.294.596)	(152.921.596)	Gain on sale of property and equipment
Lain-lain	51.583.289	41.102.943	Others
Jumlah - bersih	33.288.693	(111.818.653)	Net
Jumlah Beban pajak penghasilan	783.910.794	155.352.381	Total tax expense
Dampak perubahan tarif pajak	2.842.624.580	-	Impact of change in tax rate
Beban pajak - bersih	3.626.535.374	155.352.381	Tax expense - net

35. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

35. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Sifat Pihak Berelasi

Nature of Relationship

- PT Bank Victoria International Tbk merupakan pemegang saham utama Bank.
- Perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh pemegang saham Bank.
- Perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh anggota keluarga dekat pemegang saham dan manajemen kunci Bank.

- PT Bank Victoria International Tbk is the majority stockholder of the Bank.
- Companies owned by stockholders of the Bank, either directly or indirectly.
- Companies controlled by close family members of stockholders and key management personnel of the Bank.

Transaksi Hubungan Berelasi

Transactions with Related Parties

- Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- Balances and transactions with related parties are as follows:

	2020	2019	
Aset			Assets
Giro pada bank lain (Catatan 5)	837.063.230	501.207.458	Current accounts with other Banks (Note 5)
Piutang murabahah (Catatan 8)			Murabahah receivables (Note 8)
Komisaris, Direktur dan pejabat eksekutif	538.282.509	685.857.177	Commissioners, Directors and executive officers
Pembiayaan musyarakah (Catatan 9)	-	20.071.890.182	Musyarakah financing (Note 9)
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima (Catatan 11)	4.476.511	4.589.510	Revenue sharing receivables (Note 11)
Aset program pensiun (Catatan 15)	-	1.200.347.928	Assets of pension plan (Note 15)
Jumlah	1.379.822.250	22.463.892.255	Total
Persentase terhadap jumlah aset	0,06%	0,99%	Percentage to total assets

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
Liabilitas			Liabilities
Simpanan giro wadiah (Catatan 17)	31.569.251	35.577.383	Wadiah demand deposits (Note 17)
Bagi hasil yang belum dibagikan (Catatan 19)	11.040.043	153.870.781	Undistributed revenue sharing (Note 19)
Liabilitas sewa (Catatan 20)	7.876.724.358	-	Lease liabilities (Note 20)
Jumlah	7.919.333.652	189.448.164	Total
Persentase terhadap jumlah liabilitas	1,47%	0,09%	Percentage to total liabilities
Dana Syirkah Temporer (Catatan 22)			Temporary Syirkah Funds (Note 22)
Tabungan mudharabah	267.936.764	431.344.961	Mudharabah saving deposits
Deposito mudharabah	2.655.000.000	24.831.500.000	Mudharabah deposit
Giro Mudharabah	8.957.388	-	Mudharabah demand deposits
Jumlah	2.931.894.152	25.262.844.961	Total
Persentase terhadap jumlah dana syirkah temporer	0,21%	1,50%	Percentage to temporary syirkah funds
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib (Catatan 25)			Income from funds management by Bank as mudharib (Note 25)
Pendapatan dari penjualan murabahah	60.640.801	72.766.268	Income from sales of murabahah
Pendapatan ijarah - bersih	34.713.444	35.685.267	Income from ijarah - net
Pendapatan bagi hasil musyarakah	-	2.452.838.212	Income profit sharing musyarakah
Jumlah	95.354.245	2.561.289.747	Total
Persentase terhadap jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib	0,06%	1,52%	Percentage to total income from funds management by Bank as mudharib
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer (Catatan 26)			Third parties' shares on returns of temporary syirkah funds (Note 26)
Deposito mudharabah	10.756.220	2.459.149.692	Mudharabah deposit
Tabungan mudharabah	249.217	3.911.256	Mudharabah saving deposits
Giro mudharabah	34.606	3.347.627	Mudharabah current account
SIMA	-	373.938.056	SIMA
Jumlah	11.040.043	2.840.346.631	Total
Persentase terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	0,01%	2,39%	Percentage to third parties' shares on returns of the temporary syirkah funds
Beban Operasional lainnya			Other Operating expense
Beban umum dan administrasi (Catatan 28)			General and administrative expenses (Note 28)
Beban sewa	874.506.000	4.751.380.260	Rent expenses
Persentase terhadap jumlah beban umum dan administrasi	4,75%	24,43%	Percentage of total general and administrative expenses
Beban personalia (Catatan 29)			Personnel expenses (Note 29)
Gaji, tunjangan, dan THR – Direktur dan pejabat eksekutif	6.080.431.160	8.089.230.423	Salary, allowances, and THR - Directors and executive personnel
Honor Dewan Komisaris	968.400.000	1.074.160.000	Remuneration of Board of Commissioners
Gaji, tunjangan, dan THR – Komite, dan Dewan Pengawas Syariah	354.820.000	387.425.000	Salary, allowances, and THR Committee, and Sharia Supervisory Board
Jumlah	7.403.651.160	9.550.815.423	Total
Persentase terhadap jumlah beban personalia	30,31%	32,75%	Percentage of total personnel expenses

- b. Pada tanggal 27 Mei 2019, Bank melakukan Perjanjian Pengelolaan Program Pengganti Imbal Kerja Karyawan - VIP Assurance Plan 24 dengan PT Victoria Alife Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, PT Victoria Alife Indonesia akan mengelola dana program pengganti imbal kerja karyawan Bank dengan menginvestasikan dana tersebut kepada sukuk Syariah (Catatan 15). Bank telah menyalurkan dana kepada pegawai yang telah mengundurkan diri dan yang pensiun sebelum program berakhir pada tanggal 26 November 2020.

- b. On May 27, 2019, the Bank entered into an Agreement to Manage Employee Compensation Program – VIP Assurance Plan 24 with PT Victoria Alife Indonesia. Under the agreement, PT Victoria Alife Indonesia will manage the fund of the Bank's employee compensation program by investing the funds in Sharia sukuk (Note 15). The Bank has distributed the fund to certain resigned and retired employee before the termination date of program on November 26, 2020.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

c. Bank menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan pihak berelasi sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 Januari 2017, Bank menandatangani perjanjian sewa menyewa bangunan dengan PT Tri Daya Investindo yang terletak di Bandung, Cirebon, Bekasi dan Denpasar. Perjanjian sewa ini berlaku selama 5 tahun.
- Pada tanggal 8 April 2019, Bank menandatangani perjanjian sewa menyewa ruangan dengan PT Asri Kencana Gemilang yang terletak di Graha BIP, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan. Perjanjian sewa ini berlaku selama 4 tahun.
- Pada tanggal 29 Mei 2019, Bank menandatangani perjanjian sewa menyewa gudang dengan PT Bank Victoria International Tbk yang terletak di Grand Boutique Center, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara. Perjanjian sewa ini berlaku selama 2 tahun.
- Pada tanggal 10 Februari 2020, Bank menandatangani perjanjian sewa menyewa ruangan dengan PT Tri Daya Investindo yang terletak di Gedung Victoria, Jalan Tomang Raya Kav.35-37, Jakarta Barat. Perjanjian sewa ini berlaku selama 5 tahun.

c. The Bank entered into a lease agreement with related parties as follows:

- On January 3, 2017, Bank entered into a lease agreement of building with PT Tri Daya Investindo located in Bandung, Cirebon, Bekasi and Denpasar. The lease agreement is valid for 5 years.
- On April 8, 2019, Bank entered into a lease agreement of office with PT Asri Kencana Gemilang located at Graha BIP, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, South Jakarta. The lease agreement is valid for 4 years.
- On May 29, 2019, Bank entered into a lease agreement of warehouse with PT Tri Daya Investindo located in Grand Boutique Center, Jalan Mangga Dua Raya, North Jakarta. The lease agreement is valid for 2 years.
- On February 10, 2020, Bank entered into a lease agreement of office with PT Tri Daya Investindo located at Gedung Victoria, Jalan Tomang Raya Kav. 35-37, West Jakarta. The lease agreement is valid for 5 years.

36. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko finansial maupun risiko non-finansial. Perkembangan bisnis yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan risiko kegiatan usaha Bank semakin kompleks sehingga Bank harus mampu menerapkan manajemen risiko yang baik agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan akan sangat mendukung Bank untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati. Prinsip-prinsip manajemen risiko tersebut pada dasarnya telah menjadi standar bagi dunia perbankan yang penerapannya diarahkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

36. Financial Risk Management Objectives and Policies

In conducting its function as financial institution intermediaries, the Bank faces various financial and non-financial risk. Rapid business development in banking external and internal environment also causes the Bank business risk getting more complex, so the Bank must implement good risk management to adapt in banking business environment. Hence, risk management principles implemented will support the Bank to be more prudent in its operation. Basically, risk management principles are standard in banking industry which implementation in Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 65/POJK.03/2016 dated December 28, 2016 regarding Implementation of Risk Management for Sharia Bank and Sharia Unit Business.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Sebagaimana diamanatkan ketentuan Bank Indonesia terkait penerapan manajemen risiko, Bank menyusun laporan profil risiko triwulanan secara *self assessment*.

As regulated by Bank Indonesia related to the implementation of risk management, Bank prepares quarterly risk profile report based on self assessment.

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan dapat terjadi pada berbagai kegiatan operasional perbankan seperti pemberian fasilitas pembiayaan, pembelian efek-efek, transaksi antar bank, dan fasilitas lainnya.

Bank harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang terkandung dalam setiap produk dan kegiatan perbankannya. Identifikasi ini dihasilkan dari penilaian yang menggunakan prinsip kehati-hatian dari karakteristik risiko pembiayaan dan risiko potensial yang timbul dari produk/kegiatan tertentu.

Dalam penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk risiko pembiayaan, Bank juga menerapkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan tersebut, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memantau penyediaan dana termasuk meninjau penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak berelasi.
2. Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko pembiayaan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Pengawas Syariah melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4. Komite Pembiayaan Pusat bertanggung jawab untuk memutuskan pemberian pembiayaan dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan Bank.

Dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum selesai di tahun 2020, perbankan menghadapi risiko kredit, dimana bank perlu melakukan mitigasi dengan membentuk pencadangan yang akan mempengaruhi kinerjanya dan membuat profitabilitas lebih rendah, serta terganggunya permodalan.

a. Financing Risk

Financing risk can be occurred in various banking operational activities such as providing financing facilities, purchasing marketable securities, interbank transactions, and other liabilities.

The Bank must identify and analyse risk embedded in each product and banking activity. This identification is derived from an assessment that uses the precautionary principle of characterizing financing risks and potential risks arising from certain product/activity.

In implementing risk management through active supervision of Board of Commissioner, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board for financing risk, the Bank also implements several points in each of the supervising aspect as follows:

1. The Board of Commissioner monitors fund provided, including a review of fund provided in large amount or those given to related parties.
2. The Board of Directors is responsible in ensuring all fund providing activities are conducted according to the financing risk strategy and policies approved by the Board of Commissioner.
3. The Sharia Supervisory Board evaluates financing risk management policies related to compliance with sharia principles.
4. The Head Office Financing Committee is responsible for deciding the approval of financing in certain amount according to the Bank's policy.

In the situation of the pandemic of Covid-19 that has not yet been completed in 2020, banks face credit risk, where the Bank need to mitigate by establishing reserves that will affect their performance and make profitability lower, as well as disruption of capital.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Peningkatan permintaan pembiayaan yang direstrukturisasi akan meningkatkan risiko kredit, karena pada saat selesainya masa relaksasi di bulan Maret 2022, kemungkinan nasabah belum dapat memenuhi kewajibannya sehingga prosentasi risiko kredit meningkat.

Bank tetap harus mengambil sikap waspada profesional dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian dengan memperkuat dan mengantisipasi *risk profile* dengan baik, azas *good corporate governance*, profitabilitas dan permodalan bank agar selalu terjaga dengan terus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk memperkuat daya tahan terhadap setiap *turbulence* (goncangan) ekonomi.

Berikut adalah eksposur maksimum instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan dan rekening administratif yang terkait risiko pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The increase in demand for restructured financing will increase credit risk, because by the time the relaxation period is over in March 2022, it is possible that customers will not be able to fulfill their obligations so that the percentage of credit risk increases.

Banks still have to take a professional vigilant attitude by upholding the principle of prudence by strengthening and anticipating a risk profile properly, principles of good corporate governance, profitability and bank capital so that they are always maintained by continuing to form allowance for impairment losses to strengthen resilience against any economic turbulence.

The maximum exposure of financial instruments related to credit risk as shown in the statements of financial position as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020		2019		
	Jumlah Bruto/ Gross amounts	Jumlah Neto/ Net amounts	Jumlah Bruto/ Gross amounts	Jumlah Neto/ Net amounts	
Laporan Posisi Keuangan					Statements of Financial Position
Giro pada bank lain	3.049.975.484	3.049.975.484	5.134.077.361	5.134.077.361	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain	215.000.000.000	215.000.000.000	-	-	Placements with other banks
Efek-efek	32.228.929.662	32.228.929.662	113.707.428.908	111.707.428.908	Marketable Securities
Piutang murabahah	220.403.750.882	218.472.862.636	219.540.543.553	218.377.653.424	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	938.148.736.691	913.923.488.841	988.378.349.665	967.731.182.680	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	6.816.777.400	6.574.975.631	21.230.017.271	21.029.657.338	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	15.107.630.083	15.107.630.083	13.529.862.550	13.529.862.550	Revenue sharing receivable
Piutang Ijarah	171.179.684	171.179.684	171.179.684	171.179.684	Ijarah receivables
Penyertaan saham	29.468.550	29.773.864	60.468.550	59.863.864	Investments in shares
Aset lain-lain	2.723.607.450	2.723.607.450	2.251.462.450	2.251.462.450	Other assets
Jumlah	1.433.680.055.886	1.407.261.823.335	1.364.003.389.992	1.339.992.368.259	Total
Komitmen dan kontinjensi					Commitment and Contingencies
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	53.469.490.295	53.469.490.295	100.843.197	100.843.197	Unused financing facilities issued
Bank garansi	-	-	2.532.000.000	2.532.000.000	Bank guarantee
Jumlah	53.469.490.295	53.469.490.295	2.632.843.197	2.632.843.197	Total

Eksposur maksimum risiko pembiayaan tercermin dari persentase setiap kategori pembiayaan yang diberikan terhadap jumlah pembiayaan. Portofolio pembiayaan yang diberikan terdiversifikasi ke dalam 20 jenis sektor ekonomi, dimana untuk posisi 31 Desember 2020 dan 2019, kelompok sektor ekonomi yang memperoleh penyaluran pembiayaan terbesar dari Bank adalah sektor ekonomi jasa-jasa dunia usaha.

The maximum exposure to financing risk is reflected in the percentage of each category of financing to total financing exposure. Financing portfolio diversified into 20 types of economic sectors, as of December 31, 2020 and 2019, wherein business services economic sector obtained the largest financing from the Bank.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Bank mengkategorikan nasabah yang menerima pembiayaan berdasarkan segmen pasar, yaitu komersial, konsumsi dan mikro, perusahaan pembiayaan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tabel dibawah ini menunjukkan komposisi pembiayaan yang diberikan Bank berdasarkan segmen pasar beserta tingkat *Non-Performing Financing (NPF)* pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The Bank categorizes customers based on market segments, namely; commercial, consumer and micro, multifinance and Small and Medium Enterprises (SME). The table below shows the composition of financing provided by the Bank based on market segment and its level of Non-Performing Financing (NPF) as of December 31, 2020 and 2019:

	2020		2019		
	Baki Debet/ <i>Outstanding financing</i>	Pembiayaan bermasalah/ <i>Non-performing financing</i>	Baki Debet/ <i>Outstanding financing</i>	Pembiayaan bermasalah/ <i>Non-performing financing</i>	
	%	%	%	%	
Komersial	68,58	0,75	75,19	3,31	Commercial
Perusahaan pembiayaan	3,02	0,99	1,37	-	Multifinance
Konsumsi dan Mikro	7,10	2,11	14,86	-	Consumption and Micro
UKM	21,30	19,17	8,58	16,93	SME
Jumlah	100,00	23,02	100,00	20,24	Total

Kualitas aset keuangan

Tabel dibawah ini menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko pembiayaan (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

Financial assets quality

The tables below shows financial assets quality per class of assets for all financial assets exposed by financing risk (gross of allowances for impairment losses):

	2020				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Giro pada bank lain	3.049.975.484	-	-	3.049.975.484	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain	215.000.000.000	-	-	215.000.000.000	Placement with other banks
Efek-efek	32.228.929.662	-	-	32.228.929.662	Marketable Securities
Piutang murabahah	202.521.424.146	-	17.882.326.736	220.403.750.882	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	866.171.001.438	34.665.694.858	37.312.040.395	938.148.736.691	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	6.769.404.899	47.372.501	-	6.816.777.400	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	15.107.630.083	-	-	15.107.630.083	Revenue sharing receivable
Piutang Ijarah	-	171.179.684	-	171.179.684	Ijarah receivables
Penyertaan saham	29.468.550	-	-	29.468.550	Investment in shares
Aset lain-lain	2.723.607.450	-	-	2.723.607.450	Other assets
Jumlah	1.343.601.441.712	34.884.247.043	55.194.367.131	1.433.680.055.886	Total

	2019				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Giro pada bank lain	5.134.077.361	-	-	5.134.077.361	Current accounts with other banks
Efek-efek	111.708.903.698	-	1.998.525.210	113.707.428.908	Marketable Securities
Piutang murabahah	201.949.246.583	969.844.810	16.621.452.160	219.540.543.553	Murabahah receivables
Pembiayaan musyarakah	936.513.652.637	20.000.000.000	31.864.697.028	988.378.349.665	Musyarakah financing
Pembiayaan mudharabah	21.230.017.271	-	-	21.230.017.271	Mudharabah financing
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima	13.529.862.550	-	-	13.529.862.550	Revenue sharing receivable
Piutang Ijarah	-	171.179.684	-	171.179.684	Ijarah receivables
Penyertaan saham	60.468.550	-	-	60.468.550	Investment in shares
Aset lain-lain	2.251.462.450	-	-	2.251.462.450	Other assets
Jumlah	1.292.377.691.100	21.141.024.494	50.484.674.398	1.364.003.389.992	Total

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Risiko Pasar

Dalam melaksanakan aktivitasnya, Bank terekspos pada risiko pasar yang terdiri atas risiko imbal hasil. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam surat berharga dan pasar uang serta kegiatan pendanaan. Bank senantiasa melakukan pengelolaan terhadap risiko pasar tersebut secara rutin dan/atau berkala.

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank untuk mengelola risiko pasar adalah:

1. Melaksanakan fungsi *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) untuk membahas kondisi pasar dan menetapkan strategi pengelolaan risikonya.
2. Melakukan pemantauan tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar.
3. Melakukan penyesuaian *pricing* pembiayaan agar senantiasa dapat kompetitif dengan *pricing* pasar dan dapat memberikan hasil yang optimal bagi shaibul maal (deposan).

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank adalah:

1. Melaksanakan fungsi ALCO untuk membahas manajemen likuiditas dan menetapkan strategi pengelolaan risikonya.
2. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan likuiditas, seperti Giro Wajib Minimum (GWM) dan lain-lain.
3. Menjaga posisi likuiditas Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia.
4. Memiliki cadangan sekunder dan cadangan tersier untuk kebutuhan likuiditas.
5. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana dalam pengelolaan portofolio secara menyeluruh baik secara sisi aset dan liabilitas.

b. Market Risk

In conducting its activities, the Bank is exposed to market risk consisting of yield risk and foreign exchange risk. Market risk, among others is present in the functional activities of the Bank, such as treasury activities and investments in securities and financial markets and financing activities. The Bank always manages market risk on a regular basis and/or periodically.

In anticipating the liquidity risk, risk management performed by the Bank are as follows:

1. Performing *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) function to discuss market condition and implement risk management strategy.
2. Monitoring yield rate in market.
3. Performing price adjustment for financing to compete with the market price and give optimum result to the customer.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk occurred when the the Bank is not able to settle obligations due from funding cash flows and/or used high quality liquid asset without disrupting the Bank's activity and financial condition.

In anticipating the liquidity risk, risk management performed by the Bank are as follows:

1. Perform ALCO function to discuss liquidity management and implement its risk management strategy.
2. Complying Bank Indonesia related requirement regarding liquidity such as Minimum Statutory Requirement and others.
3. Maintaining the Bank's liquidity according to Bank Indonesia regulation.
4. Having secondary and tertiary reserve for liquidity needs.
5. Increasing efficiency in using fund in portfolio management, both from assets and liabilities.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

6. Memenuhi seluruh kewajiban kepada nasabah secara tepat waktu untuk menjaga kepercayaan nasabah sementara tetap menjaga profitabilitas Bank.

Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap risiko likuiditas adalah dimana saat ini dana pihak ketiga perbankan melimpah, sehingga belum terasa dampaknya terhadap likuiditas, apalagi permintaan pembiayaan menurun. Hal itu membuat likuiditas Bank sangat longgar. Namun dikhawatirkan terjadi segmentasi dana masyarakat yang hanya berada di bank-bank besar. Bank yang berskala besar akan lebih banyak memperoleh likuiditas. Sebaliknya, bank berskala kecil akan kesulitan mendapatkan likuiditas. Namun dengan adanya kebijakan moneter saat ini, likuiditas Bank cukup memadai.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

6. Meet all obligations to customer's in a timely manner to maintain customer's trust while maintaining the Bank's profitability.

The effect pandemic of Covid-19 on liquidity risk is that currently there is an abundance of deposits in banks, so the impact on liquidity has not yet been felt, let alone decreased financing demand. This makes Bank liquidity very loose. However, it is feared that there will be segmentation of public funds that are only in large banks. Large-scale banks will obtain more liquidity. On the other hand, small-scale Banks will have difficulty obtaining liquidity. However, with the current monetary policy, the Bank liquidity is sufficient.

Table below shows the maturities of financial liabilities based on contractual payments as of December 31, 2020 and 2019:

	2020				
	Sampai dengan 1 bulan/ 1 month or less	> 1 bulan s.d. 3 bulan/ More than 1 month until 3 months	> 3 bulan s.d. 6 bulan/ More than 3 months until 6 months	> 6 bulan s.d. 12 bulan/ More than 6 months until 12 months	Jumlah/ Total
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segera	2.700.640.223	-	-	-	2.700.640.223
Simpanan giro wadiah	251.344.863.716	-	-	-	251.344.863.716
Simpanan dari bank lain	280.000.000.000	-	-	-	280.000.000.000
Bagi hasil yang belum dibagikan	4.805.984.900	-	-	-	4.805.984.900
Liabilitas lain-lain	2.222.277.313	-	-	-	2.222.277.313
Jumlah Liabilitas	521.073.768.152	-	-	-	521.073.768.152
Dana Syirkah Temporer					Temporary Syirkah Funds
Tabungan mudharabah	41.214.400.450	-	-	-	41.214.400.450
Deposito mudharabah	296.595.351.161	695.710.434.444	152.343.000.000	193.305.000.000	1.337.953.785.605
Giro mudharabah	14.175.195	-	-	-	14.175.195
Jumlah Dana Syirkah Temporer	337.823.926.806	695.710.434.444	152.343.000.000	193.305.000.000	1.379.182.361.250
					Total Temporary syirkah funds

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2019				Jumlah/ Total
	Sampai dengan 1 bulan/ 1 month or less	> 1 bulan s.d. 3 bulan/ More than 1 month until 3 months	> 3 bulan s.d. 6 bulan/ More than 3 months until 6 months	> 6 bulan s.d. 12 bulan/ More than 6 months until 12 months	
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segera	1.566.070.089	-	-	-	1.566.070.089
Simpanan giro wadiah	23.294.654.259	-	-	-	23.294.654.259
Simpanan dari bank lain	183.000.000.000	-	-	-	183.000.000.000
Bagi hasil yang belum dibagikan	3.998.879.515	-	-	-	3.998.879.515
Liabilitas lain-lain	630.785.907	-	-	-	630.785.907
Jumlah Liabilitas	212.490.389.770	-	-	-	212.490.389.770
Dana Syirkah Temporer					Temporary Syirkah Funds
Tabungan mudharabah	49.927.405.093	-	-	-	49.927.405.093
Deposito mudharabah	595.971.357.313	719.918.019.744	147.721.000.000	173.817.341.876	1.637.427.718.933
Giro mudharabah	335.222.592	-	-	-	335.222.592
Jumlah Dana Syirkah Temporer	646.233.984.998	719.918.019.744	147.721.000.000	173.817.341.876	1.687.690.346.618
					Total Temporary syirkah funds

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang langsung ataupun tidak langsung yang terjadi karena tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Manusia atau sumber daya insani pada Bank merupakan aspek vital dalam operasional Bank yang sangat mempengaruhi kinerja Bank. Risiko operasional yang berkaitan dengan sumber daya insani tentunya berkaitan dengan karyawan Bank sebagai pelaku utama dalam operasional Bank.

Fakta menunjukkan pandemi Covid-19 di Indonesia juga sangat mempengaruhi operasional Bank. Oleh karenanya pengelolaan risiko operasional wajib dilakukan dengan baik untuk meningkatkan kinerja layanan Bank kepada nasabah di era yang kompetitif dan sarat persaingan ini. Untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 maka telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengurangi pelayanan yang berinteraksi langsung dengan nasabah.
2. Memberlakukan penyesuaian jam operasional yang terbatas di seluruh jaringan kantor Bank.

d. Operational Risk

Operational risk is a risk on loss, directly or indirectly, due to insufficient or failure in internal process, human errors, system failures, and/or external events which affected the Bank's operations.

Human or human resources in the Bank is a vital aspect in Bank's operations which greatly affects the Bank's performance. Operational risks related to human resources are of course related to Bank employees as the main actors in the Bank's operations.

The facts show that the pandemic of Covid-19 in Indonesia has also greatly affected Bank operations. Therefore, operational risk management must be carried out properly to improve the performance of Bank services to customers in this competitive and competitive era. To break the chain of spread of the Covid-19 virus, the following steps have been taken:

1. Reducing services that interact directly with customers.
2. Adopting limited operating hours adjustments throughout the network Bank's office.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

3. Mengatur jam kerja agar tidak terjadi penumpukan atau konsentrasi orang di kantor dengan memberlakukan kebijakan sebagian karyawan bekerja di kantor dan sebagian bekerja dari rumah.
4. Mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan sesuai anjuran pemerintah.

Dalam penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk risiko operasional, Bank juga menerapkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif tersebut, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Bank.
2. Direksi menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.
3. Dewan Pengawas Syariah melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4. Bank menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan Sumber Daya Insani (SDI) yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai.

3. Regulate working hours so that there is no accumulation or concentration of people in the office by enforcing a policy that some employees work at the office and some work from home.
4. Follow the health protocol stipulated as recommended by the government.

In implementing risk management through active supervision from Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board, the Bank also implements several points in each of the supervising aspects as follows:

1. The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible to develop an organizational culture that provides awareness on operational risk and can contribute in managing operational risk according to the Bank's business strategy.
2. The Board of Directors creates culture which objectively discloses the operational risk to the whole organizational elements, so the operational risk can be promptly identified and mitigated.
3. The Sharia Supervisory Board evaluates operational risk management policies related to compliance with Sharia Principles.
4. The Bank consistently gives punishment to the officers and employees who are proven conducting irregularities and violation.

e. Legal Risk

Legal risk is a risk when there is a lawsuit and/or weakness in juridical aspect. This risk is also due to absence of supportive laws and regulations or weakness in agreements such as non-compliance of the validity contract terms or insufficient collateral.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

f. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Bank telah menyusun strategi dan rencana bisnis yang sebelumnya telah didiskusikan dengan Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh manajemen Bank. Bank juga melakukan kajian dan evaluasi strategi bisnis serta realisasi yang telah dicapai oleh Bank sesuai dengan yang terangkum dalam Rencana Bisnis Bank.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, serta prinsip Syariah.

Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik. Secara periodik, audit internal dan staf *compliance* senantiasa bekerja secara terpadu agar aktivitas operasional Bank berjalan sesuai dengan peraturan dan senantiasa menerapkan *check and balance* sehingga fungsi pengendalian dapat berjalan dengan baik.

Bank telah menyampaikan Laporan Profil Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi 31 Desember 2020, dengan Surat No. 050/DIR-BVIS/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan predikat risiko komposit yaitu 2 (*Low to moderate*).

Tingkat kesehatan bank sesuai Ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.10/SEOJK.03.2014 adalah hasil penilaian atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor profil risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), permodalan dan rentabilitas. Nilai akhir dari penilaian tingkat kesehatan Bank dinyatakan dalam peringkat komposit.

f. Strategic Risk

Strategic risk arises from insufficient determination and implementation of the Bank's strategies, incorrect business decision, or irresponsiveness to external changes.

The Bank has formulated the business strategies and plans based on discussions from the Board of Commissioners, Directors and all of the Bank's management. The Bank also reviews, evaluates, business strategy and its realisation achieved by the Bank based on Bank's Business Plan.

g. Compliance Risk

Compliance risk is a risk when the Bank does not comply or implement current laws and regulations and other policies. In practice, compliance risk is attached to Bank's risk related to laws and other regulations and policies, and sharia principles.

The Bank always try to comply with the applicable laws and regulations. Periodically, internal audit and compliance staff works integratedly so the Bank's operational activity is conducted based on applicable laws and regulations, and implement check and balance procedures, so the controlling function is properly performed.

The Bank has submitted its risk profile report to the Otoritas Jasa Keuangan as of December 31, 2020 as set forth in its letter No. 050/DIR-BVIS/I/2021 dated January 27, 2021 with Moderate composite risk.

The soundness level of the Bank, in accordance with Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No.10/SEOJK.03.2014 represents the result of evaluation of various aspects that affect the condition and performance of the Bank through quantitative and qualitative evaluation of the factors of risk profile, Good Corporate Governance (GCG), capital and profitability. The final result of the evaluation of the Bank's soundness level is stated as a composite rating.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan penilaian manajemen terkait tingkat kesehatan Bank posisi 31 Desember 2020, Bank memiliki peringkat komposit 2, dengan demikian Bank secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas dan permodalan yang secara umum sangat baik.

Based on the management's assessment of soundness of the Bank as of December 31, 2020, the composite rate of the Bank is 2 which shows that the Bank is sound and able to overcome significant negative effects of changes in business condition and other external factor, such as risk profile, the implementation of Good Corporate Governance (GCG), profitability and good capital.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

h. Reputation Risk

Reputational risk is a risk when there is decrease in stakeholder trust due to negative perspective to the Bank.

Langkah-langkah pengendalian risiko reputasi yaitu antara lain:

Steps in managing reputational risk are as follows:

1. Segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi.
2. Pencegahan terjadinya kejadian yang menimbulkan risiko reputasi yang secara umum dilakukan melalui serangkaian aktivitas yaitu:
 - Melakukan tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*), merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan Bank untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi/sosial yang diharapkan dapat membangun reputasi positif dari pemangku kepentingan Bank.
 - Komunikasi/edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan dalam rangka membentuk reputasi positif dari pemangku kepentingan Bank.
3. Pemulihan reputasi Bank setelah terjadi kejadian yang menimbulkan risiko reputasi, yaitu segala respon Bank untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadinya pemburukan reputasi Bank.

1. Immediately following up and handling customer complaints and lawsuit which can increase exposure in reputational risk.
2. Taking preventive action to prevent event which may arise general reputational risk through series of action:
 - Corporate social responsibilities, a series of activities done by the Bank for people empowerment in the form of economic/social activities which expected to build positive reputation from the Bank's stakeholders.
 - Routine communication/ education to stakeholders in order to build positive reputation from the Bank' stakeholder.
3. Restoring the Bank's reputation after an event has occurred which gives rise to reputational risk, which is any response of the Bank to restore and prevent worsening in the Bank's reputation.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

i. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan Bank antara lain:

1. Melakukan identifikasi terhadap risiko investasi secara berkala. Proses identifikasi mencakup sumber risiko yang dapat mempengaruhi pendapatan, nilai ekonomis dari posisi keuangan, dan modal Bank.
2. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara berkala, dan tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampauan.

j. Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

i. Investment Risk

Investment risk is a risk arising due to the Bank's share in the risk on customer's business which is financed by profit sharing financing, whether using net revenue sharing method or profit and loss method.

Risk management implementation performed by the Bank includes:

1. Performing regular investment risk identification. Identification process includes source of risk affected revenue, economic value of financial position, and the Bank's capital.
2. Performing regular monitoring towards compliance on approval limit and follow up action when it is breached.

j. Rate of Return Risk

Rate of return risk is a risk arising from changes in rate of return obtained by the Bank from financing activity that can influence the behavior of the customer.

37. Opini Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank No. 001/DPS-BVIS/I/2021 tanggal 29 Januari 2021, untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 menyatakan bahwa berdasarkan pengawasannya secara umum, aspek operasional dan produk, Bank telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta opini-opini Syariah dari DPS.

37. Sharia Supervisory Board Opinion

Based on Sharia Supervisory Board (SSB) Letter No. 001/DPS-BVIS/I/2021 dated January 29, 2021, it states that based on its general supervision in operational and product aspect, the Bank has complied with fatwa and sharia regulation issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council and Sharia opinion from SSB for the period from January 1, 2020 to December 31, 2020.

38. Kontinjensi dan Perkara Hukum

Bank mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, Pemerintah Tingkat I Provinsi Bandung, Ny. Elly Rosanti (Pemilik Lama) dan Weike Loppies S.H. (Notaris) atas tidak dikabulkannya permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 470/Braga, milik Bank yang berlokasi di Bandung yang telah jatuh tempo pada tahun 2008. Pada saat ini, perkara hukum tersebut telah sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, belum ada putusan dari Mahkamah Agung RI atas perkara hukum tersebut.

38. Contingencies and Lawsuit

The Bank filed a lawsuit in Bandung District Court, against the National Land Agency (BPN) Bandung, Bandung Provincial Government Level I, Mrs. Elly Rosanti (Previous Land's Owner) and Weike Loppies S.H. (Notary) related to the objection on the application for the extension of Certificate of Building Rights (HGB) No. 470/Braga, owned by the Bank which is located in Bandung that matured in 2008. At this time, the legal case has reached the Supreme Court of the Republic of Indonesia. As of the date of the issuance of the financial statements, there has been no decision from the Supreme Court on the legal proceedings.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Selain perkara hukum yang disebutkan diatas, Bank menghadapi perkara hukum atau gugatan yang timbul dari kegiatan normal usahanya. Manajemen Bank bersama dengan penasehat hukum berpendapat bahwa liabilitas akhir atas perkara hukum atau gugatan tersebut, jika ada, tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, tidak ada provisi yang dibentuk atas liabilitas kontinjensi tersebut.

In addition to the above lawsuit mentioned, the Bank is a party to certain lawsuits or claims arising from their ordinary course of business. The Bank's management and legal counsels believe that the resulting liabilities under these lawsuits or claims, if any, will not have a material effect on the financial statements, thus, no provision has been made for these contingent liabilities.

39. Perjanjian dan Ikatan

39. Agreements and Commitments

Perjanjian Sewa - Bank sebagai Lessee

Lease Agreements - Bank as Lessees

<u>Pihak dalam perjanjian/ Counterparties</u>	<u>Item yang disewa/ Leased items</u>	<u>Periode perjanjian/ Period of agreement</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 35)/ Related parties (Note 35)</u>		
PT Tri Daya Investindo	Sewa bangunan/ <i>Building lease</i>	Januari 2017 - Desember 2021/ <i>January 2017 - December 2021</i>
PT Asri Kencana Gemilang	Sewa ruangan/ <i>Office lease</i>	Mei 2019 - Desember 2022/ <i>May 2019 - December 2022</i>
PT Bank Victoria International Tbk	Sewa gudang/ <i>warehouse lease</i>	Juli 2019 - Juni 2021/ <i>July 2019 - June 2021</i>
PT Tri Daya Investindo	Sewa ruangan/ <i>Office lease</i>	Maret 2020 - Maret 2025/ <i>March 2020 - March 2025</i>
<u>Pihak ketiga/ Related parties</u>		
Rony Hartono Ng In Soen	Sewa bangunan/ <i>Building lease</i>	Agustus 2018 - Agustus 2021/ <i>August 2018 - August 2021</i>
Lina	Sewa bangunan/ <i>Building lease</i>	Februari 2019 - November 2021/ <i>February 2019 - November 2021</i>

40. Informasi Lainnya

40. Other Information

- Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Bank memiliki rasio *non-performing finance* (NPF) bruto untuk piutang dan pembiayaan masing-masing sebesar 4,73% dan 3,94% serta rasio NPF neto masing-masing sebesar 2,96% dan 2,64%.
- Rasio piutang dan pembiayaan terhadap jumlah dana pihak ketiga masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 74,05% dan 80,52%.

- As of December 31, 2020 and 2019, the Bank has gross non-performing financing (NPF) ratio for receivables and financing of 4.73% and 3.94% respectively, and net NPF ratio of 2.96% and 2.64%, respectively.
- The ratios of receivables and financing to total deposits as of December 31, 2020 and 2019 were 74.05% and 80.52%, respectively.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- c. Imbal hasil aset atau *Return on Assets* (ROA) untuk tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,16% dan 0,05%.
- d. Imbal Hasil Ekuitas atau *Return on Equity* untuk tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar negatif 0,09% dan 0,39%
- e. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat pembiayaan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

- c. Return on Assets as of December 31, 2020 and 2019 were 0.16% and 0.05%, respectively.
- d. Return on Equity as of December 31, 2020 and 2019 were negative 0.09% and 0.39%, respectively.
- e. As of December 31, 2020 and 2019, there is no financing granted and related to third parties which has exceeded the Bank's Maximum Financing Limit (MFL).

41. Rekonsiliasi Liabilitas yang Berasal dari Aktivitas Pendanaan

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Bank selama tahun 2020 yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan terkait kas dan nonkas:

	1 Januari/ January 1, 2020	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan Nonkas Pergerakan valuta asing/ Non-cash Changes Changes in foreign exchange	31 Desember/ December 31, 2020	
Liabilitas sewa	10.910.599.408	(2.881.785.916)	-	8.028.813.492	Lease liabilities

41. Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

The table below details changes in Bank liabilities during 2020 arising from financing activities, including both cash and non-cash changes:

42. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

- a. Pada tanggal 26 Februari 2021, Direksi telah menerima permohonan pengunduran diri dari Ibu Nurani Raswindriati yang merupakan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank berdasarkan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 18 Januari 2021.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/DIR-SK/JKT/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021, Bank memutuskan menunjuk Bapak Deddy Effendi Ridwan sebagai pejabat sementara Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank yang berlaku efektif sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan adanya penetapan jabatan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko yang baru.

42. Agreements and Commitments

- a. On February 26, 2021, Board of Directors has accepted the resignation of Mrs. Nurani Raswindriati, Compliance and Management Risk Director Bank based on his resignation letter dated January 18, 2021.

Based on Director Decree No. 003/DIR-SK/JKT/II/2021 dated February 17, 2021, Bank decide to delegate Mr. Deddy Effendi Ridwan as temporary "Pelaksana Tugas" Compliance and Management Risk Director effective on February 19, 2021 until a new Compliance and Management Risk Director is appointed.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- b. Pada bulan November 2020, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang akan berdampak pada perubahan nilai liabilitas imbalan kerja. Namun, pada tanggal 31 Desember 2020, Bank melakukan perhitungan liabilitas imbalan kerja berdasarkan UU yang berlaku sebelum UU Cipta Kerja, yaitu UU No.13/2003, karena dasar perhitungan liabilitas imbalan kerja berdasarkan UU Cipta Kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak penerapan PP tersebut serta mengevaluasi dampaknya terhadap laporan keuangan Bank.

- b. In November 2020, the President of Republic of Indonesia, enacted a Job Creation Law, that will have impact on the amount of employee benefits obligations. However, as at December 31, 2020, the Bank calculated the employee benefits obligations based on the law that was in effect before the Job Creation Law, the UU No.13/2013 due to the fact that the basis for calculation of the employee benefits obligation is further regulated in implementing regulations "Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja" which was enacted on February 2, 2021. As of date of completion of the financial statements, the Bank is still in the process of understanding the impact as a result of the implementation of the PP, and assessing the effect on the Bank's financial statements.

43. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Sejak awal tahun 2020, perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) pada tahun 2020 telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri perbankan, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Bank. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Bank.

43. Economic Environment Uncertainty

Since early 2020, the global economic slowdown and negative impact on major financial market caused by the pandemic spread of coronavirus (Covid-19) in year 2020 has resulted to increased volatility in the value of financial instruments, trading interruptions, disruptions to operations of companies, unstable stock market and tight liquidity in certain sectors in Indonesia, including the banking industry, which may continue and result to unfavorable financial and operating impact to the Bank. Indonesia's ability to minimize the impact of the global economic slowdown on the country's economy is largely dependent on the eradication of Covid-19 threat, as well as the fiscal and other measures that are being taken and will be undertaken by the government authorities. These measures, actions and events are beyond the Bank control.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

44. Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Penyesuaian atas Laporan Keuangan

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Bank namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amandemen PSAK No. 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan
- PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Amandemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, sebagai berikut:

- PSAK No.112, Akuntansi Wakaf
- Amandemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis

Bank masih mengevaluasi dampak penerapan amandemen PSAK diatas dan dampak terhadap laporan keuangan dan penerapan amandemen PSAK tersebut belum dapat ditentukan.

Penerapan PSAK No. 73

Bank menerapkan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Atas penerapan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, Bank tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

44. New Financial Accounting Standards and Adjustment of Financial Statements

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2020 and relevant for Bank, but did not result in substantial changes to Bank's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements:

- Amendment to PSAK No. 15, Investment in Associates and Joint Venture
- Amendment to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements
- Annual Improvement to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements
- PSAK No. 71, Financial Instruments
- PSAK No. 72, Revenue from Contract with Customers

Amendment to financial accounting standard issued that are mandatory for the financial year beginning or after 1 January 2021, is as follows:

- PSAK No.112, Accounting for Endowments
- Amendment to PSAK No. 22, Business Combination regarding Definition of Business

The Bank ist still evaluating the effects of the amendment to PSAK and has not yet determined the related effects on the financial statements.

Application of PSAK No. 73

The Bank have applied PSAK No. 73 effective for the financial year beginning January 1, 2020.

For application of PSAK No. 73 effective for the financial year beginning January 1, 2020, Bank has not restated comparative for the previous reporting period as permitted under the specific transition provisions in the standard.

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK VICTORIA SYARIAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tabel berikut menunjukkan saldo beberapa pos-pos laporan posisi keuangan untuk saldo awal 1 Januari 2020 setelah penerapan PSAK No. 73:

The following table shows the balance of several items on statement of financial position for the opening balance January 1, 2020 after the application of PSAK No. 73:

	Saldo 31 Desember 2019/ Balance as at 31 December 2019	Penyesuaian PSAK No.73/ Adjustment PSAK No.73	Saldo 1 Januari 2020/ Balance as at 1 January 2020	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Biaya dibayar dimuka	9.075.854.519	(392.963.991)	8.682.890.528	Prepaid expenses
Aset tetap - nilai tercatat	813.766.527	11.303.563.399	12.117.329.926	Property and equipment - net book value
Liabilitas sewa	-	10.910.599.408	10.910.599.408	Lease liabilities

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan 'sewa operasi' berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, Sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan tingkat sewa implisit dalam sewa atau jika tingkat sewa tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan tingkat sewa. Pada umumnya, Bank menggunakan sewa sebagai tingkat sewa diskonto pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang tingkat sewa yang digunakan adalah sebesar 4,26%. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

On the application of PSAK No. 73, Bank recognized right-of-use assets and lease liabilities in relation to leases which were previously classified as 'operating lease' under the principles of PSAK No. 30, Leases. These lease liabilities is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the lease rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using lease rate. Generally, the Bank uses its lease as discount rate on January 1, 2020. The weighted average of lease applied was 4.26%. Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognized in the statement of financial position as at December 31, 2019.

Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020, aset tetap Bank meningkat sebesar Rp 11.303.563.399 yang terdiri dari reklasifikasi biaya dibayar dimuka sebesar Rp 392.963.991 dari pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp 10.910.599.408. Selain itu, liabilitas sewa Bank meningkat sebesar Rp 11.303.563.399 (sebelum dikurangkan dengan sewa dibayar dimuka sebesar Rp 392.963.991) yang terdiri dari pengakuan liabilitas sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi.

By applying this standard, as of January 1, 2020, the Bank's property and equipment increased by Rp 11,303,563,399 which comprised reclassification of prepayments amounted Rp 392,963,991 recognition of leases that were previously recognized as operating lease amounted to Rp 10,910,599,408. In addition, the Bank's lease liabilities increased by Rp 11,303,563,399 (before deducting prepaid rent of Rp 392,963,991) which comprised recognition of lease obligation that were previously recognized as operating lease.

HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN



Gedung Graha BIP

Lantai 5

Jl. Gatot Subroto Kav. 23

Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

Telp. 021 - 5600467, 021 - 5225285 (Hunting)

Fax. 021 – 5664247

Website: <https://bankvictoriasyariah.co.id/>